

**PERAN MARIA ULLFAH DALAM MEMPERJUANGKAN  
HAK-HAK PEREMPUAN TAHUN 1935-1988**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta untuk  
Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan



Oleh:  
Itama Citra Dewi KurniaWahyu  
10406241001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Peran Maria Ullfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Tahun 1935-1988” ini disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 23 September 2014

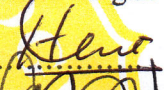
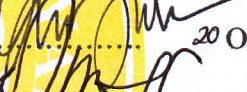

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dyah Kumalasari".

Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.  
NIP. 19770618 200312 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Maria Ullfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Tahun 1935-1988” telah dipertahankan di depan Dewan Penguji skripsi tanggal 7 Oktober 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Hj. Harianti, M. Pd.	Ketua Penguji		20 Oktober 2014
Dr. Dyah Kumalasari, M. Pd.	Sekretaris		20 Oktober 2014
Rr. Terry Irenewaty, M. Hum.	Penguji Utama		20 Oktober 2014

Yogyakarta, 21 Oktober 2014

Dekan FIS

Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Itama Citra Dewi Kurnia Wahyu

NIM : 10406241001

Judul : Peran Maria Ullfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan  
Tahun 1935-1988

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis gunakan sebagai sumber penulisan.

Pernyataan ini oleh penulis dibuat dengan penuh kesadaran dan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 23 September 2014

Penulis



Itama Citra Dewi Kurnia Wahyu  
NIM. 10406241001

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Subandi dan Ibu Tuminah).
2. Adikku Mega Dwi Puspitasari
3. Titan Rohkmutiana Hardhi
4. Almamaterku
5. Seluruh perempuan Indonesia

## **MOTTO**

Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.

(HR. Muslim)

Sabar, tawakal, dan tabah dalam menjalani setiap cobaan, Allah SWT selalu memberi hikmah disetiap cobaan-Nya.

(Ibu Tuminah)

*“Dedalane guna lawan sekti, kudu andhap asor, wani ngalah dhuwur wekasane, Tumungkolo yen dipun dukani, Bapang den simpangi, Ana catur mungkur”*

(Tembang Jawa, Mijil)

Do'a orang tua adalah perwakilan dari restu Tuhan.

(Penulis)

# PERAN MARIA ULLFAH DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN TAHUN 1935-1988

Oleh  
Itama Citra Dewi Kurnia Wahyu  
NIM 10406241001

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan latar belakang kehidupan Maria Ullfah; (2) menganalisis peranan Maria Ullfah pada masa kolonial tahun 1935-1945; (3) menganalisis peranan Maria Ullfah setelah masa kemerdekaan tahun 1946-1988.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahap. Tahap pertama adalah pemilihan topik sebagai kegiatan awal untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Tahap kedua heuristik atau pengumpulan sumber berupa sumber buku, arsip, surat kabar, dan majalah sezaman. Tahap ketiga verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat interpretasi atau penafsiran data-data yang diperoleh, dan tahap kelima historiografi atau penulisan sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Maria Ullfah lahir di kota Serang, Banten pada tanggal 18 Agustus 1911, merupakan anak dari keluarga golongan priyayi. Berkat pemikiran ayahnya yang progresif, Maria Ullfah dapat mengenyam pendidikan tinggi dan menjadi perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar *Meester in de Rechten* (Mr) dari Universitas Leiden, Belanda; (2) Peran Maria Ullfah pada masa kolonial, dimulai ketika bergabung dalam pergerakan nasional dengan menjadi guru di sekolah menengah Muhammadiyah dan sekolah Perguruan Rakyat. Setelah tahun 1935 Maria Ullfah aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan dan keluarga. Maria Ullfah adalah peletak dasar kesadaran masyarakat tentang pentingnya Undang-Undang Perkawinan bagi kedudukan perempuan. Pada masa pendudukan Jepang, Maria Ullfah bekerja di Departemen Kehakiman (*shikooku*), menjelang kemerdekaan menjadi anggota BPUPKI dan setelah kemerdekaan ditugasi oleh Sutan Sjahrir untuk menjadi *liaison officer* antara pemerintah Republik dan sekutu; (3) Sejak tahun 1946-1947 Maria Ullfah mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama Indonesia yang menduduki jabatan menteri, yaitu Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II dan III. Tahun 1947-1962 Maria Ullfah menjadi Direktur Kabinet RI. Tahun 1950-1961 Maria Ullfah menjabat sebagai ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia dan Ketua Sensor Film. Sejak tahun 1968-1973 Maria Ullfah aktif menjadi anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Selain itu, Maria Ullfah aktif dalam kegiatan sosial seperti Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Ketua III Dewan Koperasi Indonesia, dan Ketua Yayasan Rukun Isteri. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah wujud pencapaian Maria Ullfah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan.

Kata kunci: Maria Ullfah, Hak-hak Perempuan, Tahun 1935-1988.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Maria Ullfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan tahun 1935-1988” dengan lancar. Serta tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Penulisan skripsi ini merupakan wujud nyata hasil belajar penulis dalam menempuh studi di Pendidikan Sejarah FIS-UNY. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan kaum perempuan pada khususnya. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, dukungan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd. M.A, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M. Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Sejarah.
4. Dr. Aman, M. Pd selaku Pembimbing Akademik yang menjadi wakil orang tua kami selama menempuh studi di Pendidikan Sejarah.
5. Dr. Dyah Kumalasari M. Pd selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberi saran, dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.



6. Ibu Hj. Harianti, M. Pd, selaku Ketua Penguji yang memberikan argumentasi dan saran positif bagi penulis.
7. Ibu Rr. Terry Irenewaty, M. Hum, selaku Penguji Utama yang telah menguji dan memberikan saran positif untuk perbaikan dalam penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Sejarah yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penulis selama menempuh studi di Pendidikan Sejarah.
9. Seluruh Staf Arsip Nasional, Staf Perpustakaan Nasional, Staf *Jogja Library Center*, Staf Monumen Pers Solo, Staf UIN Suka, Staf Museum Monumen Jogja Kembali, Staf Perpustakaan Mandala Bhakti Wanitatama, Staf Perpustakaan FIB UGM, Staf Perpustakaan Fisipol UGM, Staf Perpustakaan UNY, Staf Perpustakaan FIS UNY, dan Staf LAB Pendidikan Sejarah yang banyak membantu penulis dalam mengumpulkan sumber.
10. Mas Wisnu, Mbak Pris dan seluruh Staf Kasubag/ TU FIS UNY yang banyak membantu penulis dalam hal mengurus administrasi.
11. Ibuku tercinta, Ibu Tuminah yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan kepadaku. Insyaallah Tuhan akan mengganti waktu, tenaga, dan pikiran yang engkau curahkan untuk keberhasilanku, amien.
12. Bapakku, Bapak Subandi yang telah menjagaku dan memberikan kesempatan kepadaku untuk belajar tentang arti sebuah kesabaran.
13. Adikku Mega Dwi Puspitasari yang selalu memberi semangat dan dorongan kepadaku agar lekas menyelesaikan studi. Terimakasih atas tawa, kasih sayang, semangat, dan perasaan bangga yang telah diberikan kepadaku, semoga kakakmu ini bisa terus menjadi idolamu.

14. Seluruh keluarga besarku, (Mbah Menek, Mbah Kasatun, Upoh Boyman, Pak lik Sinto, dan semuanya) yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.
15. Titan Rohkmutiana Hardhi yang dengan tulus memberikanku banyak hal, senyum, perhatian, nasehat, waktu, dan motivasi. Terimakasih untuk semua kesabaranmu dalam menghadapiku.
16. Ari Nur Andhika, S. Pd., Ayu Lea Lailatussa'diyah, S. Pd., dan Septi Wuri Handayani, S. Pd. yang telah menjadi keluarga, sahabat, dan teman selama di Yogyakarta. Terimakasih atas semua doa dan motivasi yang kalian berikan.
17. Mas Tubagus Umar Syarif, S. Pd. yang telah memberikanku ide dan mengenalkanku dengan sosok Ibu Mr. Maria Ullfah.
18. Keluargaku MSB (Mahasiswa Sejarah Bersubsidi) tersayang, terimakasih selama ini telah menjadi keluarga bagiku, melalui kalian aku banyak belajar. Terimakasih Suryanti, Dhani, Bakti, Titan, Yusmas, Nurul, Heni, Dwi, Esti, Taat, Winda, Leny, Maharani, Ivan, Handika, Lucky, Gandhi, Ririn, Ageng, Priswa, Bob, Indri, Dila, Danu, Happy, Iskandar, Damar, Nanidar, dan Joe.
19. Untuk semua teman-temanku yang telah menginspirasiku agar segera menyusul mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan, Suryanti, S. Pd. Heni Dwi Oktaviani, S. Pd. Dwi Wahyu Anggorowati, S. Pd. Esti Normalita, S. Pd. Winda Prasetianing Adhy, S. Pd. Leny Melia Andrianti, S. Pd. Maharani Novitarina Waspadi, S. Pd. Indri Prasetyawati, S. Pd. Syela Joe Desita, S. Pd.
20. Keluarga, sahabat, dan teman seperjuanganku Dybora Febriyanti, Nafiatul Qoriah, Manis Rohmawati, Indah Marsusiani. Ayo semangat, biarpun kita beda universitas tapi semoga lulusnya bareng, amien.

21. Keluarga Mpok Toyah, Cusna, Mela, dan Rina yang telah menjadi keluarga dan teman diskusi selama saya mencari arsip di Jakarta.
22. Keluarga Kos Gang Wisnu 28 (Mbk Nur, MbK Tiyas, MbK Rine, dan lainnya), Keluarga Kos Gang Sambu 3B (Siti Qomariyah, A.Md.T, Irma, dan lainnya), dan Keluarga Kos Gang Kuwera No. 9 (Mbak Nia, Mbak Ika, Mbak Juwi, Arsi dan Wita).
23. Keluarga besar Hima Pendidikan Sejarah 2010/2011 dan 2011/2012 yang banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada penulis.
24. Keluarga besar UKM Taekwondo UNY yang banyak mengajarkan penulis tentang arti sebuah keluarga, keberanian, dan rasa tanggung jawab.
25. Om J.J Rizal dan Bapak Isti Nugroho yang banyak membantu penulis dalam memperoleh sumber guna menyusun skripsi.
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna “tak ada gading yang tak retak”, namun penulis berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi semuanya, amien.

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR ISTILAH .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Historiografi yang Relevan .....	14
G. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	25

### BAB II. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN MARIA ULLFAH

A. Latar Belakang Keluarga Maria Ullfah .....	28
B. Latar Belakang Pendidikan Maria Ullfah .....	36

### BAB III. PERAN MARIA ULLFAH PADA MASA KOLONIAL TAHUN 1935-1945

A. Peran Maria Ullfah pada masa Kolonial Belanda .....	58
B. Maria Ullfah pada masa Pendudukan Jepang .....	95
C. Peran Maria Ullfah pada masa menjelang Kemerdekaan .....	102

### BAB IV. PERAN MARIA ULLFAH SETELAH MASA KEMERDEKAAN TAHUN 1946-1988

A. Maria Ullfah Menteri Perempuan Pertama serta Kebijakannya ...	113
B. Maria Ullfah dalam Kabinet Parlementer .....	140
C. Maria Ullfah dalam KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) .....	158
D. Maria Ullfah dalam DPA dan Kegiatan Sosial .....	187

### BAB V. KESIMPULAN ..... 200 |

### DAFTAR PUSTAKA ..... 203 |

### LAMPIRAN ..... 208 |

## DAFTAR SINGKATAN

APWI	<i>Allied Prisoners of War and Internees</i>
DPA	Dewan Pertimbangan Agung
dr.	dokter
Dr.	Doktor
GWS	Gerakan Wanita Sosialis
HBS	<i>Hogere Burger School</i>
<i>HOCl</i>	<i>Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers Jawa, Minahasa, an Amboina</i>
KNIL	<i>Koninklijk Nederlands Indisch Leger</i>
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
Kowani	Kongres Wanita Indonesia
K.W. III	Koning Willem III
<i>Mr</i>	<i>Meester in de Rechten</i>
NICA	<i>Nederlands Indies Civil Administration</i>
Nn.	Nona
Ny.	Nyonya
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PSI	Partai Sosialis Inonesia
R.A.	Raden Ayu
STOVIA	<i>School ter opleiding van Indische Artsen</i>
VVSL	<i>Vereeniging van Vrouwelijke Studenten Leiden</i>

## DAFTAR ISTILAH

Emigrasi	: Perpindahan penduduk.
<i>f</i>	: florin= gulden, satuan mata uang yang dipakai selama pendudukan Belanda.
Golongan Menak	: Kelompok yang termasuk dalam lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri.
<i>Hoofdacte</i>	: Gelar dalam bidang pendidikan yang tingkatannya lebih tinggi dari pada guru biasa atau sering disebut guru kepala sekolah.
Irigasi	: Sistem pengairan di sawah.
<i>Meester in de Rechten</i>	: Gelar bagi mereka yang telah lulus ujian doktoral bagian ketiga studi ilmu hukum, jurusan ( <i>richtingen</i> ) Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi di Belanda atau sekolah hukum di Hindia Belanda.
<i>Pinda</i>	: Kacang (bahasa Belanda).
<i>lekker</i>	: Lezat.
<i>Trem</i>	: Kereta yang dijalankan oleh tenaga listrik atau lokomotif kecil, biasanya digunakan sebagai angkutan penumpang dalam kota.
<i>Volksraad</i>	: Dewan Rakyat.
<i>Volks Concert</i>	: Konser Rakyat.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hlm.
Lampiran 1 Foto Maria Ullfah .....	209
Lampiran 2 Foto Keluarga Maria Ullfah .....	210
Lampiran 3 Foto Rumah Maria Ullfah Jalan Guntur No. 49 Jakarta .....	211
Lampiran 4 Foto Maria Ullfah dalam masa pergerakan nasional .....	212
Lampiran 5 Foto Maria Ullfah dalam Kabinet .....	213
Lampiran 6 Susunan Anggota BPUPKI .....	214
Lampiran 7 Susunan Kabinet Sjahrir II dan III .....	215
Lampiran 8 Foto Maria Ullfah bersama dengan ibu anggota Kowani .....	217
Lampiran 9 ARSIP .....	218



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Politik etis<sup>1</sup> yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1901 membawa dampak positif bagi kemajuan rakyat Indonesia, salah satunya adalah dengan munculnya kaum *elite* terpelajar. Keberadaan kaum *elite* terpelajar tersebut kelak akan menjadi motor penggerak pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Salah satu program politik etis yang memberikan kesadaran terhadap nasib bangsa Indonesia yang dibedakan kedudukannya dalam masyarakat kolonial adalah *edukasi*. *Edukasi* atau pendidikan dinilai sebagai jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki nasib rakyat, karena dengan adanya perbaikan pendidikan maka nasib rakyat akan menjadi lebih baik.

Pemberlakuan politik etis di Hindia Belanda melahirkan sekolah-sekolah bagi kaum pribumi. Bukan hanya sekolah rendah, tetapi dibangun pula sekolah menengah, sekolah keguruan, dan sekolah tinggi. Namun pengajaran di sekolah-sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedangkan bagi anak-anak perempuan hanya memperoleh pendidikan di rumah dan di lingkungan keluarga.<sup>2</sup> Anak-anak perempuan dididik untuk mempersiapkan diri menjadi ibu rumah tangga, mereka diharuskan belajar memasak, menjahit, dan membatik yang merupakan rutinitas di rumah.

---

<sup>1</sup> Politik etis merupakan “hutang kehormatan” yang harus dibayar pemerintah Hindia Belanda kepada Indonesia. Politik etis terdiri atas irigasi, edukasi, dan emigrasi. Politik etis ini disampaikan oleh Van Deventer dalam sebuah artikel di majalah *De Gids* tahun 1899.

<sup>2</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 27.

Kedudukan perempuan pada masa kolonial masih dalam konservatisme dan sangat terikat oleh adat.<sup>3</sup> Salah satu adat yang mengikat kaum perempuan adalah *pingitan*.<sup>4</sup> Istilah *pingitan* berasal dari kata “dipingit”, kata tersebut diambil dari kata “kuda pingitan” yang artinya kuda dikurung di dalam kandang dan tidak dibiarkan bebas berkeliaran seperti kuda lainnya. *Pingitan* yang menjadi adat istiadat lama melarang keras anak-anak gadis keluar rumah, bahkan pergi ke luar untuk belajar dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap adat. Kondisi tersebut berakibat pada pendidikan kaum perempuan di Indonesia yang rendah.

Sejarah mencatat dalam kebudayaan masyarakat Jawa, perempuan sering ditempatkan sebagai *the second sex*.<sup>5</sup> Hal tersebut tercermin dari ungkapan Jawa *swarga nunut neraka katut*, yang berarti kebahagiaan atau penderitaan isteri tergantung kepada suaminya. Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa peran seorang perempuan dalam suatu keluarga hanya sebagai pendukung saja. Keadaan yang demikian menyebabkan seorang isteri akan patuh kepada suaminya, terlebih ketika suami membawa perempuan lain ke rumah untuk dinikahi. Isteri akan cenderung menerima hal tersebut meskipun secara batiniah mereka menderita. Selain itu, pada masa kolonial seorang suami dapat dengan mudah menjatuhkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Pingitan* merupakan adat yang mengharuskan anak-anak gadis yang telah berusia matang (biasanya 12 tahun) untuk tetap tinggal dirumah hingga mereka menikah ketika berusia 15 atau 16 tahun. Adat *pingitan* biasanya berlaku pada masyarakat Jawa, khususnya dari golongan priyayi, lihat Stuers, Cora Vreede-de, *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 64.

<sup>5</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 43.

talak kepada isterinya tanpa memerlukan alasan yang jelas. Berbeda dengan kaum perempuan yang sangat sulit untuk meminta cerai dari suaminya.

Seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya akan kembali menjadi tanggung jawab keluarga. Segala kebutuhan hidup kembali menjadi tanggung jawab orang tua. Jika dilihat secara material dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengalami kekuarang, tetapi secara batiniah seorang perempuan yang diceraikan suaminya akan menderita. Hal tersebut sebabkan oleh pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa seorang isteri yang diceraikan suaminya adalah “aib” bagi keluarga. Masyarakat cenderung menilai sebuah perceraian bukan dari siapa yang bersalah, tetapi menilai isteri yang selamanya bersalah.

Rendahnya pendidikan dan kurangnya kemampuan untuk mencari nafkah sendiri membuat kaum perempuan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri. Kaum perempuan cenderung tergantung kepada suami mereka, sehingga apabila terjadi pelanggaran dalam perkawinan seorang isteri akan menerima hal tersebut. Isteri akan cenderung *nerimo* dan tidak akan meminta cerai karena dengan bercerai mereka tidak lagi mendapatkan uang dari suaminya. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan kaum perempuan baik dalam keluarga dan masyarakat menjadi rendah. Keadaan yang demikian banyak melahirkan tokoh-tokoh perempuan yang berjuang untuk meningkatkan kedudukan dan martabat kaum perempuan, salah satunya adalah Maria Ullfah.

Maria Ullfah adalah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Maria Ullfah merupakan anak kedua dari R.A.A. Mohammad Achmad dan R.A. Hadidjah Djajadiningrat yang lahir pada tanggal

18 Agustus 1911 di kota Serang.<sup>6</sup> Keluarga Maria Ullfah merupakan keluarga dari golongan atas atau priyayi, ayahnya adalah seorang Pamong Praja yang kemudian menjadi Bupati Kuningan. Peran ayah dalam kehidupan Maria Ullfah sangat besar, hal tersebut dikarenakan pemikiran ayahnya yang sangat progresif. Sebagai seorang ayah Raden Mohammad Achmad tidak mengadakan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, baginya semua anaknya sama dan harus mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya.

Kesadaran akan nasib kaum perempuan Indonesia mulai muncul pada diri Maria Ullfah ketika masih kecil. R.A. Soewenda merupakan sosok yang membuat jiwa kecilnya tergugah. R.A Soewenda merupakan bibi Maria Ullfah, ia dicerai oleh suaminya karena tidak mampu memiliki keturunan. Setelah bercerai, R.A. Soewenda dikembalikan kepada keluarga besarnya. Pada masa itu, kaum perempuan dari kalangan atas belum bisa mendapatkan pendidikan yang memungkinkan mereka untuk berdiri sendiri. Sehingga setelah dicerai, mereka akan kembali menjadi tanggung jawab keluarganya.

Seorang istri yang dicerai suaminya dipandang sebagai lambang kegagalan, karena tidak berhasil memikat perhatian suaminya terus-menerus.<sup>7</sup> Ia akan dikucilkan oleh keluarganya dari pergaulan umum, bahkan untuk makan dan minum-pun mereka tidak boleh bersama anggota keluarga lainnya. Hal tersebut juga dialami oleh R.A. Soewenda yang harus tetap tinggal di kamarnya dan tidak

---

<sup>6</sup> Gadis Rasid, *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1982), hlm. 7.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

boleh keluar rumah. Melihat diskriminasi yang dialami bibinya tersebut, Maria Ullfah sadar hingga tertanam dalam dirinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan.

Maria Ullfah merupakan perempuan pertama Indonesia yang menjadi *Meester in de Rechten* (Mr)<sup>8</sup>, lulus sebagai Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Leiden, Belanda.<sup>9</sup> Reputasinya sebagai perempuan Indonesia cerdas menjadikan Maria Ullfah sebagai salah satu perempuan yang diharapkan dapat memperbaiki kedudukan kaum perempuan. Maria Ullfah adalah sosok perempuan Indonesia yang memiliki semangat untuk melakukan perubahan bagi kaumnya. Pembawaan yang sederhana dan rendah hati menjadikan Maria Ullfah sebagai sosok priyayi yang tidak feodal serta sosok perempuan yang progresif di zamannya. Memajukan rakyat, terutama kaum perempuan adalah cita-citanya ketika masih menempuh studi di Belanda. Sutan Sjahrir merupakan tokoh yang banyak memberi pengaruh Maria Ullfah dalam hal kesadaran terhadap nasib bangsa Indonesia.

Peranan Maria Ullfah dalam kancah pergerakan nasional dimulai ketika ia menjadi guru disekolah partikelir atau sekolah yang dinyatakan sebagai “sekolah

---

<sup>8</sup> *Meester in de Rechten* atau sering disingkat Mr. adalah gelar bagi mereka yang telah lulus ujian doktoral bagian ketiga studi ilmu hukum, jurusan (*richtingen*) Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi di Belanda atau sekolah hukum di Hindia Belanda (*Rechtsgescool* atau *Faculteit der Rechtsgeleerdheid*). Gelar tersebut memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi: advokat dan pengacara serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya, dan pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan, lihat Anonim, 2014, [www.ui.ac.id/id/academic/page/fh](http://www.ui.ac.id/id/academic/page/fh). diakses pada Senin, 21 April 2014, pukul 19.13 WIB.

<sup>9</sup> Rosihan Anwar, *In Memoriam, Mengenang yang Wafat*. (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 125.

merah” oleh pemerintah kolonial Belanda. Keaktifannya dalam kancah pergerakan nasional menjadikan Maria Ullfah sebagai *parade paard* kebanggaan kaum nasionalis.<sup>10</sup> Peranannya dalam memperjuangkan nasib kaum perempuan dimulai ketika Maria Ullfah ikut dalam Kongres Perempuan Indonesai kedua tahun 1935. Sejak saat itu Maria Ullfah aktif memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan meskipun sempat dianggap akan mengganti hukum Tuhan. Tahun 1938, Maria Ullfah memutuskan untuk menikah dengan Santoso Wirodihardjo, SH kawan mengajarnya di sekolah Muhammadiyah. Menjelang proklamasi kemerdekaan Maria Ullfah dipilih menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pasca kemerdekaan Indonesia, Maria Ullfah dipercaya Sultan Sjahrir sebagai Pejabat Penghubung (*liaison officer*) yang bertugas untuk menjalin komunikasi antara pihak republik dengan pasukan sekutu.

Kiprah Maria Ullfah dalam kancah politik semakin naik, hal tersebut dibuktikan dengan diangkatnya Maria Ullfah sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II tahun 1946. Maria Ullfah mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama Indonesia yang menjadi menteri.<sup>11</sup> Karir politik Maria Ullfah dalam tahun-tahun selanjutnya masih sangat gemilang, hal tersebut membuktikan bahwa ia bukan sosok perempuan biasa. Maria Ullfah menjelma sebagai tokoh perempuan yang aktif dalam pemerintahan, sosial, maupun pergerakan kaum perempuan. Pernikahan Maria Ullfah dengan Santoso Wirodihardjo, SH harus

---

<sup>10</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>11</sup> Rosihan Anwar, *loc.cit.*,

berakhir ketika Santoso ditembak mati oleh tentara Belanda pada saat terjadi Agresi Militer Belanda II. Pada tahun 1964 Maria Ullfah kembali menikah dengan Soebadio Sastrosatomo seorang tahanan politik pada masa Soekarno.

Sosok Maria Ullfah belum banyak dikenal masyarakat, bahkan banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang jasanya. *Image* pahlawan perempuan yang banyak dikenal luas adalah R.A Kartini, Dewi Sartika, dan lainnya. Oleh karena itu, penulis mengangkat sosok Maria Ullfah agar sosoknya juga dikenal sebagai seorang pejuang perempuan yang memiliki peran terhadap perubahan nasib kaum perempuan Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Maria Ullfah?
2. Bagaimana peran Maria Ullfah pada masa kolonial tahun 1935-1945?
3. Bagaimana Peran Maria Ullfah setelah masa kemerdekaan tahun 1946-1988?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum
  - a. Meningkatkan pengetahuan dalam penulisan penelitian sejarah.
  - b. Menambah pengetahuan tentang sosok Maria Ullfah.
  - c. Meningkatkan pengetahuan tentang perjuangan Maria Ullfah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia.



- d. Menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Maria Ullfah.
- b. Menganalisis peranan Maria Ullfah pada masa kolonial tahun 1935-1945.
- c. Menganalisis peranan Maria Ullfah setelah masa kemerdekaan tahun 1946-1988.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Pembaca

- a. Menambah informasi dan pengetahuan tentang kehidupan Maria Ullfah, mulai dari latar belakang kehidupan dan pendidikan.
- b. Menambah informasi yang lebih jelas tentang peranan Maria Ullfah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam hukum perkawinan dan keluarga.
- c. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur yang berguna untuk menambah wawasan kesejarahan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi penulisan selanjutnya.

### 2. Bagi Penulis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

- b. Menjadi indikator untuk menguji kemampuan berpikir penulis dalam menulis sebuah penelitian tentang peran Maria Ullfah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah dan bagaimana cara menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis sejarah yang baik dan benar.

### **E. Kajian Pustaka**

Penulisan karya ilmiah memerlukan suatu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.<sup>12</sup> Kajian pustaka diperlukan untuk menyusun peta konsep dan landasan bagi peneliti. Melalui kajian pustaka peneliti dapat mengumpulkan beberapa buku acuan dan teori yang akan digunakan dalam pembahasan nantinya.

Maria Ullfah Achmad lahir tanggal 18 Agustus 1911 dari ayah Raden Mohammad Achmad dan R.A Hadidjah Djajadiningrat.<sup>13</sup> Maria Ullfah Achamad lebih dikenal dengan nama Maria Ullfah, tanpa Achmad dibelakangnya. Penulisan Ullfah dalam nama Maria Ullfah terdapat dua fersi. Fersi pertama dalam buku *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya* karya Gadis Rasid tahun 1982

---

<sup>12</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universita Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 3.

<sup>13</sup> Poeze, Harry. A, "In Het Land van de Overheerser I-Indonesiers in Nederland 1600-1950" terj. di *Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600-1950)*. (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 222.

dituliskan Ullfah dengan menggunakan huruf “l” dobel, sedangkan dalam buku *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian* karya Cora Vreede-de Stuers tahun 2008 ditulis dengan Ulfah. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis lebih memilih menggunakan Maria Ullfah.

Keluarga Maria Ullfah termasuk golongan priyayi. Ayah Maria Ullfah adalah Pamong Praja, sedangkan kakeknya adalah seorang Bupati Serang terkenal.<sup>14</sup> Keluarga Maria Ullfah merupakan keluarga yang mementingkan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari sikap ayah Maria Ullfah yang tidak membedakan pendidikan antara anak lelaki dan anak perempuan. Latar belakang kehidupan keluarga Maria Ullfah akan dibahas menggunakan buku karya Gadis Rasid tahun 1982 yang berjudul *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*.

Maria Ullfah memulai pendidikan sekolah dasar di Rangkasbitung, tetapi hal tersebut tidak begitu lama.<sup>15</sup> Raden Mohammad Achmad yang seorang pejabat pemerintah kolonial Belanda sering dipindah tugaskan ke berbagai daerah, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendidikan Maria Ullfah. Sejak kecil Maria Ullfah sudah dibiasakan untuk mendapatkan pendidikan dari sekolah-sekolah Belanda. Maria Ullfah pergi ke Belanda bersama ayah dan kedua adiknya pada tahun 1929.<sup>16</sup> Ayah Maria Ullfah dikirim ke Belanda untuk mempelajari masalah perkoperasian. Di Belanda, Maria Ullfah mengambil kuliah di jurusan Hukum Universitas Leiden. Buku *di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri*

---

<sup>14</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>15</sup> Bonnie Triyana, dkk, “Panggil Dia Ietje”, *Historia*, Nomor 1, 2012, hlm. 21.

<sup>16</sup> Poeze, Harry A, *loc.cit.*,

*Belanda (1600-1950)* karya Harry A. Poeze tahun 2008 menjelaskan tentang kehidupan Maria Ullfah ketika menempuh studi di Belanda.

Maria Ullfah menempuh studi di Universitas Leiden selama empat tahun, ia mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama Indonesia yang mendapat gelar *Meester in de Rechten*. Maria Ullfah kembali ke Indonesia pada bulan Desember 1933. Perannya pada masa kolonial, dimulai ketika bergabung dalam pergerakan nasional dengan menjadi guru di sekolah Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat. Pada waktu itu sosok Maria Ullfah menjadi kebanggaan kaum nasionalis, dimana putri seorang Bupati didikan Belanda yang berjuang untuk bangsanya.<sup>17</sup> Maria Ullfah mulai aktif dalam gerakan politik perempuan ketika ikut dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua pada tahun 1935. Pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga tahun 1938, Maria Ullfah mengusulkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Peran Maria Ullfah pada masa kolonial Belanda dibahas dengan menggunakan buku *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan (suatu pengalaman) Ceramah tanggal 28 Februari 1981 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta* karya Maria Ullfah Soebadio. Selain itu, penulis menggunakan buku *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian* karya Cora Vreede-de Stuers.

Sejak tahun 1942 Indonesia memasuki masa pendudukan Jepang. Buku berjudul *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik (1942-1998)* karangan Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto menjelaskan tentang keadaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang.

---

<sup>17</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 39.

Pada masa pendudukan Jepang, Maria Ullfah memilih bekerja pada Professor Soepomo di Departemen Kehakiman (*shikooku*). Tidak banyak *literature* yang menjelaskan tentang kehidupan Maria Ullfah pada masa penjajahan Jepang, sehingga penulis tetap menggunakan buku karya Gadis Rasid. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Maria Ullfah bersama Siti Sukaptinah Soenarjo Mangoenpoespito terpilih menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).<sup>18</sup> Kedudukan Maria Ullfah dalam BPUPKI dijelaskan dalam buku karangan Lembaga Soekarno Hatta yang berjudul *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*. Pasca Proklamasi, Maria Ullfah ditugasi oleh Sutan Sjahrir untuk menjadi penghubung (*liaison officer*).

Pada tanggal 12 Maret 1946 Kabinet Sjahrir II terbentuk.<sup>19</sup> Untuk pertama kalinya dalam Kabinet Republik Indonesia ditunjuk seorang perempuan untuk duduk dalam kabinet tersebut. Buku karya P.N.H Simanjuntak yang berjudul *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi* membahas tentang keadaan politik Indonesia pada masa Kabinet Sjahrir. Maria Ullfah dipercaya Sutan Sjahrir untuk duduk sebagai Menteri Sosial dengan tugas melanjutkan proyek kemanusiaan pemulangan interniran dari kamp-kamp di seluruh Indonesia. Peran Maria Ullfah pada saat menjadi *liaison officer* dan

---

<sup>18</sup> Lembaga Soekarno Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*. (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm. 24.

<sup>19</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik (1942-1998)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.207.

Menteri Sosial dibahas dengan menggunakan buku *Mengenang Sjahrir* yang terbit tahun 1980, buku tersebut berisi artikel yang ditulis langsung oleh Maria Ulfah.

Atas permintaan Perdana Menteri Amir Syarifuddin sejak 19 Agustus 1947 Maria Ulfah menjadi Sekretaris Perdana Menteri dan Sekertaris Dewan Menteri.<sup>20</sup> Kehidupan Maria Ulfah sebagai Direktur Kabinet RI tidak banyak dibahas dalam buku-buku, hanya buku *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* karangan Gadis Rasid yang sedikit menjelaskan peran Maria Ulfah ketika menjadi Direktur Kabinet. Sejak tahun 1950 hingga 1961 Maria Ulfah menjabat sebagai Ketua Kongres Wanita Indonesia.<sup>21</sup> Peranan Maria Ulfah dalam Kongres Wanita Indonesia akan dibahas menggunakan buku *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* terbitan tahun 1978. Buku tersebut menjelaskan bagaimana Kongres Wanita Indonesia sebelum dan sesudah terbentuknya. Penulis juga menggunakan buku yang berjudul *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu setelah R.A Kartini 1904-1984* terbitan Departemen Penerangan RI. Buku tersebut berisi artikel-artikel yang membahas tentang pergerakan organisasi perempuan.

Maria Ulfah pensiun sebagai pegawai negeri pada bulan Juni 1967.<sup>22</sup> Sejak bulan Februari 1968 Maria Ulfah diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dimasa tua Maria Ulfah aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Yayasan Rukun Istri, dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Empat puluh lima tahun setelah

---

<sup>20</sup> Rosihan Anwar, *loc.cit.*,

<sup>21</sup> Lihat “Tanggal-Tanggal Penting”, dalam Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 182.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

berjuangannya, akhirnya tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-Undang Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan No. 1/1974 dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.<sup>23</sup> Kehidupan dimasa tua Maria Ullfah akan dibahas dengan menggunakan buku karya Gadis Rasid. Keterbatasan sumber buku yang membahas tentang Maria Ullfah menjadikan buku *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya* masih menjadi buku rujukan penulis dalam penyusunan skripsi.

#### **F. Historiografi yang Relevan**

Penulisan sejarah adalah suatu klimaks dari kegiatan penelitian sejarah.<sup>24</sup> Penulisan sejarah dikenal dengan istilah historiografi, yang berarti rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>25</sup> Dalam penulisan sebuah karya sejarah, diperlukan historiografi yang relevan.

Historiografi yang relevan merupakan salah satu komponen yang digunakan sebagai acuan dalam merekonstruksi peristiwa dimasa lampau. Dimana historiografi yang relevan adalah kajian-kajian historis yang mendahului penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Historiografi yang relevan ini dapat berupa buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau karya-karya lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kegunaan dari

---

<sup>23</sup> Bonnie Triyana, dkk, “Agar Bahtera Tak Lekas Retak”, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>24</sup> Sardiman A.M, *Mengenal Sejarah*. (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2004), hlm. 106.

<sup>25</sup> Louis Gottschalk. “Understanding History: a Primer of Historical Method” a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengenal Sejarah*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.



historiografi yang relevan adalah untuk menunjukkan keaslian dari sebuah karya ilmiah, sehingga karya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan plagiarisme.

Historiografi yang relevan dalam penulisan skripsi ini adalah *journal* karya George McT. Kahin yang berjudul *in Memoriam: Maria Ullfah Soebadio, 1911-1988*. Persamaan antara skripsi dengan *journal* tersebut adalah sama-sama membahas tentang sosok Maria Ullfah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan *journal*, perbedaan tersebut terletak pada isinya. Dalam *journal* tersebut George McT. Kahin hanya menceritakan sosok Maria Ullfah secara singkat, sedangkan dalam skripsi ini sosok Maria Ullfah akan diulas lebih mendalam. Sosok Maria Ullfah akan diulas mulai dari latar belakang kehidupan hingga kiprahnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Selanjutnya skripsi karya Galuh Ambar Sari, mahasiswa Pendidikan Sejarah, UNY yang berjudul *Gerakan Perempuan Indonesia dalam Konstelasi Politik 1950-an: Studi Perwari*. Skripsi tersebut membahas tentang corak gerakan organisasi perempuan Indonesia dalam periode 1950-an, khususnya Perwari. Pada periode 1950-an corak organisasi perempuan yang awalnya lebih ke sosial berubah ke ranah politik. Selain itu, dalam perkembangannya Perwari aktif mendesak pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Peneliti menggunakan skripsi tersebut untuk melihat bagaimana suasana gerakan organisasi perempuan periode 1950-an.

## G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Sejarah merupakan konstruksi dari masa lampau manusia.<sup>26</sup> Sejarah manusia disusun dari pengalaman ataupun kejadian yang terjadi dimasa lampau. Sejak lahir manusia mulai menyusun sendiri sejarah hidupnya. Dari sejarah hidup manusia akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan selanjutnya. Sebagai sebuah ilmu, sejarah dalam penulisannya memerlukan metode. Tanpa metode, kumpulan pengetahuan tentang objek tertentu tidak dapat dikatakan sebagai ilmu, sekalipun masih ada syarat lain.<sup>27</sup> Penggunaan metode dalam penelitian sejarah adalah untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu agar menghasilkan karya sejarah yang kritis, ilmiah, dan objektif.

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara.<sup>28</sup> Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah ialah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, intepretasi, dan penyajian sejarah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi (kritik sejarah), intepretasi, dan historiografi.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Sardiman A.M, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>27</sup> Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 40.

<sup>28</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 64.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

#### a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal dari penelitian. Pemilihan topik digunakan untuk menentukan permasalahan yang hendak dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian hendaknya topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>30</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan emosional, dimana peneliti melihat sosok Maria Ullfah sebagai salah satu sosok perempuan Indonesia yang cerdas dan gigih memperjuangkan nasib kaumnya, khususnya dalam hal Undang-Undang Perkawinan. Judul yang diambil oleh peneliti adalah “Peran Maria Ullfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Tahun 1935-1988”.

#### b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein* yang artinya menemukan.<sup>31</sup> Jadi tahap heuristik adalah tahap untuk mengumpulkan sumber, jejak-jejak sejarah yang diperlukan. Tujuan dari pengumpulan sumber adalah agar penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber yang relevan, jelas, lengkap, dan menyeluruh.

Pengumpulan sumber harus berdasarkan jenis penelitian yang akan dikaji. Pengumpulan sumber dilakukan dengan menelaah berbagai buku referensi, bahan-bahan arkeologis, epigrafis, numimastis, dokumen resmi, dan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>31</sup> Sardiman A.M, *op.cit.*, hlm. 101.

dokumen pribadi. Menurut sifatnya sumber sejarah dibagai menjadi dua macam, yaitu:

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan panca indera yang lain atau alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya yang selanjutnya disebut sebagai saksi mata.<sup>32</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut, maka sumber primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa buku yang diperoleh dari UPT Perpustakaan UNY, perpustakaan Museum Monumen Jogja Kembali, Perpustakaan Monumen Pers Nasional, dan Yayasan Kowani Mandala Bhakti Wiratama. Selain itu, skripsi ini menggunakan sumber transkrip percakapan antara Maria Ullfah dengan Dewi Fortuna Anwar yang dilakukan pada tahun 1983 yang diperoleh penulis di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta. Selanjutnya penulis menggunakan sumber arsip-arsip pendukung lainnya yang diperoleh dari ANRI. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku, Arsip, majalah dan surat kabar yang sezaman serta berhubungan dengan Maria Ullfah.

Kumpulan Arsip Nasional yang dimaksud adalah:

ANRI. Kabinet Presiden RI No. 2044. *Surat Pernyataan Gerakan Wanita Sosialis*.

ANRI. Kementerian Perburuhan dan Sosial 1946-1950 No. 1. *Berkas Mengenai Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial 20 Januari 1946- 2 Oktober 1947*.

---

<sup>32</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 35.

ANRI. Kementerian Penerangan No. 239. *Berkas Mengenai Jatuhnya Kabinet Sjahrir*.

ANRI. Sejarah Lisan Tahun 1973-1994 No. 154. *Maria Ulfah-Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*. 1983.

Sumber buku yang dimaksud adalah:

Gadis Rasid. (1982). *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Maria Ullfah Subadio. "Bung Sjahrir", dalam Rosihan Anwar. (1980). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.

Maria Ullfah Soebadio. (1981). *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan (suatu pengalaman) Cerama tanggal 28 Februari 1981 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Surat kabar dan majalah yang dimaksud adalah *Surat Kabar Kedaulatan Rakjat, Majalah Penjebar Semangat* dan *Majalah Tempo*.

## 2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Menurut Louis Gottschalk sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber sekunder sebagai berikut:

Anonim. (1984). *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu setelah Kartini 1904-1984*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Nani Soewondo. (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poeze, Harry. A. (2008). "In Het Land van de Overheerser I-Indonesiers in Nederland 1600-1950" terj. *di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600-1950)*. Jakarta: Gramedia.
- Rosihan Anwar. (2002). *In Memoriam Mengenang yang Wafat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_. (1995). *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Santo Koesoebjono, dkk. (2008). *Siti Soendari, Adik Bungsu dr. Soetomo*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Simanjuntak P.N.H. (2003). *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.
- Slamet Muljana. (2008). *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai kemerdekaan Jilid I*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai kemerdekaan Jilid II*. Yogyakarta: LKiS.
- Soebadio Sastrosatomo. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Stuers, Cora Vreede-de. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wieringa, Saskia E. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Garba Budaya.
- Yuanda Zara M. (2009). *Peristiwa 3 Juli 1946 Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Media Persindo.

### c. Kritik Sumber atau Verifikasi

Kritik sumber diperlukan dalam penelitian sejarah karena untuk menjadikan suatu kisah maka sumber-sumber sejarah harus melakukan kritik sumber terlebih dahulu. Sebuah sumber harus dikritik karena setiap sejarawan

pastilah memiliki prasangka, atau *prejudice*.<sup>33</sup> Dengan demikian kritik sumber sebagai upaya untuk mencari fakta, kebenaran sejarah, dan *what really happened*.<sup>34</sup> Kritik sumber terdiri atas kritik ekstern dan kritik intern. Aspek eksteren menyangkut persoalan apakah sumber itu memang merupakan sumber yang diperlukan. Selanjutnya aspek intern berkaitan dengan persoalan apakah sumber tersebut dapat member informasi yang kita butuhkan.

#### d. Interpretasi

Setelah melakukan kritik sumber, peneliti akan mendapatkan banyak informasi tentang perjalanan sejarah yang akan dikaji. Fakta-fakta tersebut selanjutnya akan disusun secara kronologis sehingga menghasilkan suatu kerangka kisah sejarah. Namun rangkaian fakta-fakta tersebut belum merupakan historiografi. Agar menjadi sebuah kisah sejarah maka perlu dilakukan interpretasi. Interpretasi merupakan usaha untuk memberikan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bias subjektivitas.<sup>35</sup>

#### e. Penulisan Sejarah atau Historiografi

Penulisan adalah klimaks dari kegiatan penelitian sejarah. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis sangat penting.<sup>36</sup> Hal-hal yang perlu

---

<sup>33</sup> Sardiman A.M, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>36</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 105.



dipertimbangkan dalam penulisan sejarah adalah kecermatan dan penggunaan bahasa sesuai kaidah yang berlaku, bahasa yang baik dan benar, serta perlu ada daya tarik dalam penyajian.<sup>37</sup> Hasil penelitian ini berupa skripsi berjudul *Peran Maria Ullfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan tahun 1935-1988*”.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada tahap awal suatu pengkajian, peneliti perlu menetapkan bagaimana hendak mendekati obyek studinya. Peneliti terlebih dahulu harus menentukan *approach* atau pendekatan yang akan diterapkan. Pengkajian sejarah yang menggunakan pendekatan akan lebih mampu melakukan eksplanasi (penjelasan) dari pada yang membatasi diri pada pengungkapan bagaimana sesuatu terjadi.<sup>38</sup> Penggambaran suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, baik itu dari segi mana kita memandang, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan multidimensional.

Penggunaan pendekatan multidimensional diharapkan dapat memberi suatu gambaran tentang peristiwa secara mudah dan menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan penulis dalam meneliti adalah:

---

<sup>37</sup> Sardiman A.M, *op.cit.*, hlm. 107.

<sup>38</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.ix.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

#### a. Pendekatan Psikologi

Menyelami mentalis seorang tokoh diperlukan analisis psikologi.<sup>40</sup> Hal tersebut bertujuan untuk memahami dan mendalami kepribadian tokoh tersebut, mulai dari latar belakang lingkungan sosio kultural di mana tokoh tersebut dibesarkan, bagaimana proses pendidikannya, dan watak-watak orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, pendekatan psikologi dalam studi sejarah dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tidak terlihat dalam jiwa seseorang dimasa lampau dan hubungannya dengan lingkungan. Pendekatan psikologis dalam skripsi ini dimaksudkan untuk memahami dan mendalami tokoh Maria Ullfah, mulai dari latar belakang kehidupan, pendidikan, dan lingkungannya. Trauma akibat melihat diskriminasi yang dialami bibinya yang bernama R.A Soewenda menjadi latar belakang Maria Ullfah memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam hukum perkawinan dan keluarga.

#### b. Pendekatan Gender

Istilah gender sering disamakan dengan istilah seks atau jenis kelamin. Perlu ditegaskan bahwa istilah gender berbeda dengan istilah seks, karena seks merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.<sup>41</sup> Gender bukan merupakan kodrat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>41</sup> Riant Nugroho, *op.cit.*, hlm. 2.

ataupun ketentuan dari Tuhan, melainkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial serta budaya setempat. Mengutip dari Kuntowijoyo, pendekatan gender penting dalam penulisan sejarah perempuan karena mengharuskan orang untuk melihat naskah sosial budaya yang ada.<sup>42</sup> Pendekatan gender dalam skripsi ini digunakan untuk mengkaji peran Maria Ullfah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam hukum perkawinan dan keluarga.

#### c. Pendekatan Pendidikan

Pendekatan pendidikan dalam penelitian sejarah digunakan untuk menganalisis bagaimana pendidikan dapat memicu perubahan sosial dalam masyarakat pada masa lampau. Intisari dari atau *eidos* dari pendidikan adalah pe-manusia-an manusia-muda.<sup>43</sup> Pendekatan pendidikan dalam skripsi ini digunakan untuk mengkaji latar belakang pendidikan Maria Ullfah, di mana pendidikan yang ia peroleh digunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Berkat latar belakang pendidikan yang mumpuni dalam bidang hukum, akhirnya Maria Ullfah dapat memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam hukum perkawinan dan keluarga.

---

<sup>42</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 256.

<sup>43</sup> Driyarkara, *Driyarkara tentang Pendidikan*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980), hlm. 78.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah gambaran umum tentang isi yang dibahas dalam sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul *Peran Maria Ullfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan tahun 1935-1988* adalah sebagai berikut:

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab pertama penulis mengulas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dikaji, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metodologi penelitian dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan dari skripsi ini.

### **BAB II. Latar Belakang Kehidupan Maria Ullfah**

Bab kedua penulis mendeskripsikan tentang biografi Maria Ullfah, mulai dari latar belakang kehidupan keluarga hingga latar belakang pendidikan Maria Ullfah.

### **BAB III. Peran Maria Ullfah dalam masa Kolonial tahun 1935-1945**

Bab ketiga membahas tentang peran Maria Ullfah dalam masa Kolonial tahun 1935-1945. Dalam bab ini penulis membagi materi kedalam tiga masa, yaitu masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa menjelang kemerdekaan. Sekembalinya dari Belanda, Maria Ullfah memutuskan untuk bergabung dalam usaha pergerakan nasional dengan menjadi guru di sekolah menengah Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat di Batavia. Peran Maria Ullfah dalam gerakan politik perempuan dimulai pada tahun 1935 yaitu pada saat Kongres Perempuan Indonesia II di Batavia.

Pada masa pendudukan Jepang Maria Ulfah lebih memilih tidak aktif dalam gerakan perempuan. Selama masa pendudukan Jepang Maria Ulfah bekerja di *Shikooku* (Departemen Kehakiman). Maria Ulfah mulai aktif kembali pada tahun 1945 dalam BPUPKI. Pada November 1945, ia menjadi penjabat penghubung (*liaison officer*).

#### **BAB IV. Peran Maria Ulfah setelah masa Kemerdekaan tahun 1946-1988.**

Bab keempat membahas tentang peran Maria Ulfah setelah masa kemerdekaan tahun 1946-1988. Bab ini dibagi kedalam empat sub-bab pembahasan yaitu ketika Maria Ulfah diangkat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II dan III, Maria Ulfah dalam Parlemen, Maria Ulfah dalam Kongres Wanita Indonesia, serta Maria Ulfah dalam Dewan Pertimbangan Agung dan Kegiatan Sosial.

Sejak 12 Maret 1946 Maria Ulfah resmi diangkat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II. Maria Ulfah merupakan perempuan pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang menduduki jabatan sebagai menteri. Jabatan tersebut diemban Maria Ulfah hingga Kabinet Sjahrir III jatuh, yaitu tanggal 27 Juni 1947. Pasca Kabinet Sjahrir III jatuh, atas permintaan Perdana Menteri Amir Syarifuddin sejak 19 Agustus 1947 Maria Ulfah menjadi Sekretaris Perdana Menteri dan Sekretaris Dewan Menteri. Jabatan tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi Direktur Kabinet RI.

Selain aktif dalam pemerintahan Maria Ulfah aktif pula dalam organisasi perempuan. Sejak tahun 1950 hingga 1961 Maria Ulfah terpilih menjadi ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia, suatu badan gabungan dari organisasi

perempuan di Indonesia. Jabatan terakhir Maria Ullfah dalam pemerintahan pasca pensiun sebagai pegawai negeri adalah sebagai anggota DPA. Selain itu, dalam bidang sosial Maria Ullfah aktif sebagai anggota pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia dan ketua yayasan Rukun Isteri.

## **BAB V. Penutup**

Bab kelima adalah kesimpulan dari keseluruhan bab. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada bab pertama.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG KEHIDUPAN MARIA ULLFAH**

#### **A. Latar Belakang Keluarga Maria Ullfah**

Maria Ullfah Achmad atau yang dikenal dengan nama Maria Ullfah<sup>1</sup> adalah perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr). Maria Ullfah mendapatkan gelar tersebut pada tahun 1933 dari Universitas Leiden, Belanda.<sup>2</sup> Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Maria Ullfah tercatat sebagai perempuan pertama di Indonesia yang menduduki jabatan menteri. Maria Ullfah menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II sejak bulan Maret 1946. Jabatan tersebut ia emban hingga Kabinet Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada 27 Juni 1947.<sup>3</sup> Berkaitan dengan yang pertama, Maria Ullfah merupakan perempuan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang untuk menikah harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala negara. Ia adalah Maria Ullfah, perempuan Banten yang terus berjuang untuk kemajuan rakyat serta berjuang untuk kehidupan kaum perempuan Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan.

Maria Ullfah lahir pada tanggal 18 Agustus 1911 di kota Serang, Banten.<sup>4</sup> Ayah Maria Ullfah bernama R.A.A. Mohammad Achmad dan ibunya bernama

---

<sup>1</sup> Foto Maria Ullfah dapat dilihat dalam lampiran 1, hlm. 209.

<sup>2</sup> Gadis Rasid, *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1982), hlm. 31.

<sup>3</sup> Rosihan Anwar, *In Memoriam Mengenang yang Wafat*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 125.

<sup>4</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 7.

R.A. Hadidjah Djajadiningrat.<sup>5</sup> Ayahnya merupakan Pamong Praja yang bekerja pada pemerintah kolonial, sedangkan ibu Maria Ullfah berasal dari keluarga Bupati Serang terkenal yaitu R.T.A. Djajadiningrat. Maria Ullfah merupakan anak kedua dari empat bersaudara, tetapi dalam majalah *Historia* disebutkan bahwa Maria Ullfah adalah anak pertama dari tiga bersaudara.<sup>6</sup> Hal tersebut wajar, karena kakak Maria Ullfah meninggal ketika masih bayi. Keadaan tersebut membuat orang beranggapan bahwa Maria Ullfah adalah anak sulung. Maria Ullfah memiliki dua saudara, satu saudara perempuan yang bernama Iwanah dan satu saudara lelaki bernama Hatnan.

Pada awalnya Maria Ullfah diberi nama Mariam Ullfah oleh Raden Mohammad Achmad.<sup>7</sup> Mariam merupakan nama ibu dari Nabi Isa a.s, sedangkan Ullfah berasal dari bahasa Arab yang artinya keakraban. Nama Mariam Ullfah dinilai kurang manis, sehingga huruf *m* pada Mariam dihilangkan menjadi Maria. Nama Maria bagi sebagian orang kerap dianggap sebagai nama Katolik, hal ini dikarenakan Maria merupakan ejaan barat bagi Mariam. Itje biasa Maria Ullfah dipanggil, kerap dianggap sebagai orang non muslim padahal ia adalah orang muslim. Hal tersebut sering membuat Maria Ullfah harus menjelaskan tentang asal usul namanya.

---

<sup>5</sup> Foto Keluarga Maria Ullfah dapat dilihat dalam lampiran 2, hlm. 210.

<sup>6</sup> Lihat Bonnie Triyana, dkk, "Panggil Dia Itje", *Historia*, Nomor 1, 2012, hlm. 21.

<sup>7</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 9.



Keluarga Mohammad Achmad termasuk keluarga dari golongan priayi atau golongan menak istilahnya.<sup>8</sup> Ayah Maria Ullfah termasuk pemuda terpilih, ia berkesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah menengah Belanda *Hogere Burger School* (HBS). Raden Mohammad Achmad<sup>9</sup> selanjutnya mendapatkan pendidikan kepamong prajaan, dalam arsip Dewi Fortuna Maria Ullfah menjelaskan bahwa ayahnya sebenarnya tidak ingin menjadi Pamong Praja.<sup>10</sup> Ayah Maria Ullfah ingin menjadi seorang *officer*, namun kakek Maria Ullfah ingin anaknya menjadi tentara.

Ibu Maria Ullfah yang bernama R.A. Hadidjah Djajadiningrat berasal dari keluarga Djajadiningrat. Mien Sudarpo<sup>11</sup> dalam Majalah *Historia* menjelaskan bahwa, Djajadiningrat adalah salah satu nama terkenal di jalan Kebon Sirih. Di jalan Kebon Sirih terdapat beberapa nama terkenal seperti Kusumo Utoyo, Wiranatakusumah, dan paman Maria Ullfah yang bernama Achmad Djajadiningrat. Kusumo Utoyo adalah salah seorang wakil Ketua Dewan Rakyat (*volksraad*), sedangkan Wiranatakusumah adalah Bupati Bandung.

---

<sup>8</sup> Golongan priayi atau golongan menak merupakan kelompok yang termasuk dalam lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri, lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, cetakan 1. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 895.

<sup>9</sup> Penulisan nama R.A.A. Mohammad Achmad selanjutnya akan menjadi Raden Mohammad Achmad.

<sup>10</sup> ANRI, Sejarah Lisan Tahun 1973-1994 No. 154, *Maria Ulfah- Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*, 1983, kaset 1.

<sup>11</sup> Mien Sudarpo atau Mienarsih Soedarpo adalah istri dari Soedarpo Sastrosatomo. Ia adalah adik ipar suami kedua Maria Ullfah, Subadio Sastrosatomo. Mien merupakan adik kelas Maria Ullfah di Koning Willem III. Lihat Bonnie Triyana, dkk, *loc.cit.*,

R.A. Hadidjah Djajadiningrat adalah anak kelima dari Sembilan bersaudara pasangan Raden Bagoes Djajawinata dan Ratu Saleha. Raden Bagoes Djajawinata adalah seorang Bupati Serang, dulu ia pernah menjabat sebagai Wedana Kramatwatu. Anaknya yang bernama Achmad Djajadiningrat kelak meneruskan jabatannya sebagai Bupati Serang. Achmad Djajadiningrat juga pernah menjabat sebagai anggota *Raad Van Indie* (Dewan Pertimbangan Agung pada masa Belanda). Kakak Hadidjah yang bernama Prof. Hoesein Djajadiningrat adalah seorang ahli Islam pertama di Indonesia, dalam Majalah *Historia* disebutkan pula Prof. Hoesein Djajadiningrat merupakan doktor sastra pertama di Indonesia. Lulus dari Universitas Leiden pada tahun 1913 dengan disertasi *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten* dibawah bimbingan Prof. Dr. Snouck Hurgronje seorang ahli Islam terkemuka.<sup>12</sup> Selain itu, Maria Ullfah juga memiliki dua paman lagi yang bernama Hassan Djajadiningrat dan Loekman Djajadiningrat. Hassan Djajadiningrat adalah salah satu tokoh Sarekat Islam di Jawa Barat pada awal pergerakan nasional, sedangkan Loekman Djajadiningrat pada masa Perang Dunia II menjadi penasehat pemerintah pelarian Belanda yang berkedudukan di London.

Melihat dari latar belakang keluarga Maria Ullfah, dapat disimpulkan bahwa keluarga Maria Ullfah merupakan salah satu keluarga terpandang dengan pendidikan yang maju di zamannya. Keluarga menjadi salah satu faktor terpenting dalam kehidupan Maria Ullfah. Keluarga (orang tua, saudara kandung, dan

---

<sup>12</sup> Anonim, 2010, "Hussein Djajadiningrat", diakses dari: <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3662/Hussein-Djajadiningrat> pada Jum'at, 25 April 2014 pukul 21.19 WIB.

kerabat dekat) merupakan lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak.<sup>13</sup> Lewat keluarga, seorang anak akan mendapatkan dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik. Sejak kecil anak akan diajarkan bagaimana hidup mandiri dan selalu disiplin. Dasar-dasar pola pergaulan hidup yang diajarkan oleh keluarga biasanya diterapkan melalui kasih sayang. Atas dasar kasih sayang, anak dididik untuk mengenal nilai-nilai dalam kehidupan, contohnya nilai keakhlakan, nilai ketertiban, nilai kelestarian, dan lain sebagainya.

Raden Mohammad Achmad adalah sosok yang berpengaruh besar dalam kehidupan Maria Ullfah. Ia merupakan sosok ayah yang berpikiran maju dizamannya, Raden Mohammad Achmad memberi kebebasan Maria Ullfah untuk memilih jalan hidupnya. Guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Saparinah Sadli menjelaskan dari pandangan seorang psikolog bahwa peran ayah sangat penting dalam kehidupan Maria Ullfah.<sup>14</sup> “Kalau saja ayahnya tidak mengizinkan sekolah, mana mungkin dia bisa begitu”, ucap Saparinah Sadli dalam wawancaranya dengan majalah *Historia*. Dukungan Raden Mohammad Achmad tidak terbatas dalam hal pendidikan, sejak kecil Maria Ullfah telah dilatih untuk berdikari (berdiri di kaki sendiri) dan pandai bergaul dengan segala golongan. Raden Mohammad Achmad menitipkan Maria Ullfah kepada keluarga Belanda dengan membayar uang tumpangan. Tujuan dari hal itu adalah untuk melatih kemandirian Maria Ullfah.

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 386.

<sup>14</sup> Bonnie Triyana, dkk, *loc.cit.*,

Sejak R.A. Hadidjah Djajadiningrat meninggal dunia pada 2 Februari 1927, Maria Ullfah berperan sebagai kakak sekaligus ibu bagi kedua adiknya. Maria Ullfah harus menggantikan peran ibunya sebagai nyonya rumah, seperti untuk menerima tamu dan bercakap dengan kaum ibu-ibu. Sebagai seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda Raden Mohammad Achmad sering mendapat tamu, baik itu tamu dari Hindia Belanda maupun tamu dari pemerintah lokal. Iwanah dalam biografi Maria Ullfah, menyampaikan bahwa ia sering menghilang jika ayahnya sedang menerima tamu atau dalam suatu acara resmi. Berbeda dengan Maria Ullfah, Iwanah bercerita jika kakaknya dengan rasa tanggung jawab menjalani peran tersebut.

Sifat bertanggung jawab dan berdikari yang dimiliki Maria Ullfah memunculkan pendapat orang, bahwa sifatnya yang demikian disebabkan oleh keinginan ayahnya untuk memiliki anak lelaki. Iwanah dalam biografi Maria Ullfah yang ditulis Gadis Rasid menyampaikan, bahwa ayah ingin memiliki anak yang pandai berbicara seperti Mirabeu seorang tokoh politik dari masa Revolusi Prancis. Keinginan Raden Mohammad Achmad akhirnya terpenuhi, karena kelak Maria Ullfah akan menjadi sosok perempuan yang pandai berbicara bijak.

Sifat lain yang dimiliki Maria Ullfah adalah sifat teliti dalam hal keuangan. Bambang Isti Nugroho<sup>15</sup> dalam wawancara tanggal 7 April 2014 mengenang sosok Maria Ullfah sebagai seorang yang tidak banyak bicara dan konsepsional.

---

<sup>15</sup> Bambang Isti Nugroho (54 tahun) adalah seorang aktivis era 1980-an hingga sekarang. Ia merupakan salah satu kader politik Subadio Sastrosatomo (Partai Sosialis Indonesia), sekarang ia menjabat sebagai direktur Pusat Dokumentasi Guntur 49.

Selain itu, dalam hal keuangan Maria Ulfah adalah orang yang sangat teliti dan berhati-hati. Menurutnya Maria Ulfah adalah sosok Bung Hatta, namun dalam wujud seorang perempuan. Sifat-sifat Maria Ulfah tersebut kelak sangat berguna dalam karir dan kehidupan Maria Ulfah.

Suatu peristiwa dimasa kecil Maria Ulfah membuatnya bertekad untuk berjuang mengubah nasib kaum perempuan, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan. Peristiwa ini membuat Maria Ulfah kecil sadar akan kedudukan perempuan Indonesia yang masih lemah. Peristiwa tersebut menimpa bibi Maria Ulfah (adik Raden Mohammad Achmad) yang bernama R.A Soewenda, ia diceraikan oleh suaminya Bupati Pandeglang yang bernama R.T Hasan Kartadiningrat. Akibat perceraian tersebut R.A Soewenda harus kembali ke rumah orang tuanya.

Pada saat itu seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dianggap sebagai lambang kegagalan.<sup>16</sup> Perceraian dianggap sebagai suatu “aib” bagi keluarga, karena isteri dinilai tidak bisa memikat perhatian suaminya. Masyarakat masih memandang suatu perceraian bukan dari segi siapa yang bersalah, tetapi menganggap istri-lah yang bersalah. Pandangan tersebut mengakibatkan kaum perempuan Indonesia kerap mendapatkan diskriminasi dari masyarakat dan keluarga.

Alasan-alasan perceraian di semua daerah tidak sama, pada umumnya perceraian dikarenakan tidak memiliki keturunan (terutama anak laki-laki), cacat

---

<sup>16</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 8.

badan, istri berzinah, istri dianiyaya, tidak mendapatkan nafkah dan sebagainya.<sup>17</sup> R.A Soewenda diceraikan oleh suaminya karena tidak memiliki keturunan. Setelah bercerai R.T Hasan Kartadiningrat menikah kembali, tetapi dari kedua pernikahan yang selanjutnya ia tidak memiliki keturunan. Maria Ullfah dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta tanggal 28 Februari 1981 menyampaikan: “Nasib bibi saya itu tidak saya lupakan. Lebih-lebih ternyata setelah bekas suaminya kawin dua kali lagi, ia tidak juga mendapat keturunan. Mengapa kesalahan dilimpahkan kepada bibi saya? Mengapa bibi saya harus menderita?”.

Setelah bercerai R.A Soewenda kembali hidup bersama orang tuanya dan menjadi tanggung jawab keluarga. Secara material R.A Soewenda sangat tercukupi, namun secara rohaniah hidupnya sangat merana.<sup>18</sup> Pandangan masyarakat yang menganggap seorang perempuan yang tidak bersuami seumur hidup akan menjadi tanggungan keluarga mengakibatkan banyak terjadi diskriminasi. Sejak bercerai dan tinggal bersama orang tuanya R.A Soewenda hidup dalam diskriminasi, ia dikucilkan dari pergaulan umum, bahkan untuk makan dan minum tidak boleh ikut bersama keluarga lainnya. R.A Soewenda hanya diperbolehkan tinggal di dalam kamar.

Pada saat libur sekolah, Maria Ullfah dan kedua adiknya berkunjung ke rumah kakek-nenek dari pihak ayah di Menes, Pandeglang. Sebagai oleh-oleh,

---

<sup>17</sup> Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 51.

<sup>18</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 7-8.

mereka membawa buah jeruk Garut dan apel. Ketika Maria Ullfah dan kedua adiknya bermain di kamar R.A Soewenda, dengan wajah memelas R.A Soewenda meminta oleh-oleh yang dibawa Maria Ullfah. “Tolong dong, saya ingin juga menikmati jeruk dan apel yang kalian bawa. Minta pada kakek dan nenek barang satu dua buah jeruk dan apel lezat yang kalian bawa,” ucap R.A Soewenda kepada Maria Ullfah.<sup>19</sup> Kejadian tersebut membuat Maria Ullfah sadar akan nasib bibinya yang diperlakukan tidak adil dalam keluarga.

Perlakuan tidak adil yang diterima R.A Soewenda berpengaruh besar dalam perkembangan jiwa Maria Ullfah. Kurangnya pendidikan bagi kaum perempuan dari kalangan atas, mengakibatkan kaum perempuan tidak dapat mencari nafkah sendiri. Kondisi seperti ini yang menyebabkan mereka sangat tergantung pada suami, dan keluarga ketika mereka diceraikan. Pendidikan bagi kaum perempuan adalah salah satu hal yang ingin diperbaiki oleh Maria Ullfah ketika ia kembali dari Belanda.<sup>20</sup> Selain itu, kondisi bibinya yang mengalami diskriminasi dari keluarga dan masyarakat membuat Maria Ullfah bertekad untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan.

## **B. Latar Belakang Pendidikan Maria Ullfah**

Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel dalam majalah *De Gids* yang berjudul “Hutang Kehormatan”. Van Deventer menyatakan bahwa keuntungan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>20</sup> Maria Ullfah Subadio, “Bung Sjahrir”, dalam *Mengenang Sjahrir*. (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm. 92.

yang diperoleh pemerintah kolonial dari Indonesia selama ini hendaknya dirasakan pula oleh masyarakat Indonesia sendiri. Pemikiran Van Deventer tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah *Politik Etis* atau disebut pula dengan *Politik Asosiasi*. Tujuannya adalah memberi kebahagiaan dan kemakmuran kepada bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan pendidikan, pengairan (irigasi), dan perpindahan (emigrasi).<sup>21</sup> Inti dari *Politik Etis* adalah pendidikan, dengan pendidikan secara berlahan masyarakat Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik.

Terlahir dari keluarga menak terpendang membuat Maria Ullfah tidak mengalami kesulitan dalam hal pendidikan. Ayahnya adalah seorang Pamong Praja yang bekerja pada pemerintah Hindia Belanda. Raden Mohammad Achmad adalah seorang dari beberapa orang Indonesia yang pada awal abad ke-20 selesai menempuh pendidikan HBS (*Hongere Burger School*).<sup>22</sup> HBS merupakan sekolah menengah yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda tahun 1860. HBS semula bernama *Gymnasium Koning Williem III* dan selanjutnya pada 1867 diubah menjadi HBS. Menempuh pendidikan di HBS merupakan salah satu prestasi yang sangat dihormati masyarakat Indonesia saat itu. Anak pribumi yang menempuh pendidikan di HBS dapat digolongkan sebagai kumpulan kecil yang

---

<sup>21</sup> I Djumhur & Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*. (Bandung: Penerbit CV ILMU Bandung, 1992), hlm. 134-135.

<sup>22</sup> Poeze, Harry. A, "In Het Land van de Overheersers I-Indonesiers in Nederland 1600-1950" terj. di *Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600-1950)*. (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 222.



istimewa (*the privileged few*).<sup>23</sup> Pendidikan yang bermutu tinggi serta staf pengajar yang berkualitas membuat HBS menjadi sekolah yang dihormati.

Ibu Maria Ullfah yang bernama R.A Hadidjah Djajadiningrat termasuk perempuan beruntung yang dapat mengecap pendidikan formal. Pendidikan formal bagi anak perempuan merupakan suatu hal yang masih jarang terjadi dalam keluarga-keluarga Indonesia saat itu. Kedudukan kaum perempuan dalam kehidupan sosial masih diatur oleh tradisi.<sup>24</sup> Pendidikan formal merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan adat. Adat istiadat pada masa itu tidak memperkenankan seorang anak perempuan untuk pergi ke sekolah, karena hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran adat oleh masyarakat. Meskipun demikian beberapa dari kaum perempuan dapat mengenyam pendidikan di sekolah, salah satunya adalah ibu dari Maria Ullfah.

Keluarga besar R.A Hadidjah Djajadiningrat merupakan salah satu keluarga terpandang Banten. Kakek Maria Ullfah yang bernama Raden Bagoes Djajawinata adalah seorang Bupati Serang. Salah satu saudara tertua R.A Hadidjah Djajadiningrat yang bernama Achmad Djajadiningrat adalah Bupati Serang. Atas permintaannya didirikan sekolah hukum yang pertama di Hindia Belanda.<sup>25</sup> Paman Maria Ullfah yang bernama Prof. Hoesein Djajadiningrat

---

<sup>23</sup> Rosihan Anwar, *Subadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 9.

<sup>24</sup> Stuers, Cora Vreede-de, *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 45.

<sup>25</sup> Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1909 dengan nama *Rechtsschool*. Sekolah tersebut didirikan untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten.

adalah seorang ahli Islam pertama di Indonesia. Ia pun merupakan doktor sastra pertama asal Indonesia lulusan Universitas Leiden. Pencapaian Prof. Hoesein Djajadiningrat akhirnya meyakinkan pemerintah Hindia Belanda untuk memajukan pendidikan bagi kaum pribumi.

Melihat latar belakang pendidikan keluarga, dapat dikatakan bahwa keluarga Maria Ullfah sangat menjunjung tinggi pendidikan. Semua anak Raden Mohammad Achmad diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan setinggi-tingginya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga anak Raden Mohammad Achmad mendapatkan pendidikan yang sama. Sebagai seorang yang berpikiran maju, Raden Mohammad Achmad tidak berlaku seperti orang tua kebanyakan yang memprioritaskan anak laki-laki dari pada anak perempuan dalam hal pendidikan.

Maria Ullfah memulai pendidikan sekolah dasar (SD) di Rangkasbitung, mengikuti ayahnya yang bekerja di kota tersebut.<sup>26</sup> Raden Mohammad Achmad selanjutnya dipindahkan ke Batavia untuk menjadi Patih di *Meester* (Jatinegara), sedangkan Maria Ullfah bersekolah di *Eerste School*, Cikini. Sebagai seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda Raden Mohammad Achmad sering dipindah tugaskan ke berbagai kota. Hal tersebut berdampak pada pendidikan Maria Ullfah yang sering berpindah pula.

Pada masa kolonial satu-satunya jalur pendidikan yang maju adalah sekolah-sekolah Belanda. Sekolah pertama bagi anak-anak Belanda dibuka pada tahun 1817 yang segera diikuti oleh pembukaan sekolah di kota-kota lain di

---

<sup>26</sup> Bonnie Triyana, dkk, *loc.cit.*,

Jawa.<sup>27</sup> Sekolah Belanda dikhususkan bagi anak Belanda, namun seiring waktu sekolah Belanda menerima sejumlah kecil anak-anak pribumi dari kalangan priayi yang kaya. Selain anak priayi, sekolah Belanda menerima anak-anak orang terkemuka Indonesia.<sup>28</sup> Pemberlakuan politik etis memberi kemajuan dalam bidang pendidikan, seperti didirikannya sejumlah sekolah rendah bercorak Barat bagi orang Indonesia dan Cina.

Di Cikini Maria Ullfah hanya sementara, selanjutnya ia pindah sekolah ke *Willemslaan*. Saat ini letak sekolah *Willemslaan* menjadi bagian dari kompleks Masjid Istiqlal.<sup>29</sup> Ketika Raden Mohammad Achmad ditugaskan menjadi Bupati Kuningan, Maria Ullfah dan Iwanah tidak ikut pindah. Demi pendidikan Raden Mohammad Achmad menitipkan kedua anaknya tersebut pada keluarga Belanda. Berbeda dari kebanyakan keluarga Indonesia, Raden Mohammad Achmad lebih memilih menitipkan kedua anaknya kepada keluarga Belanda dari pada keluarganya sendiri. Menurut Raden Mohammad Achamad untuk mendidik anak agar lebih cepat berdikari dan pandai bergaul dengan segala golongan, tidak baik jika anak-anak ditiptkan ke saudara. Ketika anak tinggal di tempat orang asing (bukan keluarga), maka anak akan terbiasa untuk hidup mandiri dan membawa diri.

---

<sup>27</sup> S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 9.

<sup>28</sup> Yang dimaksudkan orang terkemuka adalah mereka (orang Indonesia) yang menduduki jabatan tinggi pada pemerintahan dari mulai jabatan camat, pamong praja, bupati dan lainnya.

<sup>29</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 13.

Pendidikan yang diberikan oleh Raden Mohammad Achmad kepada ketiga anaknya dapat dikatakan keras dan penuh disiplin. Meskipun termasuk dalam golongan keluarga berada, tetapi Raden Mohammad Achmad tidak membiasakan anak-anaknya untuk hidup dalam kemewahan. Pergi ke sekolah Maria Ullfah dan Iwanah tidak pernah diantar menggunakan mobil, keduanya dibiasakan untuk jalan kaki, naik dokar, naik *trem*<sup>30</sup>, dan naik sepeda ketika sudah besar. Pendidikan yang serba teratur dan disiplin adalah ciri khas pendidikan bagi semua anak Indonesia golongan atas saat itu. Bukan hanya pendidikan teoritis yang didapat dari sekolah, namun pendidikan dari keluarga dalam artian sikap disiplin sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya.

Di Batavia Maria Ullfah menepuh pendidikan sekolah menengah Belanda di K.W III (Koning Willem III).<sup>31</sup> K.W III merupakan sekolah menengah yang pertama kali didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1860. Pada awalnya sekolah K.W III sering dijuluki sebagai “sekolah raja”, hal ini dikarenakan siswa yang bersekolah di K.W III adalah anak pejabat Belanda. Empat belas tahun sejak 1860, akhirnya pada tahun 1874 K.W III menerima siswa dari anak pribumi.<sup>32</sup> Hanya anak-anak dari golongan priayi atau pejabat pribumi yang dapat menempuh pendidikan di K.W III. Menurut Mien Sudarpo tidak hanya cukup anak seorang priayi yang dapat bersekolah di K.W III, tetapi harus pintar.

---

<sup>30</sup> *Trem* adalah kereta yang dijalankan oleh tenaga listrik atau lokomotif kecil, biasanya digunakan sebagai angkutan penumpang dalam kota, lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, cetakan 1. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 1210.

<sup>31</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>32</sup> S. Nasution, *op.cit.*, hlm. 136.

Pada saat Maria Ullfah duduk di kelas empat sekolah menengah, para pemuda Indonesia mencetuskan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.<sup>33</sup> Sumpah pemuda adalah puncak integrasi ideologi nasional dan merupakan wujud semangat nasionalisme pemuda Indonesia. “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia” adalah semangat nasionalisme yang berkobar dikalangan pemuda Indonesia. Hiruk pikuk sumpah pemuda yang tidak langsung disaksikan Maria Ullfah menggugah hatinya. Sebagai anak seorang pejabat tinggi pemerintah Belanda, Maria Ullfah tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan yang berkembang. Seorang anak pejabat pemerintah Belanda harus bersikap hati-hati dalam bertindak, setiap perilaku akan sangat berpengaruh terhadap kedudukan ayahnya dalam pemerintahan.

Pada tahun 1929 Raden Mohammad Achmad memperoleh kesempatan belajar di Den Haag, Belanda. Ia dikirim oleh pemerintah selama setahun untuk mempelajari masalah perkoperasian dan membuat laporan tentangnya.<sup>34</sup> Raden Mohammad Achmad diperbolehkan membawa keluarga ketika pergi ke Belanda. Bersama ketiga anaknya, Raden Mohammad Achmad berangkat ke Belanda naik kapal laut Tambora.<sup>35</sup> Bagi Maria Ullfah perjalanannya yang pertama ke Belanda sangat menyenangkan. Maria Ullfah sering menghabiskan waktunya untuk berjalan-jalan di geladak kapal dan bercakap-cakap dengan penumpang kapal

---

<sup>33</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 16.

<sup>34</sup> Poeze, Harry. A, *loc.cit.*,

<sup>35</sup> Kapal Tambora merupakan kapal laut buatan perusahaan *Rotterdamse Lloyd*, Belanda. Kapal Tabora adalah salah satu kapal laut yang melayani pelayaran antara negeri Belanda dan Hindia Belanda.

lainnya. Untuk sampai ke Rotterdam, dari Batavia kapal harus berlayar selama empat minggu. Namun untuk menghemat waktu, para penumpang yang akan ke Belanda dapat turun di kota Marseilles dan naik kereta api yang khusus melintasi Eropa Barat menuju ke Rotterdam.

Setibanya di negeri Belanda, Raden Mohammad Achmad menetap di Den Haag bersama kedua anaknya, Iwanah dan Hatnan. Maria Ullfah yang pada saat itu telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah mendapatkan kesempatan untuk belajar diperguruan tinggi. Oleh Raden Mohammad Achmad Maria Ullfah di daftarkan pada Universitas Leiden dan mengambil jurusan ilmu hukum. “Sebenarnya orang tua saya menginginkan saya menjadi dokter. Tapi saya sendiri takut melihat darah”, kata Maria Ullfah (66 tahun) saat diwawancarai Majalah *Tempo*.<sup>36</sup> Raden Mohammad Achmad berharap Maria Ullfah menjadi dokter atau apoteker, karena dengan profesi tersebut Maria Ullfah dapat hidup mandiri dan tidak bergantung kepada pekerjaannya di instansi pemerintah atau swasta. Jika menjadi apoteker Maria Ullfah bersedia, tetapi studi untuk ahli farmasi membutuhkan waktu yang lama yaitu tujuh tahun dan pada tahun 1920-an studi ilmu farmasi belum tersedia di Hindia Belanda. Studi ilmu farmasi pada masa itu hanya tersedia di Belanda. Apabila Maria Ullfah tetap ingin menjadi apoteker, maka ia harus bersekolah selama tujuh tahun dan ayahnya harus membiayai studi serta hidupnya di Belanda.

---

<sup>36</sup> Mansur Amin, “Wanita itu Orang Banten”, *Tempo*, 26 Februari 1977.

Maria Ullfah memilih studi ilmu hukum karena pertimbangan pragmatis dan idealis.<sup>37</sup> Menjadi sarjana hukum adalah cita-cita Maria Ullfah sejak kecil. Ia berambisi untuk menguasai seluk-beluk hukum agar bisa membela kedudukan perempuan di Indonesia. Sebagai ayah, Raden Mohammad Achmad mendukung cita-cita anaknya tersebut. Ayah Maria Ullfah adalah sosok ayah yang liberal dan tidak ingin memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Ketika tinggal di Belanda pun Maria Ullfah memutuskan untuk tinggal terpisah dari keluarganya. Keputusan tersebut didasarkan pada waktu studi Raden Mohammad Achmad yang hanya sepuluh bulan. Setelah masa studinya berakhir, Raden Mohammad Achmad dan kedua anaknya (Iwanah dan Hatnan) akan kembali ke Hindia Belanda.

Menempuh pendidikan di Belanda pada masa kolonial adalah salah satu kebanggaan bagi orang pribumi. Dalam pandangan masyarakat Indonesia saat itu, orang yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi di negeri Belanda lebih bergengsi dari pada mereka yang lulus dari sekolah tinggi Hindia Belanda.<sup>38</sup> Sebenarnya sejak tahun 1924 di Hindia Belanda telah didirikan sekolah hukum yang bernama *Rechtshogeschool*. Sekolah hukum tersebut terletak di *Koningsplein*, Batavia. Perempuan pertama yang berkuliah di Fakultas Hukum di

---

<sup>37</sup> Pertimbangan pragmatis Maria Ullfah adalah studi ilmu hukum itu singkat, sehingga tidak menghabiskan biaya banyak dan masih akan tersisa cukup uang untuk kedua adiknya. Pertimbangan idealisnya adalah nasib bibinya. Sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya dan tidak memiliki keturunan, R.A Soewenda harus kembali kepada orang tuanya. Ia harus menjalani hidup dengan perlakuan yang tidak adil, bahkan hidup dengan diskriminasi keluarga dan masyarakat. Dengan menjadi seorang ahli hukum, Maria Ullfah berharap dapat melakukan sesuatu hal bagi kedudukan perempuan di Indonesia, lihat Poeze, Harry. A, *loc.cit.*,

<sup>38</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 21.

Batavia adalah Sitti Tarunomihardjo, tetapi ia tidak menamatkan pendidikannya dan lebih memilih menikah dengan seorang Pamong Praja, wedana Adjibarang yang kemudian menjadi bupati Banyumas.

Perempuan Indonesia lainnya yang mengambil ilmu hukum di Batavia, adalah Laili Roesad dan Nani Soerasno.<sup>39</sup> Laili Roesad pun lulus sebagai sarjana hukum sekolah tinggi di Batavia. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, ia masuk dinas dan menjadi Duta Besar di negara Belgia dan Austria. Sedangkan Nani Soerasno setelah lulus menikah dengan seorang sarjana hukum yang bernama Prajitno Soewondo. Namanya kemudian berubah menjadi Nani Soewondo, sesuai dengan nama belakang suaminya Soewondo. Nani Soewondo adalah seorang pembela kedudukan perempuan di Indonesia dan banyak menaruh perhatian pada studi tentang kedudukan hukum perempuan Indonesia.

Setelah sepuluh bulan masa tugas Raden Mohammad Achmad selesai, ia dan kedua anaknya kembali ke Hindia Belanda. Meskipun sekarang Maria Ullfah jauh dari keluarga, ia mengaku jarang dihinggapi rasa “kangen” kepada keluarganya. Hidup tanpa keluarga di Belanda tidak membuat Maria Ullfah kesepian, hal ini dikarenakan kesibukannya dalam belajar. Selain itu, banyaknya orang Indonesia yang menetap di Belanda membuat Maria Ullfah tidak merasa sendirian. Sejak tahun 1800-an sudah banyak orang Indonesia yang pergi ke Belanda, salah satunya adalah Raden Saleh. Raden Saleh adalah orang Indonesia pertama yang mendapat pendidikan modern di negara Belanda, ia juga merupakan pelopor para mahasiswa Indonesia yang sejak akhir abad ke-19 datang ke

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,



Belanda.<sup>40</sup> Pendidikan yang modern membuat sebagian orang Indonesia memilih untuk menempuh pendidikan di Belanda.

Beberapa orang yang menempuh studi di Belanda membawa serta keluarganya. Di antara orang pribumi yang belajar dan membawa serta keluarganya adalah dr. Seno Sastroamidjojo, dr. Zainal, dr. Djoehana Wiradikarta, dan lainnya. Para dokter ini adalah lulusan Sekolah Kedokteran di Hindia Belanda yang bernama Stovia.<sup>41</sup> Ijazah yang diterima para lulusan Stovia tidak sama dengan dokter-dokter lulusan Universitas di Belanda. Sehingga para dokter lulusan Stovia harus melanjutkan pendidikannya di Belanda, baik itu menggunakan uang tabungan sendiri atau dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah menempuh pendidikan dokter di Belanda, mereka akan memperoleh gelar *Arts* yang membuat kedudukan sosial dan gaji dokter pribumi setara dengan dokter Belanda. Adanya keluarga-keluarga dari Indonesia ini membuat mahasiswa yang masih lajang merasakan hangatnya keluarga, karena pada hari raya lebaran atau hari besar lainnya mereka akan diundang untuk berkumpul bersama.

Mahasiswa perempuan bukan lagi hal yang langka pada saat itu, setelah Ida Lamongga Haroen Al Rasjid terdapat enam belas perempuan Indonesia yang belajar di Belanda.<sup>42</sup> Ida Lamongga Haroen Al Rasjid adalah mahasiswa

---

<sup>40</sup> Poeze, Harry. A, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>41</sup> Stovia atau *School ter opleiding van Indische Artsen* adalah sekolah tinggi yang mendidik calon-calon Indische arts atau dokter bumiputera. Sebelum menjadi Stovia pada 1902, sekolah tinggi ini bernama Sekolah Dokter Jawa, lihat I Djumhur & Danasuparta, *op.cit.*, hlm. 145.

<sup>42</sup> Poeze, A. Harry, "Orang-orang Indonesia di Universitas Leiden", dalam *Makalah-makalah yang disampaikan dalam Rangka Kunjungan Menteri Agama*

Indonesia yang belajar kedokteran di negara Belanda. Ia tidak banyak bergaul dengan mahasiswa Indonesia lainnya, dalam biografinya Maria Ulfah bercerita tentang sikap Ida Lamongga Haroen Al Rasjid yang sangat dingin ketika ia dan Siti Soendari datang ke upacara promosi Ida sebagai perempuan pertama Indonesia yang menjadi doktor. Selanjutnya Ida Lamongga Haroen Al Rasjid menikah dengan seorang dokter Belanda dan menjadi warga negara Belanda.

Selain Maria Ulfah dan Nn. Haroen Al Rasjid masih ada perempuan Indonesia yang menjadi mahasiswa di Belanda. Mereka adalah Soegiarti dan Siti Soendari. Soegiarti adalah perempuan Indonesia yang belajar di Belanda untuk memperoleh ijazah *hoofdacte*.<sup>43</sup> Setelah lulus Soegiarti menikah dengan Takdir Alisyahbana seorang sastrawan dan ahli tata bahasa Indonesia, ia adalah penulis novel *Layar Terkembang*. Sedangkan Siti Soendari adalah adik dari pahlawan Nasional Dr. Soetomo, dengan dorongan kakaknya ia belajar di Belanda. Siti Soedari berangkat ke Belanda tahun 1927 (dua tahun lebih awal daripada Maria Ulfah) untuk belajar ilmu hukum di Universitas Leiden.

Hubungan Maria Ulfah dan Siti Soendari terbilang sangat akrab, keduanya menyewa kamar serumah di Witte Singel 25.<sup>44</sup> Meskipun terbilang

---

*R.I H. Munawir Sjadzali M.A ke Negeri Belanda (3 Oktober-7 November 1988)*. (Jakarta: INIS, 1990), hlm. 7.

<sup>43</sup> *Hoofdacte* adalah gelar dalam bidang pendidikan yang tingkatannya lebih tinggi daripada guru biasa atau sering disebut guru kepala sekolah. Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>44</sup> Witte Singel merupakan bagian dari kota tua Leiden yang menjadi pusat pondokan mahasiswa Indonesia di zaman yang berbeda-beda. Witte Singel sendiri adalah kanal yang terpanjang dan terindah di Belanda, Rumah di jalan Witte Singel nomor 25 Leiden saat ini telah digantikan dengan bangunan kampus

cukup akhrib Maria Ullfah dan Siti Soendari tidak menyewa kamar yang sama, tetapi dalam beberapa hal mereka melakukannya bersama. Setiap bulan Maria Ullfah diberi uang saku ayahnya sebesar *f*150. Pada masa itu uang sewa kamar tanpa makan adalah *f*40, sedangkan uang sewa dengan makan adalah *f*75. Maria Ullfah yang memiliki sifat teliti dalam hal keuangan memilih menyewa kamar tanpa makanan. Sifat Maria Ullfah tersebut sangat berbeda dengan Siti Soendari yang tidak terlalu pandai memegang uang, sehingga untuk urusan berlanja mereka patungan bersama dan Maria Ullfah yang mendapat tugas berbelanja.

Hidup di Belanda mengharuskan Maria Ullfah untuk hidup berhemat. Kebiasaan untuk mandiri dan hemat sejak kecil membuat Maria Ullfah bertekad untuk tidak merepotkan ayahnya. Untuk urusan pakaian Maria Ullfah selalu membelinya di toko *Vroom & Dreesman*, sebuah toserba (toko serba ada) yang menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah. Berbeda dengan Iwanah yang datang dua tahun kemudian, Iwanah selalu membeli pakaian di toko-toko “top” Belanda. Kebiasaan Iwanah tersebut membuatnya sering menulis surat kepada Raden Mohammad Achmad untuk dikirim uang tambahan. Selain itu, untuk urusan mandi Maria Ullfah selalu melakukannya satu atau dua kali dalam seminggu di pemandian umum *badhuis*. Pada saat itu rumah-rumah di Belanda masih jarang yang memiliki kamar mandi sendiri.

Selama studi di Leiden Maria Ullfah dan Siti Soendari selalu sarapan bersama di kamar Maria Ullfah. Makan siang dan makan malam selalu dilakukan

---

Fakultas Humaniora Universitas Leiden, lihat Lihat Bonnie Triyana, dkk, “Anak Kos Witte Singel 25”, *op.cit.*, hlm. 29.

di kantin mahasiswa, kecuali hari minggu dan hari libur karena kantin tutup. Pada hari-hari tersebut keduanya terpaksa memasak sendiri. Hampir setiap waktu keduanya menghabiskan waktu bersama. Ketika di Leiden Maria Ullfah pernah menjadi anggota perhimpunan mahasiswa Leiden *Vereeniging van Vrouwelijke Studenten Leiden* (VVSL) dan bersama ketiga sahabatnya orang Belanda membentuk klub yang diberi nama *Happy Go Lucky*.<sup>45</sup> Tidak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang bergabung menjadi anggota Perhimpunan Indonesia, Maria Ullfah dan Siti Soendari memilih menjaga jarak karena posisi orang tua mereka.

Hidup di negeri Belanda dengan warna kulit yang berbeda dengan kebanyakan orang Belanda membuat Maria Ullfah mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut bukan berasal dari kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi, melainkan dari luar. Kebanyakan mahasiswa dari Hindia Belanda menjadi sasaran ejekan dari anak-anak Belanda. Setiap kali melintasi jalan Doelensteeg menuju ke Rapenburg Maria Ullfah sering mendapatkan gangguan dari anak-anak Belanda. Maria Ullfah sering diganggu anak-anak Belanda dengan panggilan “pinda, pinda, lekka, lekka”.<sup>46</sup> *Pinda* merupakan kata dalam bahasa Belanda yang berarti kacang, sedangkan *lekka lekka* adalah ucapan salah dari kata *lekker* yang berarti lezat. Istilah tersebut berasal dari pelaut Tiongkok yang terdapat di Belanda. Para pelaut tersebut terpaksa menetap di Belanda dan untuk bertahan hidup mereka bekerja

---

<sup>45</sup> Poeze, Harry. A, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600-1950)*, *op.cit.*, hlm. 223.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

menjadi tukang cuci pakaian atau menjual kacang. Karena orang Tiongkok tidak bisa melafalkan huruf “r”, maka mereka menjual kacang dengan teriakan, “pinda, pinda, lekka, lekka”.

Maria Ullfah sering mendapat gangguan ketika pulang ke Witte Singel pada sore hari. Untuk menghindari gangguan tersebut Maria Ullfah sering menaikkan kerah mantelnya sebatas wajah dan memakai topi, agar warna kulitnya tidak terlihat. Namun cara tersebut kadang tidak membantunya, Iwanah bercerita tentang pengalaman kakaknya ketika pulang kuliah. Pada suatu malam, Maria Ullfah berpapasan dengan segerombolan anak lelaki tanggung, salah satu dari mereka mendekatinya dan mengangkat topi yang dipakai Maria Ullfah. Lelaki tersebut tiba-tiba mencium pipi Maria Ullfah, hal tersebut membuat Maria Ullfah kaget dan berteriak keras sehingga mereka lari ketakutan.

Ada kalanya Maria Ullfah dan Siti Soendari membalas tindakan anak-anak Belanda. Suatu hari ketika Maria Ullfah dan Siti Soendari pulang kuliah, mereka mengajak seorang mahasiswa pria asal Indonesia untuk menemani pulang. Ketika anak-anak Belanda mulai mengejek mereka, tiba-tiba mahasiswa pria asal Indonesia yang berkulit agak gelap itu mendekati anak-anak Belanda dengan menggerakkan tangannya seolah akan menerkam dan berkata, “Hoo, *lekker mensenvlees!*”<sup>47</sup> Kalimat tersebut membuat anak-anak Belanda ketakutan, karena arti dari kalimat tersebut adalah “Hoo, daging manusia enak”. Pada saat itu sebagian orang Belanda masih beranggapan bahwa orang berkulit gelap masih

---

<sup>47</sup> Santo Koesoebjono & Solita Koesoebjono-Sarwono, *Siti Soendari, Adik Bungsu dr. Soetomo*. (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008), hlm. 54.

menyukai daging manusia. Akibat peristiwa itu Maria Ullfah dan Siti Soendari tidak lagi mendapatkan gangguan dari anak-anak Belanda.

Siti Soendari empat tahun lebih tua dari Maria Ullfah, tetapi dalam biografi Siti Soendari dikatakan jarak antara keduanya adalah lima tahun.<sup>48</sup> Keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, Maria Ullfah tekun dalam studi, sedangkan Siti Soendari lebih santai dalam studinya. Studi Siti Soendari sempat terganggu oleh hubungannya dengan mahasiswa Indonesia yang bernama Prijono. Prijono adalah mahasiswa jurusan sastra di Leiden. Akibatnya Siti Soendari tertinggal dari Maria Ullfah yang lulus setahun lebih awal darinya.

Hidup di negara yang merdeka membuat Maria Ullfah sadar akan arti sebuah kebebasan. Di mana seseorang tidak perlu takut dengan penguasa, selama ia tidak melakukan kejahatan. Bacaan politik yang dilarang keras di Hindia Belanda dapat ditemukan bebas di Belanda. Pidato Ir. Soekarno yang disampaikan pada tahun 1930 sebagai pembelaannya ketika ia dituduh “menghasut dan mengikuti perkumpulan terlarang” yang diberi judul “Indonesia Menggugat”<sup>49</sup> dijual bebas di Belanda bersama tulisan Ir. Soekarno lainnya. Bahkan pidato Ir. Soekarno yang diterbitkan dalam buku berjudul “Indonesia Klaagt Aan” dijual

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>49</sup> “Indonesia Menggugat” adalah pidato pembelaan Ir. Soekarno dalam sidang pengadilan Landraad Bandung. Di dalam pembelaan itu Ir. Soekarno mengupas dengan tegas dan tajam sifat serta watak politik kolonial Belanda yang eksploitatif yang ditinjaunya dari sudut kapitalisme dan imperialism. Akhirnya pada 22 Desember 1930 hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara selama empat tahun kepada Soekarno, lihat Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 71.

bebas di toko buku *Dubbeldeman*. Halaman depan buku didesain dengan warna merah putih serta gambar Jenderal Van Heutsz yang menakhlukan Aceh dan gambar mayat rakyat Aceh. Gambar tersebut merupakan wujud kebebasan negara merdeka, padahal di Hindia Belanda sendiri bendera “merah putih” dilarang berkibar.

Ketika masih tinggal di Den Haag rumah Raden Mohammad Achmad sering dikunjungi tokoh Indonesia, seperti Haji Agoes Salim dan Mohammad Hatta.<sup>50</sup> Lewat ayahnya, Maria Ullfah mulai mengenal kedua tokoh Indonesia tersebut. Haji Agoes Salim adalah kawan Raden Mohammad Achmad ketika masih bersekolah di K.W III, Batavia. Ketika berkunjung ke rumah, Haji Agoes Salim sering membahas tentang perkoperasian dan perburuhan. Haji Agoes Salim hanya tinggal sementara di Belanda, sebelumnya ia baru selesai menghadiri sidang Organisasi Perburuhan Sedunia di Jenewa.<sup>51</sup> Dalam biografinya, Maria Ullfah bercerita tentang Haji Agoes Salim yang kehabisan uang untuk membelikan oleh-oleh “mace” (panggilan untuk istrinya). Ketika tiba waktunya untuk pulang, Haji Agoes Salim mengalami kesulitan uang, akhirnya Maria Ullfah menawarkan hasil sulamannya untuk dibawa pulang ke Hindia Belanda sebagai oleh-oleh untuk isteri Agoes Salim.

---

<sup>50</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 27.

<sup>51</sup> Organisasi Perburuhan Sedunia adalah suatu organisasi internasional yang menangani masalah perburuhan. ILO (*International Labour Organization*) diciptakan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. selanjutnya ILO bergabung dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) setelah Perang Dunia II, lihat Anonim, “Sejarah ILO”, <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>, diakses pada Minggu, 18 Mei 2014, pukul 02.10 WIB.

Mohammad Hatta adalah teman Haji Agoes Salim yang sering ikut ke rumah Raden Mohammad Achmad. Mohammad Hatta merupakan mahasiswa Indonesia dari *Handelshogesschool* yang terletak di kota Rotterdam.<sup>52</sup> *Handelshogesschool* setelah Perang Dunia II diubah menjadi Universitas Erasmus, yang konsen terhadap ilmu ekonomi. Berbeda dengan Haji Agoes Salim yang senang berbicara, Mohammad Hatta adalah sosok orang yang pendiam dan selalu serius. Dalam buku mengenang Bung Hatta yang terbit tahun 1980 Maria Ullfah mengisahkan pertemuannya dengan Bung Hatta sebagai berikut:

“Waktu mereka (Haji Agoes Salim dan Mohammad Hatta) datang, hari sudah mulai dingin, jadi *kachel* (tungku api untuk memanaskan rumah atau kamar) sudah dinyalakan. Saya baru membeli buah kastanya (semacam buah saninten dalam bahasa Sunda) yang akan dibakar di tungku api yang dinyalakan dengan batu bara. Adik laki-laki yang ditugaskan untuk membakar buah kastanya itu. Bukan anak-anak saja yang memakan kastanya bakar itu (*gepofte kastanyes* dalam bahasa Belanda) tetapi juga orang dewasa. Oom Salim, bung Hatta, dan ayah. Ternyata bung Hatta suka sekali pada kastanya itu, sehingga adik laki-laki menyeletuk dalam bahasa Belanda “*ik moet de kastanyes voor Oom Hatta uit het vuur halen*”. Semua ketawa karena ucapan adik itu mempunyai arti kiasan yang kira-kira saya harus menyelesaikan kesulitan Oom Hatta.<sup>53</sup>

Maria Ullfah menceritakan pengalamannya ketika bertemu Bung Hatta, dimana dalam ceritanya Bung Hatta sangat dekat dengan keluarga Raden Mohammad Achmad. Sosok Bung Hatta sangat melekat dengan Maria Ullfah, sifatnya yang tenang dan konseptual adalah penggambaran dari sifat Bung Hatta.

Kesadaran akan nasib bangsanya yang terjajah tumbuh dalam jiwa Maria Ullfah ketika di Belanda. Sutan Sjahrir merupakan salah satu tokoh yang berperan

---

<sup>52</sup> Gadis Rasid, *loc.cit.*,

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 28.



banyak dalam menumbuhkan dan membimbingnya ke arah kesadaran kebangsaan. Lewat Sutan Sjahrir Maria Ullfah memahami bagaimana menjadi anak gadis Indonesia yang dapat belajar di negara merdeka. Sutan Sjahrir adalah mahasiswa Indonesia yang belajar ilmu hukum di Amsterdam. Ia tinggal bersama kakak perempuan dan suaminya yang bernama dr. Djoehana Wiradirkarta. Dr. Djoehana seperti dokter Indonesia lainnya sedang memperdalam pelajarannya di bidang kedokteran (*post-graduate study*).<sup>54</sup> Studi dr. Djoehana di Belanda dimaksudkan untuk memperoleh gelar *Arts*. Gelar tersebut akan membuat gaji dan kedudukan sosial dr. Djoehana sama dengan dokter Belanda saat ia kembali ke Hindia Belanda.

Awal perkenalannya dengan Sutan Sjahrir adalah ketika Maria Ullfah diundang ke rumah dr. Djoehana. Setelah perkenalan di Amsterdam Sutan Sjahrir berkunjung ke Leiden dan menemui Maria Ullfah. Pertemuan antara Sjahrir dan Maria Ullfah tersebut membicarakan kesan dan pengalaman keduanya selama berada di Belanda. Dari pertemuan tersebut rupanya Sjahrir ingin mengetahui pandangan hidup Maria Ullfah. Sutan Sjahrir selanjutnya bertanya kepada Maria Ullfah tentang perasaannya sebagai anak gadis Indonesia yang dapat belajar di Belanda. Maria Ullfah menjawab bahwa ia merasa bersyukur diberi kesempatan oleh ayahnya untuk belajar di Belanda yang merupakan negara merdeka.

Pertanyaan Sjahrir tersebut menyadarkan Maria Ullfah akan ketimpangan yang terjadi di Belanda dan Hindia Belanda. Di Hindia Belanda tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Hanya beberapa anak dari

---

<sup>54</sup> Maria Ullfah Subadio, *loc.cit.*,

golongan priayi yang dapat mengenyam pendidikan modern, meskipun ada sebagian dari anak golongan priayi yang tidak mengenyam pendidikan karena terbentur adat. Sedangkan di Belanda Maria Ullfah melihat usaha-usaha masyarakat Belanda dalam memajukan rakyatnya, khususnya kaum buruh. Kaum buruh di Belanda diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan mereka.

Maria Ullfah sangat tertarik dengan usaha-usaha untuk memajukan kaum buruh. Salah satunya adalah yang dilakukan *volks Huizen* sebuah lembaga yang memberikan kesempatan kepada kaum buruh untuk menambah pengetahuannya. Setelah kaum buruh selesai menempuh pendidikan di sekolah dasar (wajib belajar), mereka mendapatkan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan bakatnya seperti mengikuti kursus bahasa Inggris dan bahasa lainnya, mengikuti kursus jahit-menjahit bahkan belajar bermain sandiwara (theater).<sup>55</sup> Hal tersebut membuat Maria Ullfah bertekad untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk memajukan rakyat Indonesia sekembalinya dari Belanda, khususnya kaum perempuan yang masih tertinggal dalam hal pendidikan. Maria Ullfah sadar akan rendahnya pendidikan kaum perempuan yang membuat mereka tidak berdaya ketika diceraikan suaminya. Kaum perempuan yang dimaksud Maria Ullfah adalah kaum perempuan dari kalangan menengah ke atas. Berbeda dengan kaum perempuan dari lapisan masyarakat rendah yang sudah terbiasa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung kepada suami mereka.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Percakapan antara keduanya cukup membuat Sjahrir memahami bagaimana jalan pikiran Maria Ullfah. Maria Ullfah selanjutnya diajak ke pertemuan Liga Anti Kolonialisme yang diadakan di Gedung Bioskop di *Hooge Woerd*, Leiden.<sup>56</sup> Dalam pertemuan tersebut Maria Ullfah diperkenalkan kepada pembicara utama yang bernama Jef Last, ia adalah sahabat Sjahrir yang juga seorang pemimpin sosialis. Jef Last memberi Maria Ullfah sebuah buku tentang kisah gadis Tionghoa pengikut Mao Tse Tung. Suatu hari sahabat Maria Ullfah melihatnya sedang membaca buku tersebut. Sebagai anak Bupati ia mengingatkan Maria Ullfah yang juga anak seorang Bupati bahwa apa yang dilakukannya dapat menyulitkan ayahnya. “Ayah saya memberi penuh kepercayaan dan saya berjanji untuk menyelesaikan pelajaran tepat waktunya”, kata Maria Ullfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*.

Bukan hanya menjadi guru politik bagi Maria Ullfah, tetapi Sjahrir pun menjadi pembimbing perkembangan jiwa Maria Ullfah. Maria Ullfah pun diajak ke *Volks Concert* (Konser Rakyat). Harga tiket *Volks Concert* sangat terjangkau bagi mahasiswa dan mutunya tidak kalah dengan *concert* yang diadakan untuk kaum *elite*. Bagi Sjahrir musik bersifat universal dan dapat dinikmati oleh semua golongan. Kontan Sjahrir menjadi guru bagi Maria Ullfah, lewat Sjahrir pula ia mengenal apa itu sosialisme. Bagi Sjahrir Maria Ullfah adalah kader sosialis yang baik, meskipun ia seorang priayi tetapi Maria Ullfah tidak feodal, Maria Ullfah adalah sosok perempuan yang progresif di zamannya.

---

<sup>56</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 29.

Persahabatan antara Maria Ullfah dan Sjahrir berakhir ketika Sjahrir harus pulang ke Hindia Belanda. Menurut Maria Ullfah, Sjahrir pulang karena mendapatkan tugas dari Bung Hatta. Bung Hatta menugaskan Sjahrir untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pergerakan nasionalis pasca ditangkapnya Soekarno dan dibubarkannya PNI (Partai Nasional Indonesi). Sjahrir pulang ke Hindia Belanda sebelum ia menyelesaikan studinya, saat itu Sjahrir baru menyelesaikan ujian Kandidat Hukum (sarjana muda). Sjahrir pulang ke Indonesia pada tahun 1931, namun dalam biografi Maria Ullfah disebutkan bahwa Sjahrir kembali ke Indonesia tahun 1932. Penggunaan tahun 1931 didasarkan pada tahun pembubaran PNI, sedangkan tahun 1932 berdasarkan tahun lulus ujian Kandidat Hukum Sjahrir.

Akhirnya pada bulan Juni 1933 Maria Ullfah lulus dari Fakultas Hukum Leiden.<sup>57</sup> Maria Ullfah mencatatkan namanya sebagai perempuan Indonesia pertama yang menjadi ahli hukum lulusan Leiden. Maria Ullfah selanjutnya melakukan perjalanan keliling Eropa dengan biaya yang diperoleh dari hasil menabungnya selama di Belanda. Maria Ullfah berkunjung sendirian ke beberapa negara Eropa seperti Norwegia, Denmark, Skotlandia, Perancis, Inggris, Jerman, dan Switzerland. Perjalanan wisata Maria Ullfah ini tidak hanya sekedar wisata biasa, tetapi perjalanan yang membuktikan Maria Ullfah sebagai perempuan Indonesia modern yang dapat berdiri sendiri, mandiri, dan tidak perlu dijaga oleh lelaki atau keluarga.

---

<sup>57</sup> Maria Ullfah Subadio, *op.cit.*, hlm. 93.

### **BAB III**

#### **PERAN MARIA ULLFAH PADA MASA KOLONIAL TAHUN 1935-1945**

##### **A. Peran Maria Ullfah dalam masa Kolonial Belanda**

Maria Ullfah kembali ke Hindia Belanda pada Desember 1933, setelah sebelumnya ia melakukan perjalanan keliling Eropa. Maria Ullfah pulang ke Hindia Belanda dengan menumpang kapal laut *Johan van Olderbarndveld* milik perusahaan pelayaran *Stoomvaart Maatschappij, Nederland*.<sup>1</sup> Setelah menempuh perjalanan laut, akhirnya kapal yang ditumpangi Maria Ullfah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Bukan hanya keluarga dan kawan yang datang menyambut kedatangan Maria Ullfah, tetapi para peminat pergerakan kebangsaan dan pergerakan perempuan khususnya datang menyambutnya.

Reputasi sebagai perempuan pertama Indonesia yang mendapat gelar *Meester in de Rechten* (Mr) membuat nama Maria Ullfah dikenal masyarakat. Para peminat dari pergerakan kebangsaan dan pergerakan perempuan datang ke Tanjung Priok untuk mengenal sosok Maria Ullfah yang cerdas dan mempunyai minat terhadap nasib kaum perempuan. Sebagai perempuan Indonesia yang mumpuni dalam bidang hukum, Maria Ullfah diharapkan dapat memajukan nasib kaum perempuan di Hindia Belanda yang masih sangat memprihatinkan.

Maria Ullfah dikenal sebagai sosok perempuan yang rendah diri dan sederhana. Seorang wartawan dari majalah wanita Indonesia mengadakan wawancara dengan Maria Ullfah dan menulis, “sikapnya yang rendah diri dan pembawaannya yang sederhana. Ia berbusana kebaya dan kainnya bercorak

---

<sup>1</sup> Gadis Rasid, *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1982), hlm. 35.

sederhana pula”.<sup>2</sup> Sejak kembali dari Belanda Maria Ullfah lebih memilih menggunakan baju kebaya dan berkain, dari pada menggunakan pakaian Barat yang sering ia gunakan sewaktu di Belanda. Baru pada masa kependudukan Jepang dan masa revolusi Maria Ullfah dituntut kembali menggunakan pakaian yang bergaya Barat, karena keadaan yang menghendaknya untuk dapat bergerak lebih cepat dan gesit.

Pada saat kembali ke Hindia Belanda Maria Ullfah memutuskan untuk istirahat sejenak di Kuningan. Maria Ullfah memilih untuk menemani ayahnya yang seorang Bupati Kuningan sekaligus melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Untuk mengisi waktu luang sembari mengurus ayahnya, Maria Ullfah memutuskan untuk menerima tawaran bekerja sebagai tenaga honorer selama enam bulan di kantor Kabupaten Cirebon.<sup>3</sup> Sebagai tenaga honorer Maria Ullfah bertugas untuk menyusun naskah *wegverkeersordonatie* (peraturan lalu lintas).

Pada saat Maria Ullfah bekerja di Cirebon bulan Februari 1934, ia kedatangan seorang tamu. “Sjahrir menengok saya dan bersama-sama berjalan-jalan di Pasuketan daerah pertokoan Cirebon”, kenang Maria Ullfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*.<sup>4</sup> Maria Ullfah kehilangan kontak dengan Sjahrir pada tahun 1931, ketika Sjahrir tiba-tiba pulang ke Hindia Belanda tanpa menyelesaikan studi

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Mohamad Cholid, dkk, “Maria Ulfah Kekasih Abadi Soebadio”, *Tempo*, 23 April, 1988, hlm. 109.

<sup>4</sup> Maria Ullfah Subadio, “Bung Sjahrir”, *Mengenang Sjahrir*. (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm. 93.

Hukumnya di Amsterdam. Kondisi perjuangan politik bangsa Indonesia yang lumpuh akibat ditangkapnya Ir. Soekarno dan dibubarkannya PNI membuat Sjahrir harus kembali ke Indonesia dan melanjutkan perjuangan sekaligus mengisi kekosongan kepemimpinan pergerakan nasional.

Pertemuan antara keduanya membuat Maria Ullfah bahagia, karena sudah lama ia tidak melihat dan mendengar kabar dari sahabatnya. Mereka bercakap-cakap dan saling bertukar pengalaman ketika kembali ke Hindia Belanda. Sjahrir bertanya kepada Maria Ullfah tentang perasaannya bekerja sebagai tenaga honorer di Kabupaten Cirebon. Maria Ullfah menjawab dengan jujur bahwa ia kurang nyaman dengan pekerjaannya sekarang, tetapi Maria Ullfah ingin memenuhi permintaan ayahnya untuk mendampinginya beberapa bulan. Setelah permintaan ayahnya terpenuhi maka Maria Ullfah akan melakukan apa yang ia cita-citakan, yaitu untuk memajukan rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuan Indonesia yang masih tertinggal.

Maria Ullfah pun mengundang Sjahrir untuk berkunjung ke Kuningan dan berkenalan dengan Raden Mohammad Achmad. Karena sedang ada urusan lain, maka Sjahrir berjanji kepada Maria Ullfah untuk pergi bersama ke Kuningan setelah Maria Ullfah pulang bekerja. Sepulang bekerja Sjahrir tidak kunjung datang dan akhirnya Maria Ullfah pulang sendiri ke Kuningan. Menghilangnya Sjahrir dari Cirebon dikarenakan sejak datang Sjahrir telah menjadi buronan polisi. Sjahrir menjadi buronan polisi rahasia Belanda (PID atau *Politieke*

*Inlichtingen Dienst*)<sup>5</sup> karena kegiatan politiknya. Kegiatan Sjahrir dipartai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) menjadikannya sebagai sasaran PID. Sjahrir yang telah mengetahui bahwa dirinya sudah diincar polisi Belanda segera meninggalkan Cirebon dan pergi ke Semarang.

Pada tanggal 26 Februari 1934, secara mendadak pemerintah menangkap beberapa anggota PNI Baru, yaitu Hatta, Sjahrir, Maskun, Burhanuddin, Marwoto, dan Bondan.<sup>6</sup> Kabar ditangkapnya Sjahrir akhirnya terdengar oleh Maria Ullfah, dalam buku *Mengenang Sjahrir* Maria Ullfah menuliskan bahwa Sjahrir ditangkap dan dimasukkan dalam penjara Cipinang. Bertahun-tahun Maria Ullfah kembali kehilangan kontak dengan Sjahrir, dan baru pada masa pendudukan Jepang mereka bertemu kembali.

Bersama dengan Moh. Hatta dan beberapa kawannya, Sjahrir akhirnya dibuang ke Tanah Merah (*Boven Digoel*) sebuah tempat pengasingan yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda. *Boven Digoel* pada awalnya dimaksudkan sebagai tempat pengasingan bagi orang-orang komunis yang

---

<sup>5</sup> PID atau *Politiek Inlichtingen Diensti* adalah polisi yang ditugaskan untuk mengawasi gerakan-gerakan nasional, PID disebar dan diberi kekuasaan untuk menghadiri setiap rapat baik yang bersifat politik maupun tidak, serta diberi wewenang untuk menghentikan pembicaraan yang mengecam politik pemerintah, membubarkan rapat, dan menangkap peserta yang dicurigai. PID dapat dikatakan sebagai badan penyelidikan yang merupakan momok bagi gerakan nasional Indonesia dan merupakan alat kolonial yang ampuh untuk melumpuhkan gerakan nasional. PID merupakan wujud balas dendam dari De Jonge (Gubernur Jenderal pengganti De Graeff) yang dikalahkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam oronisasi pemerintah mengenai sekolah liar, lihat Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I*. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), hlm. 221.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 225.



membahayakan pemerintahan Hindia Belanda, tetapi dalam perkembangannya *Boven Digoel*-pun digunakan untuk kaum nasionalis yang dianggap berbahaya. *Digoel* sebagai tempat pengasingan memang terkenal sebagai tempat pengasingan yang paling kejam dan menyedihkan. Pemerintah Hindia Belanda berharap ketika seseorang diasingkan ke *Boven Digoel* mereka akan bertobat dan mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Namun sebagian dari para buangan tersebut lebih memilih tetap melawan pemerintah.

Setelah menyelesaikan tugasnya di kantor Kabupaten Cirebon dan melepas rindu kepada ayahnya, Maria Ullfah memutuskan untuk pindah ke Batavia. Di Batavia Maria Ullfah memutuskan untuk terjun ke kancah pergerakan nasional Indonesia.<sup>7</sup> Batavia dipilih oleh Maria Ullfah sebagai tempat mewujudkan cita-citanya karena Batavia merupakan tempat berkumpulnya semua cendekiawan Indonesia. Selain itu, Batavia juga merupakan pusat aktivitas pergerakan kebangsaan selain di Surabaya dan Bandung.

Pada bulan Agustus 1934 Maria Ullfah mendapat surat dari Batavia. Kawan lamanya yang bernama Soegiati mengajaknya untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada suatu lembaga pendidikan yang diadakan oleh perkumpulan Muhammadiyah. “Soegiarti kirim surat kepada saya. Dia menawari saya jadi guru di sekolah Muhammadiyah. Dia sudah kenal saya, sudah tahu sifat-sifat saya”, kata Maria Ullfah dalam wawancaranya dengan Dewi Fortuna

---

<sup>7</sup> Bonnie Triyana, dkk, “Luka Bibi di Hati Maria”, *Historia*, Nomor I, 2012, hlm. 26.

Anwar.<sup>8</sup> Pada saat itu Soegiarti menjadi pengajar pada sekolah menengah Muhammadiyah di Batavia. Tawaran Soegiarti tersebut diterima Maria Ullfah dengan senang hati dan dengan restu Raden Mohammad Achamad akhirnya Maria Ullfah berangkat ke Batavia.

Di Jakarta Maria Ullfah tinggal menumpang di rumah saudaranya, yaitu keluarga Suria Santoso di Bilangan Tenabang II. Nyonya Santoso adalah bibi Maria Ullfah adik dari ayahnya, sedangkan pamannya yang bernama Suria Santoso adalah seorang perwira didikan Belanda dari Akademi Militer Belanda di Breda. Paman Maria Ullfah adalah seorang perwira pada tentara kolonial Belanda yang dikenal dengan nama KNIL (*Koninklijk Nederlands Indisch Leger*).<sup>9</sup> Jabatan paman Maria Ullfah sangat bertentangan dengan kegiatan-kegiatannya di dalam pergerakan nasional. Paman Maria Ullfah yang seorang perwira pemerintahan Belanda sering menegur kegiatan Maria Ullfah. Hal tersebut membuat Maria Ullfah dilanda rasa tidak enak, sehingga ia memutuskan untuk pindah dari rumah pamannya.

Bersama kawan lamanya di Leiden yang bernama Siti Soendari, Maria Ullfah menyewa rumah di jalan Salemba Tengah (*Struiswijkstraat*). Siti Soendari lulus dari Fakultas Hukum Leiden tahun 1934, satu tahun setelah Maria Ullfah pulang ke Hindia Belanda. Setelah kembali ke Hindia Belanda Siti Soendari bekerja di Departemen Kesehatan Umum di Batavia, merangkap sebagai guru

---

<sup>8</sup> ANRI, Sejarah Lisan Tahun 1973-1994 No. 154, *Maria Ulfah- Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*, 1983, kaset 1.

<sup>9</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 38.

sekolah menengah.<sup>10</sup> Sejak di Leiden Maria Ullfah tinggal bersama Siti Soendari di *Witte Singel 25*, sehingga ketika kembali hidup bersama di Batavia keduanya sudah terbiasa. Maria Ullfah yang sejak awal pandai dalam hal keuangan ditugasi untuk mengurus perbelanjaan, sedangkan Siti Soendari bertanggung jawab pada kebersihan rumah. Keduanya memiliki kamar dan ruang tamu masing-masing. Pada suatu hari Maria Ullfah dan Siti Soendari kedatangan tamu lelaki dari Solo, tamu tersebut adalah staf Mangkunegaran. Atas permintaan seorang pejabat Mangkunegaran (kawan lama mereka di Leiden), akhirnya tamu lelaki tersebut dapat menginap. Kebiasaan hidup Maria Ullfah dan Siti Soendari di Batavia dapat dikatakan bebas untuk ukuran masa itu, namun di dalam kebebasan yang ada keduanya tetap berpegang pada norma-norma susila yang berlaku.

Sekolah menengah Muhammadiyah terletak di jalan Kramat nomor 45, Batavia.<sup>11</sup> Sebelum pindah dari rumah pamannya, Maria Ullfah sering berangkat mengajar menggunakan *trem* dari Tenabang dan selanjutnya ia harus berjalan kaki untuk sampai ke jalan Kramat. Sekolah menengah Muhammadiyah dipimpin oleh Ir. Djuanda, kelak pada masa kemerdekaan ia menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia pada Kabinet Djuanda. Di sekolah menengah Muhammadiyah Maria Ullfah mengampu tiga mata pelajaran yaitu bahasa Jerman, sejarah, dan tata negara.

---

<sup>10</sup> Santo Koesoebjono & Solita Koesoebjono-Sarwono, *Siti Soendari Adik Bungsu dr. Soetomo*. (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008), hlm. 67.

<sup>11</sup> Bonnie Triyana, dkk, "Guru Sejarah Sekolah Merah", *op.cit.*, hlm. 33.

Muhammadiyah adalah salah satu dari dua organisasi pendidikan yang paling penting di era 1930-an selain Taman Siswa.<sup>12</sup> Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan keislaman, sedangkan Taman Siswa memberikan pendidikan budaya Barat dipadukan dengan nilai-nilai dan budaya Jawa. Muhammadiyah dan Taman Siswa termasuk dalam golongan “sekolah liar” yang ada di Hindia Belanda. Sekolah liar merupakan wujud protes dari masyarakat Hindia Belanda terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Sekolah tinggi yang disediakan pemerintah kolonial Belanda hanya berlaku bagi anak-anak priyayi.

Perkembangan persebaran “sekolah liar” yang sangat pesat membuat pemerintah kolonial khawatir. Perkembangan tersebut adalah wujud kegagalan atau kemerosotan besar pendidikan kolonial yang diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial beranggapan bahwa “sekolah liar” membahayakan posisi pemerintah dalam negara jajahan. Sebagai upaya untuk mengatasi perkembangan penyebaran “sekolah liar” pemerintah bermaksud mengadakan peninjauan kembali tentang peraturan pendidikan pemerintah dan ordonasi pengawasan sekolah-sekolah swasta yang tidak menerima bantuan dari pemerintah Belanda. Maksud dari peninjauan tersebut adalah agar pemerintah Hindia Belanda dapat mencabut hak pendirian sekolah apabila terbukti pendidikan yang berlangsung membahayakan ketertiban umum.

Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal De Jonge, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonasi sekolah liar yang bersifat preventif pada 1

---

<sup>12</sup> Wieringa. Saskia Eleonora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 125.

Oktober 1932.<sup>13</sup> Maksudnya adalah pemerintah kolonial dapat menolak permohonan izin penyelenggaraan pendidikan jika pendidikan yang akan diselenggarakan membahayakan, penolakan tersebut atas dasar *dugaan* bahwa pendidikan yang akan diselenggarakan memungkinkan terjadinya keadaan bahaya. Ordonasi yang dilakukan pemerintah kolonial tersebut sangat bertentangan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang haus akan pendidikan. Masyarakat Indonesia banyak mendapatkan pendidikan bukan dari sekolah buatan pemerintah Belanda melainkan dari sekolah-sekolah swasta yang didirikan kaum nasionalis. Gerakan ordonasi sekolah liar yang dilakukan pemerintah kolonial nyatanya semakin mempererat berbagai organisasi nasional Indonesia, karena ordonasi pemerintah kolonial cenderung digunakan sebagai alat kontrol bagi gerakan nasional.

Selain mengajar di sekolah menengah Muhammadiyah, Maria Ullfah mengajar di sekolah menengah Perguruan Rakyat. Perguruan rakyat adalah sekolah yang didirikan oleh mahasiswa aktivis pejuang kemerdekaan. Sekolah menengah Perguruan Rakyat dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Dari sekolah menengah Perguruan Rakyat Maria Ullfah mulai mengenal beberapa tokoh nasional seperti Wilopo SH, Moh Yamin, Sahardjo SH, Sumanang SH dan lainnya. Sekolah menengah Perguruan Rakyat dicap sebagai “sekolah merah” oleh pemerintah Hindia Belanda karena Perguruan Rakyat dijalankan oleh mereka yang beraliran kiri, seperti Amir Syarifuddin, M. Yamin, dan Hindromartono.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Slamet Muljana, *op.cit.*, hlm. 109.

<sup>14</sup> Bonnie Triyana, *dkk, op.cit.*, hlm. 35.

Pengajaran di sekolah menengah Perguruan Rakyat tidak hanya pelajaran seperti sekolah pada umumnya, tetapi Perguruan Rakyat memberika ide-ide nasionalisme bagi siswanya. Sama halnya dengan sekolah liar lainnya, sekolah menengah Perguruan Rakyat sebagai sekolah yang dianggap “sekolah merah” tidak lepas dari pengawasan keras dari pemerintah kolonial pada masa itu.

Menjadi guru di sekolah menengah Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat yang dinyatakan “sekolah liar” oleh pemerintah kolonial tidak membuatnya takut. Bagi Maria Ullfah menjadi seorang guru yang dapat mencerdaskan masyarakat adalah kewajiban dan wujud dari cita-citanya sejak lama. Meskipun Maria Ullfah dibayar dengan gaji yang minim, bahkan terkadang gajinya sering tidak dibayarkan penuh karena sekolah selalu kekurangan dana, ia tidak mengeluh. Maria Ullfah menganggap dengan menjadi guru ia dapat bergaul dan berjuang bersama para pejuang nasionalis Indonesia yang bercita-cita sama dengannya, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berpendidikan.

“Saya juga ingin kembali kembali ke tanah air menyumbangkan tenaga dan pikiran saya untuk memajukan rakyat kita, khususnya kaum perempuan yang masih amat kurang pendidikannya”, kata Maria Ullfah kepada Sjahrir ketika bertemu di Amsterdam.<sup>15</sup> Selain menjadi guru di sekolah partikelir Maria Ullfah secara sukarela melakukan kegiatan dalam lingkungan rumahnya di Salemba Tengah. Maria Ullfah menyelenggarakan kursus pemberantasan buta huruf bagi

---

<sup>15</sup> Maria Ullfah Subadio, *op.cit.*, hlm. 92.

perkumpulan ibu-ibu di Salemba Tengah dan Paseban. Kursus tersebut diadakan setiap tiga kali seminggu pada sore hari.

Semula upaya Maria Ullfah tersebut dianggap sebagai upaya untuk Kristenisasi masyarakat Salemba Tengah. Masyarakat masih menaruh curiga kepada kegiatan Maria Ullfah tersebut, bahkan ketika Maria Ullfah sedang mengajar membaca dan menulis salah satu orang berkomentar, “Oh, jadi nanti kami harus menjadi orang Kristen, ya?”. Maria Ullfah yang mendengar komentar tersebut tidak paham kenapa orang tersebut bisa berfikir seperti itu. Apakah sebelumnya sudah ada pendeta-pendeta Kristen yang menyebarkan agamanya dengan cara kursus baca tulis atau pemahaman masyarakat Indonesia pada tahun 1930-an masih menganggap hanya orang-orang Kristen yang boleh menjadi orang terpelajar. Agar kegiatan kursus baca tulisnya berhasil, maka pelajaran membaca dan menulis selanjutnya dipadukan dengan kursus jahit-menjahit serta gunting pola baju. Sebagai syarat wajib ibu-ibu mengikuti kursus menjahit adalah belajar membaca dan menulis, sehingga lama-kelamaan terbentuk beberapa kelompok belajar di kampung. Pengalaman Maria Ullfah memberantas buta huruf di Salemba Tengah dan Paseban dianggapnya sebagai pekerjaan yang paling banyak memerlukan kesabaran dan sering membawa perasaan frustrasi, meskipun kedepannya usaha tersebut sangat berhasil.

Maria Ullfah menjadi guru di sekolah menengah Muhammadiyah dan sekolah menengah Perguruan Rakyat hingga 1942.<sup>16</sup> Selama Maria Ullfah menjadi guru, ia selalu dijadikan kebanggaan bagi para pengelola sekolah. Selain

---

<sup>16</sup> Lihat tanggal-tanggal penting dalam Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 180.

itu, Maria Ullfah dijadikan *parade paard* atau kebanggaan kaum nasionalis. “Lihatlah seorang wanita, putri seorang Bupati didikan Belanda, dengan sukarela terjun di gelanggang perjuangan kemerdekaan”, kata Maria Ullfah menirukan perkataan para kaum nasionalis. Maria Ullfah pun selalu diikutsertakan dalam kegiatan politik, seperti kegiatan rapat, pertemuan-pertemuan politik, menjadi anggota panitia dalam suatu acara politik, dan bahkan dijadikan pembicara.

Lambat laun sepak terjang Maria Ullfah dalam kancah pergerakan nasional mulai diperhatikan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Raden Mohammad Achmad yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Kuningan ditegur oleh atasannya residen Cirebon yang bernama Van der Plas. Van der Plas adalah seorang Belanda yang sangat terkenal karena pengetahuannya tentang masyarakat Indonesia, dan karena pengetahuannya tersebut ia ditugaskan oleh pemerintah Belanda sebagai ahli untuk mengukur suasana masyarakat Indonesia saat itu. Teguran dari Van der Plas kepada Raden Mohammad Achmad ditanggapi dengan tegas, “Saya tidak bisa apa-apa, residen. Dia sudah dewasa, jadi kalau saya dipersalahkan, silahkan”. Selain tegas dalam menanggapi teguran Van der Plas, dukungan Raden Mohammad Achmad kepada Maria Ullfah tidak berhenti begitu saja. Maria Ullfah yang bekerja di sekolah swasta dengan gaji rendah sering mendapat bantuan uang dari ayahnya. Sikap dan dukungan Raden Mohammad Achmad kepada Maria Ullfah membuktikan bahwa ia adalah sosok tegas dan berani, meskipun kapasitasnya adalah sebagai pegawai pemerintah kolonial.



“Akhirnya ayah pensiun saat berusia 55 tahun”, kata Maria Ullfah dalam wawancaranya dengan Dewi Fortuna Anwar.<sup>17</sup> Raden Mohammad Achamad pensiun sebagai Bupati Kuningan dalam usia 55 tahun. Usia 55 tahun merupakan usia normal seorang pegawai negeri pensiun, tetapi bagi bupati-bupati yang mau patuh dan bekerjasama dengan pemerintah mereka dapat menjabat hingga usia 70 tahun. Setelah pensiun sebagai Bupati Kuningan, Raden Mohammad Achmad menetap di Bandung dan bergabung dengan Parindra (Partai Indonesia Raya). Raden Mohammad memutuskan untuk ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, ia tidak menjadi pengurus tetapi menjadi penasehat partai pengganti Budi Utomo tersebut.

Menjadi guru sekaligus aktif dalam kegiatan pergerakan nasional mengharuskan Maria Ullfah lancar menggunakan bahasa Indonesia. Maria Ullfah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika ia mengajar, karena pada masa itu bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar setiap pelajaran. Selain itu, aktifitas Maria Ullfah dalam pergerakan nasional mengharuskannya untuk fasih berbahasa Indonesia ketika dalam pertemuan atau pidato-pidatonya. Maria Ullfah yang sejak kecil terbiasa menggunakan bahasa Belanda, bertekad untuk belajar berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bersama Soegiarti, Maria Ullfah meminta pujangga terkenal Amir Hamzah untuk mengajarnya menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai pujangga, bahasa Indonesia yang diajarkan lebih ke bahasa Indonesia untuk sastra, sehingga Maria

---

<sup>17</sup> ANRI, Sejarah Lisan Tahun 1973-1994 No. 154, *Maria Ulfah- Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*, 1983, kaset 1.

Ullfah dan Soegiarti memutuskan untuk berhenti belajar kepada Amir Hamzah dan mencari guru baru yang bernama Sutopo.

Karir Maria Ullfah dalam gerakan politik perempuan dimulai pada saat ia ikut dalam Kongres Perempuan Indonesia Kedua di Batavia pada tahun 1935.<sup>18</sup> Ny. Sri Mangunsarkoro adalah orang yang mengajak Maria Ullfah untuk ikut serta dalam kongres tersebut. Maria Ullfah menerima ajakan tersebut dengan harapan bahwa melalui Kongres Perempuan Indonesia, ia dapat melaksanakan cita-citanya untuk ikut memperbaiki kedudukan perempuan dan rakyat Indonesia pada umumnya. Kongres Perempuan Indonesia kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935 dengan pimpinan Ny. Sri Mangunsarkoro dan dibantu oleh Ny. Sh. Suparto serta dihadiri oleh wakil organisasi-organisasi perempuan.<sup>19</sup> Maksud dari kongres tersebut adalah merapatkan persaudaraan antara organisasi-organisasi perempuan Indonesia dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Sebuah peristiwa terjadi dalam kongres tersebut, dimana terjadi selisih paham antara anggota kongres. Salah satu pembicara dalam kongres yang bernama Ratna Sari perwakilan PERMI (Persatuan Muslim Indonesia) menyampaikan tentang kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam. Maria Ullfah mengenang peristiwa tersebut dalam wawancaranya dengan Dewi Fortuna Anwar, dalam wawancara tersebut Maria Ullfah mengisahkan bahwa

---

<sup>18</sup> Bonnie Triyana, dkk, "Luka Bibi di Hati Maria", *loc.cit.*,

<sup>19</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 45.

Ratna Sari adalah sosok perempuan yang bersemangat dan fanatik.<sup>20</sup> Ratna Sari menyampaikan gagasannya mengenai kedudukan kaum perempuan dalam hukum perkawinan Islam, karena ia berasal dari golongan Islam kuat maka dalam pidatonya tersebut lebih terkesan menyarankan agar kongres menerima poligami sebagai sesuatu yang wajar. Sebenarnya Ratna Sari adalah golongan yang menentang kolonial Belanda, tetapi karena sikapnya yang sangat *orthodox* terhadap hukum perkawinan Islam tetap saja pidatonya menimbulkan salah paham diantara peserta kongres.

Salah satu peserta kongres yang paling menentang adalah Ny. Suwarni Pringgodigdo yang berasal dari perkumpulan Isteri Sedar. Maria Ulfah mengisahkan sikap Ny. Suwarni Pringgodigdo yang menentang keras pidato yang disampaikan Ratna Sari. "Saya tidak menerima itu!!! Laki-laki itu persis seperti ayam jago, dimana-mana kerjanya mengumpulkan perempuan saja", cetus Ny. Suwarni Pringgodigdo. Setiap kali Ny. Suwarni Pringgodigdo menyebutkan kata "ayam jago", dari bangku belakang peserta kongres terdengar suara kluruk ayam jago dari mulut kaum lelaki. "Kukuruyuk, Kukuruyuk...", terdengar teriakan dari kaum lelaki dengan diiringi ketawa cekikikan sehingga menimbulkan kegaduhan. Ny. Suwarni Pringgodigdo yang mendengar celotehan kaum lelaki dalam kongres, memutuskan, bahwa organisasi Isteri Sedar keluar dari Kongres Perempuan Indonesia pada akhir pidatonya.

---

<sup>20</sup> ANRI, Sejarah Lisan Tahun 1973-1994 No. 154, *Maria Ulfah- Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*, 1983, kaset 1.

Kondisi kongres yang mulai tidak kondusif membuat panitia acara Kongres Perempuan Indonesia kedua merasa salah memilih orang. Kegaduhanpun terjadi dikalangan panitia acara, “Wah, kenapa kita suruh dia. Wah salah kita ini,” kata Maria Ullfah meniru Ny. Sri Mangunsarkoro yang menyesali keputusannya memilih Ratna Sari. Kondisi yang semakin panas membuat Maria Ullfah turun tangan, agar kongres tidak terpecah akibat perbedaan pendapat tentang poligami maka Maria Ullfah mengusulkan agar prasaran dari Ratna Sari tidak dibahas dalam kongres untuk menjaga persatuan bangsa karena masih menghadapi pemerintah kolonial. Usul dari Maria Ullfah akhirnya diterima oleh semua peserta kongres dan perpecahan pun dapat dihindari.

Salah satu keputusan dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua adalah pembentukan Biro Konsultasi yang diketuai oleh Maria Ullfah.<sup>21</sup> Tugas dari Biro Konsultasi adalah mempelajari hukum perkawinan Islam secara mendalam dan membantu kaum perempuan yang mengalami kesulitan dalam perkawinan. Pembentukan Biro Konsultasi tersebut membuat Maria Ullfah lebih aktif dalam urusan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam, bukan lagi hanya teori tapi lebih ke praktiknya. Keaktifan Maria Ullfah ini menjadi kunci awal cita-cita utamanya yaitu memperbaiki kondisi hidup perempuan Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan.

Sejak Biro Konsultasi didirikan sudah banyak kaum perempuan yang datang untuk mengadukan nasib mereka. Kebanyakan dari mereka menyampaikan keluhan tentang poligami yang dilakukan suaminya. Pada umumnya kaum

---

<sup>21</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 54.

perempuan yang datang langsung meminta agar diusahakan perceraian. Untuk menghadapi keluhan tersebut, Maria Ullfah lebih memilih bersikap hati-hati. Sebelum mengambil keputusan bercerai biasanya Maria Ullfah akan bertanya, apakah mereka sadar akan akibat yang akan terjadi, karena pada masa itu perceraian masih dianggap “aib” bagi sebagian masyarakat kita. Selain itu, ketika seorang perempuan meminta bercerai, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam hal membiayai kehidupannya sendiri dan anak mereka. Maria Ullfah selalu menyarankan kepada kaum perempuan yang datang untuk memikirkan terlebih dahulu langkah yang mereka ambil dan konsekwensinya. Baru setelah keputusan cerai sudah bulat, Maria Ullfah akan mencari jalan bagaimana mengusahakan perceraian tersebut.

Pernikahan dapat dikatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila diadakan perceraian.<sup>22</sup> Pada masa kolonial umumnya perceraian masih dianggap suatu hal yang kurang benar, meskipun menurut hukum Islam talak dinyatakan sebagai barang yang halal. Talak dijatuhkan seorang suami kepada istrinya apabila akan bercerai, biasanya talak dijatuhkan kepada isteri paling banyak tiga kali. Seorang suami yang menalak istrinya sebanyak tiga kali maka ia tidak bisa melakukan rujuk kepada istrinya. Mengenai hak talak terdapat hadis Rosululloh s.a.w yaitu, “Barang yang halal akan tetapi paling terkutuk ialah talak”. Merujuk dari hadis tersebut jelas bahwa perceraian memang diperbolehkan tetapi dalam prakteknya perceraian adalah hal yang dibenci Tuhan.

---

<sup>22</sup> Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 51.

Pada masa penjajahan Belanda, Hukum Perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi atauran-aturan Hukum Perkawinan dan Hukum Waris menurut Islam.<sup>23</sup> Kitab hukum tersebut ditetapkan pada 25 Mei 1760, tetapi setelah diperbaharui kitab tersebut akhirnya dicabut oleh pemerintah secara berangsur-angsur pada abad ke-19. Setelah *Compendium Freijer* dicabut oleh pemerintah kolonial Belanda, maka secara tekstual Hukum Perkawinan yang berlaku adalah Hukum adat. Hukum adat tidak berlaku bagi orang-orang Kristen di wilayah Hindia Belanda, bagi orang-orang Kristen berlaku Undang-undang Perkawinan Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers Jawa, Minahasa, an Amboina [HOCI]*).

Kembali kepada hal perceraian, perceraian menurut hukum adat lebih sulit dari pada perceraian menurut hukum Islam. Perceraian menurut hukum adat akan tergantung kepada kepala adat karena mereka berhak untuk ikut campur dalam keputusan cerai. Seorang kepala adat pada umumnya hanya mengizinkan perceraian apabila terdapat alasan yang nyata sebagai sebab perceraian. Sedangkan perceraian menurut hukum Islam pada masa kolonial dalam praktiknya lebih mudah, karena hak suami untuk mentalak istrinya dapat digunakan dengan sewenang-wenang. Masalah perceraian atau talak sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami kepada pihak isteri merupakan satu dari banyak masalah dalam perkawinan yang telah dibahas mulai dari Kongres Perempuan Indonesia pertama hingga kongres-kongres selanjutnya. Kejadian tersebut membuktikan

---

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), hlm. 40.

dengan tegas bahwa kedudukan wanita dalam hukum perkawinan masih sangat perlu diperjuangkan.

Maria Ullfah mengisahkan pengalamannya ketika menangani masalah perceraian di Biro Konsultasi. Pada umumnya seorang isteri yang berasal dari lapisan masyarakat rendah lebih tegas dalam menuntut perceraian, berbeda dengan isteri yang berasal dari golongan menengah, mereka sering ragu dengan keputusan untuk bercerai dari suaminya. Seorang isteri yang berasal dari lapisan masyarakat rendah pada umumnya sudah terbiasa untuk mencari nafkah sendiri, sehingga setelah bercerai mereka tidak akan khawatir akan nasib mereka. Berbeda dengan seorang isteri dari golongan menengah, mereka yang terbiasa hidup dari uang pemberian suami dan kurang memiliki ketrampilan untuk mencari nafkah sendiri maka perceraian adalah suatu hal yang akan membuat mereka menderita secara materi.

Sejak dipercaya memimpin Biro Konsultasi Maria Ullfah banyak mengurus perceraian, ketika kliennya sudah bertekad untuk bercerai maka Maria Ullfah yang akan mengurus segala keperluannya. Maria Ullfah harus bolak-balik ke *Raad* Agama yang letaknya di jalan Simpang (*Zijweg*) dari *Molenvliet* (sekarang jalan Gajah Mada).<sup>24</sup> Maria Ullfah harus berangkat dari rumahnya yang terletak di Salemba Tengah menggunakan *trem* menuju ke kantor *Raad* Agama. Setelah sampai di kantor *Raad* Agama Maria Ullfah diharuskan menunggu lama sampai ia mendapat giliran. Para anggota *Raad* Agama sebenarnya kurang suka dengan kegiatan Maria Ullfah. Maria Ullfah sering mendapatkan hambatan dari

---

<sup>24</sup> Bonnie Triyana, dkk, "Taklik-Talak Golongan Maria", *op.cit.*, hlm. 70.

birokrasi *Raad* Agama ketika mengurus perceraian, karena para anggota Pengadilan Agama tidak begitu senang dengan adanya perempuan yang dengan gigih memberi bantuan kepada ibu-ibu yang meminta cerai. Meskipun demikian Maria Ullfah paham mengapa birokrasi mempersulitnya. Pada masa kolonial hidup seorang penghulu Islam sangat tergantung kepada pernikahan dan perceraian, sangat berbeda dengan pendeta-pendeta Kristen yang mendapatkan gaji tetap setiap bulannya. Penghasilan para penghulu Islam tersebut hanya berasal dari uang nikah, talak, dan rujuk. Semakin banyak pernikahan, perceraian, dan rujuk maka semakin banyak penghasilan mereka.

Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pemerintah kolonial telah salah ketika mereka mendiskripsikan dewan yang mengatur keadilan dalam masalah perkawinan sebagai *priesterraad*, yaitu kesalahan pemerintah kolonial dalam menggambarkan tugas-tugas para penghulu di Jawa.<sup>25</sup> Seorang penghulu di masjid adalah kepala administrasi yang mengatur masalah zakat, wakaf, dan dana masjid, tetapi pada saat yang bersamaan mereka harus mengatur masalah mufti dan hakim. Untuk masalah pernikahanpun menjadi tugas seorang penghulu dan apabila diperlukan para penghulu tersebut dapat dijadikan wali pengantin perempuan. Para penghulu tersebut mendapatkan uang dari pelayanan yang mereka berikan, dengan arti lain pembayaran tersebut yang dijadikan sumber penghasilan yang paling utama.

---

<sup>25</sup> Stuers. Cora Vreede-De, *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, hlm. 153.



Diskriminasi yang dialami oleh penghulu Islam tersebut pernah dibahas Maria Ulfah dalam suatu pertemuan dengan kaum perempuan di Purwokerto. Di dalam pertemuan tersebut Maria Ulfah memberikan ceramah tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Selain itu, dalam ceramahnya Maria Ulfah pun membahas tentang diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial kepada para penghulu Islam. Maria Ulfah membandingkan kedudukan pendeta-pendeta Kristen dan alim ulama Islam tersebut, dari keduanya hidup para pendeta Kristen-lah yang paling enak karena mereka mendapatkan gaji tetap tiap bulannya dari pemerintah. Gugatan Maria Ulfah tersebut akhirnya dihentikan oleh PID (polisi Belanda), mereka menganggap ceramah Maria Ulfah tersebut berbahaya dan harus dihentikan.

Pasca Kongres Perempuan Indonesia kedua, isu tentang poligami banyak dibicarakan dalam beberapa pertemuan. Poligami menjadi suatu pembahasan yang tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Sebelumnya pada Kongres Perempuan Indonesia yang pertama isu poligami juga dibahas dalam kongres tersebut. Salah satu program yang diperjuangkan dalam kongres tersebut adalah masalah perlindungan terhadap perempuan Islam dalam hukum perkawinan. Kritikan banyak diberikan bagi kaum lelaki yang dapat dengan mudah membawa perempuan lain ke rumah untuk dinikahi. Menanggapi kritikan tentang poligami, seorang penulis sekaligus editor organisasi kebangkitan kelompok mahasiswa Islam yang bernama Jusuf Wibisono pada tahun 1932 menuliskan:

“Bila perkawinan hanyalah istitusi berdasarkan pemenuhan kehidupan emosional seseorang, seorang isteri tidak akan tahan terhadap kehadiran isteri lain suaminya. Tetapi sekali perkawinan mengambil karakter sosial

dan etis, maka poligami yang terbatas akan menjadi berkah bagi masyarakat".<sup>26</sup>

Pandangan Jusuf Wibisono merupakan perwakilan dari kalangan Islam ortodoks yang mendukung poligami. Poligami menurut hukum Islam diperbolehkan, tetapi Islam membatasi perempuan yang boleh dinikahi yaitu empat orang perempuan. Selain itu, Islam mengharuskan seorang suami berlaku adil ketika ia memutuskan untuk berpoligami dan jika ia tidak dapat berlaku adil maka Islam menganjurkan untuk menikah dengan satu perempuan saja.

Sebagai seorang perempuan Maria Ullfah paham akan nasib yang dialami kaumnya, sebagaimana penderitaan yang dialami R.A Soewenda yang menderita akibat dicerai suaminya. Maria Ullfah sadar bahwa agama Islam memperbolehkan seorang lelaki mempunyai lebih dari satu isteri, tetapi apakah benar Islam menghendaki kaum perempuan menderita ketika dimadu suaminya. Maria Ullfah telah mempelajari sejarah agama dan hukum Islam, ia pun menyoroti Surat An-Nisa' ayat 3. Kesimpulan dari surat tersebut menurut Maria Ullfah adalah sebenarnya agama Islam menganjurkan untuk memperisteri satu orang perempuan saja, karena pada dasarnya manusia tidak dapat berlaku adil. Jika adil dalam hal materi kemungkinan manusia dapat melaksanakannya tetapi untuk dapat adil secara batiniah manusia belum bisa. Sebagai jalan tengah untuk meredakan permasalahan poligami, maka dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua diputuskan untuk mengadakan penyelidikan tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat menurut hukum Islam. Penyelidikan tersebut selain untuk memperbaiki kedudukan perempuan adalah untuk menghindari perselisihan antar

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

umat beragama. Komisi Penyelidik Hukum Perkawinan akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Maria Ulfah.

Pada permulaan tahun 1937 pernah ada usaha Pemerintah Hindia Belanda untuk membuat sebuah rencana “Ordonansi Perkawinana yang Tercatat”, yang mengatur hukum perkawinan bagi penduduk Indonesia asli dan golongan Timur Asing-bukan Tionghoa, yang dengan sukarela hendak tunduk pada Ordonansi tersebut.<sup>27</sup> Selain orang Indonesia yang beragama Islam Ordonansi tersebut berlaku pula kepada orang Indonesia yang beragama Hindu, Budha, animisme, dan lain sebagainya. Ordonansi yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial bersifat bebas, artinya orang dapat memilih untuk tunduk pada ordonansi tersebut dengan dasar monogami yang telah ditentukan atau tetap pada hukum yang telah berlaku sebelumnya. Apabila peraturan tersebut dilanggar maka perkawinan yang baru, dibatalkan. Berdasarkan rancangan Ordonansi tersebut, tiap pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam dapat didaftarkan pada kantor Bupati secara sukarela. Sehingga setelah mereka mendaftarkan pernikahannya, maka pernikahan tersebut harus tunduk kepada hukum perkawinan sipil Barat, mungkin hal ini yang memunculkan anggapan bahwa Ordonansi yang ditawarkan pemerintah kolonial bersifat memaksa.

Ordonansi yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial menawarkan beberapa perubahan, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nani Suwondo, “Wanita dan Masalah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Perjuangan Wanita 10 Windu setelah Kartini 1904-1984*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), hlm. 112.

<sup>28</sup> Stuers. Cora Vreede-De, *op.cit.*, hlm. 165.

1. Mulai sekarang menjadi mungkin mencatatkan perkawinan seseorang dalam kantor pendaftaran, tetapi tanpa ada paksaan untuk melakukannya.
2. Orang-orang yang akan mendaftarkan perkawinannya secara otomatis akan menerima monogami sebagai kondisi absolut dari perkawinan itu.
3. Seorang perempuan yang perkawinannya terdaftar, bila suaminya berniat menikah lagi, dapat membuat surat cerai dan bercerai dengan keputusan pengadilan. Ia secara alamiah dapat menggunakan alasan kuat lain juga-contohnya perselingkuhan suami-dengan tujuan mendapatkan izin cerai dari pengadilan.

Melihat dari Ordonansi yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial tersebut dapat dikatakan cukup baik bagi perbaikan nasib perempuan yang tidak mau dipoligami. Keharusan seorang lelaki mematuhi hukum sipil Barat yaitu monogami akan sangat menguntungkan bagi perempuan yang tidak menginginkan permaduan dalam perkawinannya.

Rencana Ordonansi yang dibuat oleh pemerintah kolonial selanjutnya ditawarkan kepada organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, seperti organisasi perempuan maupun organisasi Islam. Secara umum organisasi Islam menolak rencana Ordonansi yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Organisasi Islam menolak Ordonansi tersebut karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Di dalam hukum Islam seorang lelaki diperbolehkan memperisteri lebih dari satu perempuan, tetapi dalam hukum perkawinan sipil Barat seorang lelaki dilarang melakukan poligami. Hal tersebut yang mengakibatkan munculnya beberapa penolakan dari beberapa organisasi.

Penolakan pertama datang dari perkumpulan Nahdatul Ulama, yaitu ketika organisasi tersebut melaksanakan kongres pada 19-24 Juni 1937. Selanjutnya disusul oleh Partai Sarekat Islam Indonesia pada Juli 1937, penolakan

tersebut diwujudkan dengan dibentunya Barisan Penjadar Sjarekat Islam yang diketuai oleh Haji Agus Salim. Selain itu terdapat beberapa partai nasionalis yang menentang rencana tersebut, seperti Parindra dan Pasundan yang secara langsung menolak rencana tersebut. Banyaknya penolakan yang datang dari beberapa organisasi dan kurangnya dukungan organisasi yang menerima Ordonansi tersebut maka pemerintah Hindia Belanda menarik kembali rancangan tersebut.

Sebagai seorang perempuan Maria Ullfah pada dasarnya menyetujui rancangan Ordonansi yang ditawarkan pemerintah kolonial tersebut. Menurut Maria Ullfah rancangan Ordonansi yang ditawarkan pemerintah tersebut sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan, tetapi sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa maka Maria Ullfah mengurungkan niatnya untuk mendukung rancangan tersebut. Maria Ullfah memahami rancangan Ordonansi yang ditawarkan pemerintah dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa yang sedang berjuang melawan penjajahan. Maria Ullfah pun sadar ketika persatuan dan kesatuan bangsa pecah maka pihak pemerintah kolonial yang akan mendapatkan keuntungan. Bagi Maria Ullfah mengorbankan suatu kemenangan kecil berupa perbaikan nasib kaum perempuan lebih baik daripada mengorbankan cita-cita besar bangsa yaitu kemerdekaan Indonesia.

Setelah permasalahan “Ordonansi Perkawinan yang Tercatat” mereda, maka usaha untuk memajukan kedudukan perempuan dalam hukum Islam kembali diperjuangkan. Sebagai upaya untuk memperjuangkan kembali kedudukan perempuan maka pada akhir tahun 1937 di Jakarta didirikan Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia (KPKPAI). Tujuan

dibentuknya KPKPAI adalah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perkawinan. Selanjutnya pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga komite tersebut diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP). KPKPAI merupakan cikal bakal dibentuknya BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) di masa Indonesia telah mencapai kemerdekaan.

Menjalani hidup sebagai perempuan muda yang berpikiran maju tidak membuat Maria Ullfah lupa akan kehidupan asmaranya. Meskipun sibuk dengan urusan pergerakan nasional, Maria Ullfah sempat memiliki hubungan dekat dengan beberapa teman lelaki. Pada saat menempuh studi di Leiden Maria Ullfah tidak pernah memperlihatkan suatu hubungan dengan lelaki. Sahabat Maria Ullfah yang bernama Siti Soendari mengisahkan tentang kehidupan pribadi Maria Ullfah yang sangat tertutup. “Ietje juga sering ikut ke pesta mahasiswa tetapi tampaknya dia tidak pernah tertarik kepada kaum laki-laki. Sikapnya tertutup dan dia tidak pernah menceritakan perasaannya tentang laki-laki kepada Siti Soendari, sekalipun mereka lama hidup serimah”, tulis Santo Koesoebjono dalam biografi ibunya, yaitu Siti Soendari.<sup>29</sup> Sifat tertutup Maria Ullfah disebabkan oleh kesibukannya dalam studi, selain itu Maria Ullfah telah berjanji kepada Raden Mohammad Achmad untuk menyelesaikan studinya secepat mungkin.

Setelah kembali ke Hindia Belanda dan bergabung dalam organisasi pergerakan bangsa, Maria Ullfah mulai memiliki kedekatan dengan beberapa pria seperti Adnan Kapau Gani, Hindromartono, SH. dan Santoso Wirodihardjo, SH.

---

<sup>29</sup> Santo Koesoebjono & Solita Koesoebjono-Sarwono, *op.cit.*, hlm. 56.

Adnan Kapau Gani adalah seorang pemuda tampan yang pernah menjadi bintang film, tingkah lakunya sedikit ugal-ugalan dan cenderung bersikap terus-terang tanpa basa-basi, tetapi ia yang paling flamboyan diantara ketiga teman laki-laki Maria Ullfah. Sikap terus-terang Adnan Kapau Gani ditunjukkan ketika ia datang ke rumah Maria Ullfah di Kuningan untuk merayakan lebaran bersama dengan keluarga Mohammad Achmad. Dengan halus dan bijaksana Maria Ullfah menjelaskan kepada Adnan Kapau Gani tentang perasaannya yang sebenarnya, Maria Ullfah tidak memiliki perasaan khusus kepadanya dan hanya menganggapnya sebagai sahabat. Hindromartono, SH adalah seorang yang sangat cerdas, berpikiran tajam dan seorang pejuang kebangsaan yang gigih, beraliran politik yang agak ke “kiri”. Hindromartono, SH dan Maria Ullfah sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi bersama.

Dari ketiga teman dekatnya tersebut akhirnya Maria Ullfah memilih Santoso Wirodihardjo, SH sebagai pendamping hidupnya. Dia adalah seorang Sarjana Hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda. Maria Ullfah berkenalan dengan Santoso ketika mereka bersama menjadi guru pada perguruan Muhammadiyah. Santoso Wirodihardjo, SH berasal dari keluarga priayi, ayahnya adalah seorang dokter Jawa, kakak perempuannya yang sulung menikah dengan Margono Djojohadikusumo pendiri Bank Negara Indonesia tahun 1946. Saudara laki-lakinya menjadi seorang Doktor ekonomi di Rotterdam dan saudara perempuan yang lainnya menikah dengan Cindarbumi seorang perintis pers nasional yang berasal dari Lampung. Maria Ullfah memilih Santoso karena mereka berasal dari lingkungan yang sama, sehingga keduanya sudah saling

memahami tanpa harus banyak berbicara. Santoso Wirodihardjo, SH menikahi Maria Ullfah di Kuningan pada tanggal 28 Februari 1938.<sup>30</sup> Sejak saat itu nama Maria Ullfah lebih dikenal dengan nama Ny. Maria Ullfah Santoso. Pada awalnya Maria Ullfah dan Santoso tinggal sebuah rumah di Salemba Tengah, selanjutnya mereka pindah ke sebuah rumah di jalan Nieuwe Laan (saat ini bernama jalan Kramat III atau jalan Jambrut), dan akhirnya menetap di jalan Guntur No. 49.<sup>31</sup>

Sebagai upaya untuk mengukur seberapa besar perkembangan penggunaan bahasa Indonesia pasca Sumpah Pemuda tahun 1928, maka diadakan suatu kegiatan yaitu Kongres Bahasa Indonesia kedua. Atas usul Muh. Yamin dan beberapa kawannya, maka diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang berlangsung di kota Surakarta pada 25-28 Juni 1938. Kongres tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia memang menghendaki bahasa persatuan, yang berbeda dengan yang dicita-citakan oleh Nieuwenhuis.<sup>32</sup> Pada masa kolonial bahasa Belanda merupakan bahasa yang dianggap sebagai satu-satunya jalan

---

<sup>30</sup> Lihat tanggal-tanggal penting, Gadis Rasid, *loc.cit.*,

<sup>31</sup> Foto Rumah Maria Ullfah di jalan Guntur 49, dapat dilihat dalam lampiran 3, hlm. 211.

<sup>32</sup> Nieuwenhuis adalah seorang Belanda yang menjadi promotor politik bahasa kolonial. Politik bahasa kolonial adalah upaya pemerintah Belanda yang diharuskan untuk memberikan pengajaran tentang Bahasa Belanda kepada masyarakat Indonesia agar tercipta hubungan yang baik diantara negara jajahan dan negara penguasa (Belanda), sasaran politik tersebut biasanya adalah golongan pemimpin dan lapisan atas masyarakat Indonesia. Menurut Nieuwenhuis salah satu alat untuk melangsukan hubungan yang baik antara Belanda dan Indonesia adalah bahasa Belanda, karena penyebaran pikiran melalui bahasa akan memberikan kepuasan rohani terhadap bangsa Indonesia dan akibatnya akan memperkuat hubungan antara Belanda dan Indonesia. Tujuan utama dari politik tersebut adalah untuk mempertahankan kepentingan Belanda di Indonesia di masa depan dan sebagai upaya mengangkat derajat Belanda di mata negara-negara asing, Slamet Muljana, *op.cit.*, hlm. 326-327.



untuk maju dan mendapatkan kehidupan yang layak. Mengerti bahasa Belanda pada masa kolonial dianggap sebagai ukuran intelektualitas seseorang, karena orang tersebut akan dipandang terpelajar. Pada dasarnya kaum penjajah tidak membutuhkan kepandaian orang Indonesia karena sebagai seorang pegawai, orang Indonesia hanya menjalankan perintah dari penguasa (Belanda). Bagi kaum penjajah, seorang pegawai dikatakan layak adalah jika ia memahami apa yang dikatakan dan diperintahkan tuannya (orang Belanda).

Pada saat Kongres Bahasa Indonesia kedua, Maria Ullfah bersama Soegiarti diajak oleh Muh. Yamin untuk bergabung dalam kepanitiaan. Maria Ullfah dan Soegiarti dipercaya sebagai bendahara acara tersebut. Kongres Bahasa Indonesia kedua diketuai oleh Muh. Yamin, wakil ketua diajabat oleh Takdir Alisyahbana, dan sebagai anggotanya adalah Pandu Wiguna. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan pergerakan nasionalis lainnya, pelaksanaan kongres tersebut tidak terlepas dari pengawasan PID yang setiap saat mencatat dan melaporkan hasil kongres. Ketika acara berlangsung Pandu Wiguna ditangkap oleh PID, karena suatu hal yang dinamakan *spreekdelich* yaitu ucapan politik yang dianggap berbahaya bagi ketentraman masyarakat. Maria Ullfah dan Soegiati pun dipanggil oleh PID untuk memberikan keterangan tentang kegiatan kongres.

Ditangkapnya Pandu Wiguna oleh PID dan untuk menghindari akibat-akibat negatif maka kegiatan kepanitiaan dihentikan. Meskipun demikian kegiatan kongres tetap dilaksanakan dengan penyelenggaranya adalah Balai Pustaka yang merupakan perusahaan penerbitan buku-buku Melayu milik pemerintah Hindia Belanda. Kongres tersebut dihadiri oleh Prof. Hoesein Djajadiningrat, Prof.

Poerbacaraka, dan Sadarjoen sebagai penyelenggara. Meskipun Maria Ullfah dan Soegiarti tidak lagi tergabung dalam kepanitiaan, tetapi nama keduanya masih dicantumkan sebagai anggota Panitia.

Kongres Perempuan Indonesia ke III dilaksanakan di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938 dan dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja.<sup>33</sup> Maksud dari terselenggaranya kongres adalah sebagai upaya merapatkan hubungan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia, untuk menguatkan usaha memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Upaya tersebut merupakan wujud dari usaha untuk merapatkan kembali hubungan antara organisasi-organisasi perempuan Indonesia yang sempat memanas akibat rencana Ordonansi pernikahan tercatat yang ditawarkan pemerintah kolonial.

Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia yang dibentuk pada akhir 1937 akhirnya diubah menjadi Badan Kongres Perempuan Indonesia dengan nama Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga. Tugasnya adalah meneruskan Biro Konsultasi yang dibentuk dalam Kongres Perempuan Indonesia ke II dan KPKPAI, serta mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun suatu rencana Undang-Undang Perkawinan bagi umat Islam. Selain itu, tugas BPPIP adalah untuk memberi nasehat dan membantu perempuan yang mendapat kesulitan dalam perkawinan termasuk menyusun talak-taklik yang memungkinkan

---

<sup>33</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 50.

perempuan meminta cerai kalau suami mengambil isteri lain atau bila timbul perselisihan yang tidak dapat didamaikan.

Maria Ullfah yang pada masa itu menjabat sebagai ketua komite penyelidik Undang-Undang Perkawinan menyampaikan pidatonya dalam kongres selama dua jam. Maria Ullfah memulai pidatonya dengan menyampaikan laporan detail tentang gerakan perempuan di negara-negara Islam. Penerapan *Swiss Code* oleh Turki pada 1926 telah memisahkan antara hukum perkawinan dan agama. Pemisahan yang terjadi bukan menjadikan Turki sebagai negara yang menolak agama, melainkan buktik bahwa di Turki agama telah menjadi urusan individu masing-masing. Setelah Maria Ullfah berbicara mengenai tedensi baru di Mesir dan India, selanjutnya ia menyampaikan masalah yang terjadi di Indonesia. Maria Ullfah menyampaikan masalah mengenai proyek Ordonansi yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Berdasarkan proyek tersebut, Maria Ullfah mencatat bahwa sebagian besar penolakan dikarenakan adanya pasal 13 ayat 7, klausal yang melarang seseorang untuk berpoligami apabila pernikahannya telah dicatat oleh pegawai sipil di kantor pendaftaran. Selain itu, penentangan juga terjadi karena adanya klausa yang menyatakan proyek menggantikan hak taklik dengan hak cerai melalui keputusan pengadilan.

Maria Ullfah kembali mengutip sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-nisa' ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau buak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-nisa', ayat 3)

Berdasarkan ayat di atas, Islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum ayat tersebut turun, poligami telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw, dalam ayat tersebut dijelaskan pula bahwa Islam membatasi seseorang menikahi empat perempuan saja. Selain itu, dijelaskan pula bahwa syarat wajib seseorang melakukan poligami adalah adil, adil yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah adil dalam meladeni isteri, seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.<sup>34</sup> Menurut Maria Ullfah Al-Qur'an sebagai firman Tuhan memegang peranan penting dalam setiap sendi kehidupan manusia, karena Al-Qur'an berlaku untuk setiap orang dan sepanjang zaman. Maria Ullfah kurang setuju dengan pendapat seseorang yang menyamakan poligami diabad ke tujuh dengan poligami yang berlaku pada abad ke dua puluh. Bagi Maria Ullfah poligami yang dilakukan Nabi Muhammad saw pada masanya adalah upaya untuk menyelamatkan derajat perempuan, sedangkan pada abad kedua puluh kiranya kurang tepat tujuan poligami tersebut. Maria Ullfah sendiri sangat kecewa dengan pernyataan golongan orang yang mendukung poligami bahwa poligami adalah obat untuk melawan jumlah perempuan yang berlebih. Bagi Maria Ullfah sangat jelas disebutkan bahwa tujuan dari surat An-nisa' ayat 3 adalah untuk melindungi perempuan. Sehingga jika seorang pria tidak dapat berlaku adil maka dia tidak berhak untuk melukai perasaan perempuan dengan melakukan poligami.

---

<sup>34</sup> Lihat terjemahan QS. An-nisa' ayat 3.

Menurut Maria Ullfah Undang-Undang Perkawinan harus dijalankan beriringan dengan Al.Quran, karena sebenarnya banyak orang yang kurang memahami Al.Qur'an seutuhnya dan banyaknya pentafsiran yang berbeda tentang isi Al.Qur'an yang membuat orang sering salah mengartikan maksudnya. Pendapat yang disampaikan Maria Ullfah dalam kongres tersebut disetujui oleh semua peserta kongres. Kongres memutuskan untuk mendirikan suatu Komisi yang ditugaskan untuk membuat rancangan peraturan perkawinan. Anggota Komisi tersebut adalah Mr. Maria Ullfah, Ny. Datuk Tumenggung (PIPB), Ny. S. Sumadi (PSII wanita), Ny. Zahara Gunawan (Sarekat Isteri Jakarta), Ny. M. Wiria Atmaja (PASI), Ny. Kasman (JIBDA) dan seorang lagi dari Isteri Indonesia Jakarta.<sup>35</sup> Komisi tersebut ditugaskan untuk menjalankan tugas selama setahun dan hasil dari komisi tersebut akan dibahas dalam kongres selanjutnya.

Selain membahas tentang poligami, Maria Ullfah menyampaikan pula tentang instrument paling efisiensi dalam emansipasi perempuan Indonesia yaitu pendidikan di sekolah, bagi Maria Ullfah pendidikan adalah hal yang wajib bagi perempuan. Pendidikan yang mumpuni bagi seorang perempuan akan dapat membantunya dalam menjalani kehidupannya nanti, baik sebelum menikah dan sesudah menikah. Maria Ullfah dalam Majalah *Penjebar Semangat* volume 34 terbitan tahun 1940, menyatakan sebanyak 93% kaum perempuan di Indonesia masih mengalami buta huruf.<sup>36</sup> Kurangnya lembaga sekolah untuk kaum

---

<sup>35</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>36</sup> Maria Ullfah Santoso, "Kemajuane Wanita Indonesia Bakda Jamane R.A Kartini", *Penjebar Semangat*, volume 34, 20 April 1940, hlm. 4.

perempuan dan tingkat ekonomi rakyat yang kurang menjadi salah satu faktor rendahnya pendidikan di Indonesia. Menurut Maria Ullfah jika bangsa Indonesia ingin maju, maka bukan hanya kaum laki-lakinya yang berpendidikan tetapi kaum perempuan harus ikut dimajukan dengan pendidikan.

Menurut Maria Ullfah Undang-Undang Perkawinan sangat diperlukan bagi umat muslim di Indonesia, karena pada masa kolonial umat Islam belum memiliki undang-undang tertulis seperti golongan lainnya. Pidato Maria Ullfah dalam Kongres Perempuan ke III merupakan laporan pertama yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti tentang masalah perkawinan, selain itu pidato Maria Ullfah tersebut adalah pidato yang pertama memberikan nasehat nyata tentang perkembangan kehidupan sosial dan keluarga perempuan Indonesia.<sup>37</sup> Selain itu, pidato Maria Ullfah yang disampaikan dalam kongres tersebut memberi landasan bagi diskusi-diskusi tentang perempuan dimasa selanjutnya dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan peraturan perkawinan menurut Hukum Islam.

Sejak dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, kaum perempuan yang tergabung dari beberapa organisasi perempuan telah mengajukan tuntutan kepada *Raad* Agama untuk mencantumkan talak-taklik dalam buku akta nikah. Talak-Taklik adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat pada saat pernikahan, dimana dicantumkan alasan-alasan apa yang dapat digunakan perempuan untuk meminta perceraian.<sup>38</sup> Dengan adanya talak-taklik

---

<sup>37</sup> Stuers. Cora Vreede-De, *op.cit.*, hlm. 171.

<sup>38</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 57.

tersebut seorang isteri tidak perlu menggantungkan keputusan talak kepada suami. Sewaktu-waktu jika terjadi pelanggaran oleh suami sebagaimana disebutkan dalam talak-taklik, isteri dapat mengajukan gugatan cerai.

Melalui BPPIP Maria Ullfah gencar memperjuangkan pencantuman talak-taklik dalam akta nikah. Dalam beberapa kesempatan, Maria Ullfah selalu menyampaikan gagasannya mengenai pentingnya pencantuman talak-taklik dalam akta nikah. Bahkan melalui majalah Isteri Indonesia, Maria Ullfah menuliskan talak-taklik menurut versinya sendiri. Butir-butir talak-taklik menurut versi Maria Ullfah sendiri terdiri atas Sembilan butir, yaitu:<sup>39</sup>

1. Meninggalkan isteri saya enam bulan berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya.
5. Atau saya berzinah.
6. Atau jika saya menjadi pemabuk, pemadat, penjudi.
7. Atau saya dihukum karena kejahatan dengan hukuman dua tahun atau lebih.
8. Atau jika saya beristri (mengambil isteri) lagi.
9. Atau jika ada perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*).

Talak-taklik menurut Maria Ullfah tersebut diharapkan akan dibacakan oleh pengantin pria pada saat perkawinan berlangsung. Talak-taklik versi Maria Ullfah memiliki sedikit perbedaan dengan talak-taklik yang dibuat pada masa Kongres Perempuan Indonesia pertama, talak-taklik versi kongres terdiri atas enam butir talak-taklik, yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Maria Ullfah Subadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan suatu Pengalaman Ceramah tanggal 28 Februari 1981 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hlm. 12-13.

<sup>40</sup> Gadis Rasid, *loc.cit.*,

1. Jika suami meninggalkan isteri selama enam bulan berturut-turut.
2. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah selama tiga bulan.
3. Jika suami memukul isteri.
4. Jika suami berzinah.
5. Jika suami mengambil isteri lagi.
6. Jika terdapat perselisihan yang tidak terselesaikan.

Kedua talak-taklik diatas pada dasarnya hampir sama, yaitu memiliki tujuan agar nasib kaum perempuan dapat terlindungi dan suami tidak dapat berlaku sewenang-wenang kepada isteri. Perjuangan Maria Ullfah dalam memperbaiki nasib kaum perempuan lewat pencantuman talak-taklik memang banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, bahkan Maria Ullfah sempat dituduh hendak mengubah hukum Islam yang telah dibuat Tuhan. Surat Kabar *Pandji Poestaka* terbitan 3 Februari 1940 menjelaskan tentang kritikan dari kalangan Islam kepada Maria Ullfah.

Meskipun perjuangannya banyak mendapat kritikan, tetapi dengan keyakinan bahwa Islam tidak menghendaki perempuan tersakiti maka Maria Ullfah tetap berjuang. Keyakinan dan cita-cita Maria Ullfah pun terbukti, talak-taklik menjadi kebiasaan pernikahan Islam saat ini. Diceritakan dalam biografi Maria Ullfah bahwa ada seorang anak dokter terkenal dari Jakarta yang menikah dengan mencantumkan enam butir talak-taklik dalam surat nikah. Penghulu Gambir (saat itu hanya ada satu penghulu di Batavia) yang memimpin jalannya pernikahan mengatakan bahwa pasangan pengantin tersebut termasuk golongan Maria Ullfah.

Nama Maria Ullfah yang mulai dikenal oleh beberapa tokoh pergerakan membuatnya menjadi salah satu *icon* perempuan Indonesia dari golongan priyayi



yang aktif dalam pergerakan nasional. Latar belakang pendidikan yang mumpuni membuat Maria Ullfah sering dipercaya menjadi pembicara atau perwakilan perempuan dalam beberapa kegiatan. Pada Agustus 1938 Maria Ullfah dicalonkan sebagai perwakilan perempuan Indonesia dalam *volksraad*.<sup>41</sup> Maria Ullfah dianggap paling pantas mewakili perempuan Indonesia dalam *volksraad* karena ia adalah perempuan Indonesia pertama yang lulus sebagai sarjana hukum dari Universitas Leiden. Kemampuan dalam bidang hukum yang mumpuni menjadi faktor penting terpilihnya Maria Ullfah, karena dengan kemampuannya dibidang hukum akan sangat membantu dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Pada tahun yang sama muncul sebuah protes dari organisasi perempuan tentang hak pilih perempuan untuk menjadi anggota *volksraad*. Protes tersebut dikarenakan keputusan pemerintah Belanda yang kembali memilih seorang perempuan Belanda, dan bukan Maria Ullfah yang telah dipilih organisasi perempuan Indonesia untuk menjadi anggota *volksraad*. Hal tersebut merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada 1935 pemerintah kolonial memilih seorang perempuan Belanda menjadi anggota *volksraad*. Keputusan pemerintah kolonial tersebut mengundang banyak protes dari beberapa organisasi perempuan Minang, seperti perempuan Sumatra dan Sarikat Kaum Ibu Sumatra. Hal yang sama dilakukan beberapa organisasi perempuan Indonesia lainnya yang pada tanggal 6 Agustus 1939 melakukan protes melawan keputusan pemerintah kolonial tersebut. Protes demi protes dilancarkan kepada pemerintah kolonial,

---

<sup>41</sup> Stuers. Cora Vreede-De, *op.cit.*, hlm. 144.

akhirnya pada malam ketika Perang Pasifik hak pilih bagi perempuan diberikan oleh pemerintah kolonial.

### **B. Maria Ullfah pada masa Pendudukan Jepang**

Kekalahan Belanda dari Jerman pada bulan Mei 1940, menjadi awal kemunduran kejayaan Belanda di negara jajahannya Hindia Belanda. Hancurnya kota Rotterdam akibat serangan pesawat pembom Jerman mengakibatkan Belanda terpaksa menyerah. Terbakarnya kota Rotterdam serta tewasnya 900 warga Rotterdam membuat Kepala Staf Pasukan Belanda, Jenderal Winkelman memutuskan bahwa seluruh Belanda akan menyerah kepada Jerman, kecuali provinsi Zeeland.<sup>42</sup> Keputusan menyerah Jenderal Winkelman tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas hancurnya kota-kota lain di Belanda (Utrecht dan Amsterdam), selain itu bagi Jenderal Winkelman nasib rakyat sipil jauh lebih berharga dibandingkan keinginannya untuk bertahan.

Pendudukan Jerman atas Belanda memaksa Ratu Wilhelmina beserta pemerintahannya melarikan diri ke Inggris. Di Inggris Ratu Wilhelmina membentuk suatu pemerintah pelarian Belanda yang berpusat di kota London. Dari London pemerintah pelarian Belanda mengatur negara jajahannya Hindia Belanda hingga Maret 1942, saat Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Keikutsertaan Jepang dalam Perang Dunia II merupakan wujud pembuktian Jepang yang merupakan negara Asia, patut diperitungkan di mata dunia. Jepang

---

<sup>42</sup> Fernando R. Srivanto, *das Panzer Strategi dan Taktik Lapis Baja Jerman 1935-1945*, Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2008, hlm. 67.

yang terikat oleh perjanjian dengan Jerman bergabung dalam Blok Fasis bersama Jerman dan Italia.

Kemenangan tentara Jepang atas Rusia di Selat Simonoseki pada tahun 1904, membangkitkan kepercayaan diri orang Jepang dan orang Asia pada umumnya.<sup>43</sup> Jepang mulai tumbuh menjadi negara maju yang menyamai negara-negara di Eropa. Keberadaan Jepang sebagai negara Asia pertama yang ikut secara langsung terlibat dalam Perang Dunia II membuat namanya sejajar dengan negara Eropa lainnya. Jepang yang berusaha membangun suatu imperium di Asia masih terganjal dengan adanya pangkalan armada militer milik Amerika Serikat di Pasifik. Sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Hancurnya pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor telah menyebabkan meletusnya Perang di Pasifik.

Jepang yang telah berhasil menghancurkan Pearl Harbor mulai menginvasi wilayah-wilayah di Selatan, salah satunya adalah Hindia Belanda. Pendaratan pertama Jepang di Hindia Belanda adalah di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942.<sup>44</sup> Satu-persatu wilayah Hindia Belanda yang memiliki sumber daya minyak dan karet berhasil dikuasi oleh tentara Jepang. Selain itu, wilayah-wilayah lain di Hindia Belanda yang menjadi tempat penting pemerintahan kolonial berhasil dikuasai Jepang. Kekalahan pemerintah

---

<sup>43</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>44</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*, cet. 2. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 3.

kolonial dari Jepang mengakibatkan banyak pasukan tentara Belanda yang harus mengungsi ke Australia dan sisanya banyak yang ditawan tentara Jepang.

Pihak Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Dalam pertemuan tersebut pihak Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Penandatanganan dokumen penyerahan tanpa syarat oleh kedua pihak menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Kemenangan Jepang atas Belanda disambut baik oleh rakyat Indonesia, rakyat berbondong-bondong menyambut kedatangan tentara Jepang dengan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.<sup>45</sup> Sikap rakyat tersebut dibiarkan saja oleh tentara Jepang, hal ini karena Jepang ingin merebut simpati dari bangsa Indonesia. Bahkan tentara Jepang mengenalkan dirinya kepada rakyat Indonesia sebagai “saudara tua” Indonesia.

Kepercayaan masyarakat Jawa tentang adanya ramalan Jayabaya membuat masyarakat menyambut dengan gembira kedatangan tentara Jepang yang dianggapnya sebagai penolong. Ramalan tersebut mengatakan bahwa pada suatu waktu bangsa Jawa akan dikuasai oleh orang-orang *kate* (pendek), yang hanya akan tinggal selama seumur jagung. Setelah itu, bangsa Indonesia akan diperintah oleh Ratu Adil (dipercaya sebagai pemimpin yang sebenarnya). Orang-orang *kate* yang dimaksud dalam ramalan tersebut dipercaya oleh masyarakat

---

<sup>45</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid II*. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), hlm. 6.

sebagai tentara Jepang. Selain itu, rakyat percaya tentara Jepang hanya tinggal di Indonesia selama umur jagung yaitu kurang lebih tiga bulan saja.

Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada tentara Jepang mulai menghilang seiring dengan bertambahnya jumlah tentara Dai Nippon yang ikut campur dalam pemerintahan. Pengibaran bendera merah putih dan nyanyian lagu Indonesia Raya yang pada awalnya diperbolehkan mulai dilarang oleh pemerintah militer Jepang. Pemerintah militer Jepang hanya memperbolehkan pengibaran bendera Jepang yaitu *Hi No Manu* dan nyanyian lagu kebangsaan Jepang *Kimi Gayo*. Selain itu, pemerintah militer Jepang melakukan penyegelan terhadap radio dan pelarangan terbit surat kabar. Pemerintah militer Jepang sengaja menutup semua akses informasi bagi rakyat Indonesia agar tidak mendengar berita dari dunia luar.

Pemerintah militer Jepang membekukan semua kegiatan organisasi politik yang ada di Indonesia. Pembekuan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membendung semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Pemerintah militer Jepang menerapkan sistem fasisme dan menerapkan garis politik pemerintah sebagai satu-satunya aliran yang harus ditaati.<sup>46</sup> Semua kegiatan politik rakyat Indonesia dibatasi oleh pemerintah, selain itu pemerintah militer Jepang juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan rakyat Indonesia. Semua kegiatan-kegiatan politik rakyat diawasi oleh polisi rahasia Jepang yang disebut *Ken Pei Tai*. Hampir sama dengan PID bentukan pemerintah kolonial, *Ken Pei Tai* oleh kaum pergerakan nasional dianggap pula sebagai momok pergerakan,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

karena setiap orang yang dianggap menentang pemerintah maka ia akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.

Organisasi masa pertama bentukan pemerintah militer Jepang adalah Gerakan Tiga A.<sup>47</sup> Gerakan Tiga A didirikan pada bulan April 1942 dan diketuai oleh Mr. Samsudin. Gerakan Tiga A adalah doktrin politik pemerintah militer Jepang yang terdiri atas Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Kurangnya simpati dari rakyat mengakibatkan Gerakan Tiga A dibubarkan dan pemerintah militer Jepang kembali membentuk organisasi baru yang diberi nama Poetera (Poesat Tenaga Rakjat) pada Maret 1943. Sebagai upaya untuk menarik simpati dari rakyat, pemerintah mulai menggunakan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Para tokoh tersebut diharapkan dapat menggerakkan massa untuk usaha perang Pasifik dan membangkitkan perasaan anti-Barat serta anti bangsa kulit putih.

Para tokoh pergerakan nasional yang ditahan atau diasingkan pemerintah Belanda dibebaskan oleh Jepang. Para tokoh tersebut diajak untuk bekerjasama dengan pemerintah militer Jepang. Meskipun para tokoh pergerakan nasional sejak awal sebelum terjadinya perang telah mengambil sikap antifasisme Jepang. Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang dipilih oleh pemerintah militer Jepang sebagai pemimpin Poetera dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Anggota Empat Serangkai terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara,

---

<sup>47</sup> Wieringa. Saskia Eleonora, *op.cit.*, hlm. 147.

dan K.H Mas Mansur.<sup>48</sup> Mereka dipilih oleh pemerintah militer Jepang karena sosok mereka yang lebih dikenal rakyat Indonesia.

Organisasi Poetera di pusat atau di daerah memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk ikut serta di dalamnya. Kaum perempuan yang tergabung dalam Poetera dikenal dengan nama “Barisan Pekerja Perempuan Poetera”.<sup>49</sup> Ny. Soenario Mangunpuspito dipilih sebagai ketua pimpinan pusat Barisan Pekerja Perempuan Poetera, dengan dibantu oleh Ny. Sunaryati Sukemi, Ny. Sukanti Suryocondro, S.K Trimurty, Ny. Burdah Yusupadi. Pada saat itu Maria Ullfah diminta untuk duduk dalam Majelis Pertimbangan Poetera, sebagai satu-satunya perempuan. Dipilihnya Maria Ullfah sebagai satu-satunya perempuan dalam majelis tersebut tidak dijelaskan dalam beberapa *literature* buku, tetapi dilihat dari pendidikan Maria Ullfah yang mumpuni serta perannya dalam pergerakan perempuan dapat dijadikan faktor terpilihnya Maria Ullfah. Organisasi Poetera yang oleh pemerintah militer Jepang diharapkan dapat menarik simpati rakyat, pada akhirnya dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai alat untuk mempersiapkan mental rakyat menuju kemerdekaan Indonesia. Menyadari hal tersebut pemerintah militer Jepang akhirnya membubarkan organisasi Poetera pada 1 Maret 1944 dan mendirikan *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebangkitan Jawa).

---

<sup>48</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>49</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 59.

Pada masa pendudukan Jepang semua organisasi perempuan yang telah ada sejak masa kolonial dibubarkan. *Fujinkai* adalah satu-satunya organisasi perempuan yang boleh berdiri pada saat itu. *Fujinkai* diketuai oleh isteri-isteri kepala daerah yang selanjutnya menggerakkan tenaga-tenaga perempuan di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, pada saat *Jawa Hokokai* didirikan maka dibentuk pula departemen perempuan dalam *Jawa Hokokai* yang disebut *Jawa Hokokai Fujinkai*.<sup>50</sup> Organisasi-organisasi *Fujinkai* daerah yang sudah ada dilebur menjadi satu dengan *Jawa Hokokai Fujinkai*. Tujuan umum *Fujinkai* adalah untuk memobilisasi tenaga kerja perempuan guna mendukung tentara Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Para perempuan yang tergabung dalam *Fujinkai* di lapangan pada kenyataannya bertugas untuk mengobati tentara Jepang yang terluka akibat perang, menjahit kaos kaki yang sobek, menghibur tentara Jepang dan Peta. Selain itu, kaum perempuan *Fujinkai* juga mendapatkan pelatihan seperti kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan bahan pangan dan mendirikan dapur-dapur umum.

Organisasi perempuan pada masa Jepang tidak memusatkan perhatian pada usaha perbaikan kedudukan perempuan, segala aktivitasnya dipusatkan untuk kepentingan Jepang dalam perang Pasifik. Bahkan *Fujinkai* sebagai satu-satunya organisasi perempuan yang ada, tidak melakukan perlawanan terhadap praktek *jugun ianfu*. Hal tersebut dikarenakan praktek *jugun ianfu* (budak seks) dilakukan secara tertutup, berbeda dengan *romusha* (kerja paksa) yang dilakukan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 60.



secara terbuka. Praktek *jugun ianfu* tersebut baru terkuak setelah pemerintah Jepang kalah dalam perang Pasifik.

Maria Ullfah yang pada awalnya tergabung dalam Poetera memutuskan untuk tidak bergabung dengan *Fujinkai* karena ia tidak suka dengan cara memerintah kaum militer Jepang yang sangat keras. Selain itu, Maria Ullfah tidak bersimpati dengan pemerintah militer Jepang yang fasis, sama halnya dengan Sjahrir yang anti fasis. Pada masa pendudukan Jepang, Maria Ullfah memilih untuk bekerja di Departemen Kehakiman (*Shikooku*) yang dipimpin Prof. Dr. Mr. Soepomo. Bersama dengan Nani Soewondo, Maria Ullfah ditugaskan untuk menterjemahkan undang-undang dan peraturan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris, agar dapat dimengerti oleh orang-orang Jepang. Sedangkan suami Maria Ullfah yang pada masa kolonial bekerja sebagai pegawai pada Departemen Pendidikan Hindia Belanda, pada masa pendudukan Jepang pindah bekerja pada Departemen Dalam Negeri (*Naimobu*) yang mengurus masalah pendidikan dan urusan agama.

### **C. Peran Maria Ullfah pada masa menjelang Kemerdekaan**

Jatuhnya pangkalan laut Truk di kepulauan Carolina pada bulan Desember 1944 membuat kekuatan militer Jepang di Pasifik semakin lemah. Pulau Truk adalah pusat Angkatan Laut Jepang di Pasifik yang menghubungkan pangkalan laut negara induk Jepang dengan pulau-pulau di Pasifik. Sehingga dengan dikuasanya pulau-pulau yang terletak di antara Filipinan dan Truk oleh Angkatan Laut Amerika membuat hubungan pangkalan laut negara induk Jepang

dengan pulau-pulau di Pasifik terputus. Kekalahan Jepang di Pasifik melatar belakangi pemberian hadiah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari Jepang.

Pada tanggal 7 September 1944 di dalam Sidang Istimewa ke-85 *Teikoku Ginkai* (Parlemen Jepang) di Tokyo, Perdana Menteri Kaiso mengumumkan tentang pendirian Pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) akan dimerdekan suatu hari nanti.<sup>51</sup> Semakin terjepitnya Angkatan Perang Jepang menjadi latar belakang dikeluarkannya pernyataan “Janji Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari” oleh pemerintah Jepang. Jatuhnya beberapa pulau penting milik Angkatan Perang Jepang, khususnya Pulau Saipan semakin memperburuk kondisi masyarakat Jepang yang mulai kehilangan rasa percaya diri. “Janji Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari” merupakan langkah yang digunakan pemerintah Jepang untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Selain itu, cara tersebut diharapkan dapat mengubah pemikiran rakyat Indonesia bahwa sekutu bukan pembebas rakyat, tetapi penyerbu di negara merdeka.

Dikuasainya daerah-daerah penghasil minyak di Indonesia, seperti Tarakan dan Balikpapan oleh pemerintah sekutu membuat Pemerintah militer Jepang di Jawa, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Junbi Cosokai* pada 1 Maret 1945.<sup>52</sup> *Dokuritsu Junbi Cosokai* oleh bangsa Indonesia lebih dikenal dengan nama Badan

---

<sup>51</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 120-121.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pembentukan BPUPKI merupakan langkah kongkret yang ditempuh pihak Jepang sebagai upaya awal untuk memenuhi janji memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tujuan dari pembentukan BPUPKI adalah untuk memikirkan dan merencanakan segala sesuatu yang menyangkut kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Tepat pada hari ulang tahun Tenno Heika atau hari raya Tentyoo Setsu yaitu tanggal 29 April 1945 BPUPKI resmi dibentuk. Berbagai persiapan dilakukan untuk pelaksanaan sidang BPUPKI. Gedung yang akan digunakan untuk tempat peresmian BPUPKI adalah gedung *Chuo Sang In*, yang merupakan gedung peninggalan pemerintah kolonial yang pada zaman Belanda digunakan sebagai tempat sidang Volksraad. Dalam upacara tersebut Kepala Pemerintahan Sipil di Jawa atau *Gunseika* memberi sambutan yang pada dasarnya bermaksud untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai alat untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik.<sup>53</sup> Selain itu, bagi pemerintah Jepang kemenangan atas peperangan melawan sekutu merupakan tugas suci yang harus diemban bersama antara Jepang dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus ikut aktif membantu pemerintah Jepang dalam peperangan di Pasifik melawan sekutu.

Susunan pengurus BPUPKI terdiri atas sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha. Badan perundingan terdiri dari seorang *Kaico* (Ketua), dua orang *Fuku Kaico* (Ketua Muda), enam puluh orang *Iin* (anggota) dan tujuh

---

<sup>53</sup> Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*. (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm. 23.

anggota istimewa (*Tokobetu Iin*) yang terdiri atas orang-orang Jepang.<sup>54</sup> Salah satu hal yang istimewa dalam keanggotaan BPUPKI adalah adanya dua nama perempuan yang menjadi anggota BPUPKI. Kedua nama tersebut adalah Maria Ullfah dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito. Keikutsertaan Maria Ullfah dan Ny. Soenarjo Mangoenpoespito merupakan hal yang membanggakan bagi kaum perempuan Indonesia, karena keduanya memiliki peranan penting dalam rencana pembentukan negara merdeka. Pencantuman azas persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam rancangan Undang-Undang Dasar merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi pergerakan kaum perempuan.

Selama bertugas BPUPKI mengadakan dua kali persidangan, yaitu sidang pertama berlangsung lima hari dari tanggal 28 Mei-1 Juni 1945 dan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10-17 Juli 1945.<sup>55</sup> Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara pembukaan sidang BPUPKI di gedung *Chuo Sangi In*, Jakarta. Agenda dalam upacara pembukaan sidang adalah mendengarkan amanat dari *Saikoo Sikikan*, nasehat dari *Gunseika*, dan pidato dari Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wediodiningrat. Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran bendera Jepang *Hinomaru* yang disusul dengan pengibaran bendera Merah Putih. Peristiwa pengibaran bendera Merah Putih dalam sidang BPUPKI telah membangkitkan semangat para anggota dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>54</sup> Susunan anggota BPUPKI dapat dilihat dalam lampiran 6, hlm. 214.

<sup>55</sup> Lembaga Soekarno-Hatta, *op.cit.*, hlm. 32.

BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Persidangan pertama tersebut dibuka oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat dengan meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Terdapat tiga anggota yang memenuhi permintaan Dr. Radjiman Wediodiningrat yang secara khusus menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Ketiga anggota tersebut adalah Mr. Muh. Yamin, Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Badan Penyelidik selanjutnya membentuk suatu Panitia Kecil yang berjumlah delapan orang dibawah pimpinan Ir. Soekarno. Panitia Delapan tersebut beranggotakan Drs. Muh. Hatta, Soetardjo Kartohadikusumo, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandar Dinata, Muh. Yamin, dan A.A. Maramis. Tugas dari Panitia Delapan adalah menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota yang oleh Ketua telah diminta untuk diserahkan melalui Sekertariat. Selanjutnya, setelah sidang berakhir maka diadakan “reses” selama satu bulan lebih.

Selama masa “reses” sidang Badan Penyelidik, Ir. Soekarno melaporkan bahwa Panitia Kecil pada tanggal 22 Juni 1945 mengadakan pertemuan dengan tiga puluh delapan anggota BPUPKI. Pertemuan tersebut merupakan rapat pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota BPUPKI, pertemuan tersebut telah menampung suara-suara dan usul-usul lisan dari pihak anggota Badan Penyelidik. Dalam pertemuan tersebut dibentuk suatu Panitia Kecil lain yang beranggotakan Sembilan orang yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pemandangan umum para anggota. Kesembilan anggota Panitia Kecil tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Panitia

Sembilan kemudia mengadakan sidang yang menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan hasil persidangan Panitia Sembilan tersebut diberi nama *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta.

Sidang kedua Badan Penyelidik setelah masa “reses” dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Pada sidang tersebut dibahas tentang wilayah negara, persiapan Rancangan Undang-Undang Dasar, dan bentuk negara kesatuan adalah republik. Selain itu, sidang juga membentuk berbagai panitia, yaitu:

1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Ir. Soekarno dengan 18 anggota.
2. Tim Anggota Pembela Tanah Air diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dengan 22 anggota.
3. Badan Keuangan dan Perekonomian diketuai oleh Drs. Moh. Hatta dengan 22 anggota.
4. Panitia Penghalus Bahasa untuk Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Prof. Hosein Djajadiningrat, H. Agoes Salim, dan Prof. Soepomo.<sup>56</sup>

Dari Delapan Belas nama anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar terdapat satu nama perempuan yang menjadi anggotanya, yaitu Maria Ullfah. Maria Ullfah bersama anggota lainnya seperti Mr. A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Poeroebojo, H. Agoes Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Wachid Hasjim, Parada Harahap, Mr. Latuharhary, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mr. Sartono, Mr. Wongsonegoro, Wuryaningrat, Mr. R.P. Singgih, Tan Eng Hoat, Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat, dan dr. Sukiman bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Melalui Mr. Soepomo, Maria Ullfah berusaha agar azas tentang persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki dapat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar ketika Indonesia Merdeka nantinya, yaitu Pasal 27 UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun kemudian diberikan kepada Panitia Penghalus Bahasa untuk disempurnakan bahasanya pada tanggal 13 Juli 1945. Selanjutnya pada persidangan BPUPKI kedua tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno menyampaikan tiga hasil Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu:

1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
3. Undang-Undang Dasarnya sendiri (Batang Tubuhnya)

Konsep pernyataan Indonesia Merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama dari Piagam Jakarta, terutama diantara alinea pertama dan alinea kedua. Sedangkan konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Indonesia diterima secara bulat oleh sidang pada rapat tersebut, yaitu tanggal 14 Juli 1945. Sidang BPUPKI akhirnya ditutup secara resmi pada tanggal 17 Juli 1945.

Hasil persidangan BPUPKI selanjutnya dilaporkan kepada Jenderal Terauci yang berada di Dalat, Saigon Vietnam. Jenderal Terauchi merupakan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara yang disebut *Nampoo Gun*. Ir. Soekarno bersama rombongan, seperti Drs. Muh. Hatta, Dr. Radjiman Wediodiningrat, dan dr. Soeharto (dokter pribadi Ir. Soekarno) berangkat ke Dalat pada tanggal 7 Agustus 1945 dan kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 1945 dengan membawa berita bahwa Jepang benar-benar berjanji akan memberikan kemerdekaan pada

Indonesia.<sup>57</sup> Pemerintah Jepang yang diwakili oleh *Gunsaikan* menyampaikan pidato, bahwa Jepang akan benar-benar memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disebut *Dokuritsu Junbi Inkai* dan akan mulai bekerja pada 18 Agustus 1945.

Jatuhnya bom atom di kota Nagasaki (6 Agustus 1945) dan Hiroshima (9 Agustus 1945) membuat posisi Jepang semakin terjepit. Kondisi tersebut memaksa pihak Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu dalam pertemuan di Potsdam pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan terbatasnya informasi yang masuk ke Indonesia akibat ditutupnya beberapa radio pribadi. Sjahrir yang mengetahui berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu, meminta Soebadio Sastrosatomo untuk menyampaikan berita tersebut kepada kelompok-kelompok yang selama ini mengikuti perkembangan perang dan politik tanah air. Soebadio Sastrosatomo dalam otobiografinya menyampaikan pemikiran Sjahrir yang menginginkan kemerdekaan bagi Indonesia secepatnya, yaitu:

“Inilah saatnya yang terbaik yang telah lama kita tunggu dan keadaannya pun menguntungkan sekali untuk menyatakan kemerdekaan. Pihak Jepang yang menduduki Indonesia telah menyerah kepada Sekutu sedangkan Belanda yang termasuk dalam Sekutu belum dapat menerima kembali jajahannya. Secara psikologis, Jepang dalam keadaan yang lemah dan penderitaan rakyat dan bangsa Indonesia selama diduduki

---

<sup>57</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 72.



Jepang adalah merupakan fakto-faktor yang menguntungkan untuk menyatakan kemerdekaan”.<sup>58</sup>

Bagi Sjahrir kekosongan pemerintahan yang terjadi di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk menyatakan kemerdekaan. Selanjutnya Sjahrir memutuskan untuk bertemu dengan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk membicarakan berita tersebut. Ir. Soekarno yang mendengar berita tersebut tidak percaya dan tetap ingin menjalankan pekerjaannya sebagai ketua PPKI serta tetap bekerjasama dengan pihak Jepang. Mendengar hal tersebut Sjahrir marah dan mengumpat kepada Ir. Soekarno dengan bahasa Belanda *man wiff* (seorang pengecut dan banci). Kondisi tersebut menciptakan dua golongan yang berbeda, yaitu golongan tua yang tetap ingin bekerjasama dengan Jepang dan golongan pemuda yang ingin merdeka tanpa bantuan Jepang. Banyaknya desakan dari golongan pemuda yang menuntut kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan dibacakannya teks Proklamasi dan dikibarkannya bendera Merah Putih di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.

Kekalahan Jepang atas sekutu membuat nama Sjahrir yang selama masa kependudukan Jepang bergerak di bawah tanah menjadi muncul dan tampil sebagai seorang yang penting bagi Republik Indonesia. Jatuhnya kabinet pertama Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno memunculkan kabinet baru yang dipimpin oleh Sjahrir. Kabinet tersebut dinamakan Kabinet Sjahrir I yang dibentuk pada 14 November 1945. Terpilihnya Sjahrir sebagai Perdana

---

<sup>58</sup> Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 13.

Menteri Republik Indonesia menjadikan sistem pemerintahan berubah dari yang awalnya presidensil menjadi parlementer.

Maria Ullfah yang pada saat Sjahrir menjadi Perdana Menteri masih bekerja sebagai pegawai Kementerian Kehakiman merasa heran ketika kawan lamanya tersebut datang dan menawarinya jabatan dalam pemerintahannya. Sjahrir meminta Maria Ullfah untuk menjadi Sekretaris Jenderal pada Kementerian Luar Negeri. “Saya diminta untuk menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri yang kantornya di rumah Menteri Agama Alamsyah sekarang”, tulis Maria Ullfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*.<sup>59</sup> Maria Ullfah menolak permintaan tersebut dan mengusulkan nama Oetoyo Ramlan untuk dijadikan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Maria Ullfah yang menolak jabatan Sekretaris Jenderal Luar Negeri selanjutnya diminta untuk menjadi pembantu pribadi Sjahrir, dengan tugas khusus sebagai perwira penghubung atau *liaison officer* antara pemerintah Republik dengan sekutu.<sup>60</sup> Sudah menjadi tugas Maria Ullfah untuk memberikan laporan kepada Markas Besar tentara sekutu apabila terjadi peristiwa tembak menembak antara pemuda Republik Indonesia dengan pihak Belanda. Maria Ullfah harus memberi laporan kepada Penghubung tentara sekutu yaitu Letkol Kolonel Van der Post atau bawahannya Kapten Pope jika terjadi peristiwa bentrok. Menurut Sjahrir jabatan *liaison officer* sangat cocok apabila dilakukan oleh seorang perempuan, dalam hal ini Maria Ullfah. Menurutnya tentara sekutu akan lebih terbuka dengan

---

<sup>59</sup> Maria Ullfah, *op.cit.*, hlm. 94.

<sup>60</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 78-79.

pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh perempuan. Alasan lain mengapa Sjahrir memilih Maria Ulfah adalah karena Sjarir ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan “boneka” Jepang tetapi Indonesia adalah negara yang sangat menghargai peran perempuan dalam segala hal. Selain itu, Maria Ulfah dipilih sebagai *liaison officer* karena sejak awal Sjahrir telah menyadari kepandaian Maria Ulfah dalam berdiplomasi. Maria Ulfah menjabat sebagai *liaison officer* hingga bulan Maret 1946, yaitu ketika Sjahrir meminta Maria Ulfah untuk duduk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II.

## **BAB IV**

### **PERAN MARIA ULLFAH SETELAH MASA KEMERDEKAAN TAHUN 1946-1988**

#### **A. Maria Ullfah Menteri Perempuan Pertama serta Kebijakannya**

Keadaan politik Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dapat dikatakan belum stabil meskipun telah dibentuk pemerintahan yang berdaulat. Sebagai negara yang baru memproklamkan kemerdekaannya, Indonesia masih harus menghadapi tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tantangan dari luar tersebut datang dari pemerintah Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan tentara sekutu pada tanggal 29 September 1945 di Tanjung Priok. Pada awalnya kedatangan tentara sekutu disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia, tetapi setelah bangsa Indonesia tahu bahwa dalam pasukan sekutu terdapat serdadu Belanda dan aparat NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*) sikap bangsa Indonesia berubah menjadi curiga.<sup>1</sup>

Selain menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa, pemerintah Indonesia harus menghadapi permasalahan yang datang dari dalam, yaitu perebutan kursi pimpinan revolusi. Soekarno-Hatta yang sejak awal menjadi pimpinan revolusi, akibat kerjasamanya dengan pemerintah militer Jepang, mulai dianggap kurang tepat oleh beberapa tokoh non-kooperatif, terutama Tan Malaka.<sup>2</sup> Tan Malaka yang berambisi untuk menggulingkan Soekarno-Hatta berusaha

---

<sup>1</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 186.

<sup>2</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid II*. (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 73.

mempengaruhi beberapa tokoh non-kooperatif, seperti Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Pulau Jawa melihat langsung betapa besar dukungan rakyat kepada Soekarno-Hatta, sehingga ia memutuskan untuk mendukung Soekarno-Hatta. Tidak mendapat dukungan dari Sjahrir, selanjutnya Tan Malaka melakukan pertemuan langsung dengan Ir. Soekarno.

Sjahrir yang diberitahu Moh. Hatta tentang pertemuan tersebut kanget dan segera melakukan pertemuan dengan Moh. Hatta di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Sjahrir menceritakan betapa berbahayanya jika di masa depan Tan Malaka menjadi presiden dan menerapkan rencana perjuangannya. Sebagai upaya untuk mencegah perpindahan kekuasaan ke tangan Tan Malaka, maka Sjahrir membujuk Moh. Hatta untuk mengeluarkan Maklumat 3 November yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk pembentukan partai politik.<sup>3</sup> Tujuan dari dikeluarkannya maklumat tersebut adalah agar melalui partai-partai politik tersebut dapat memperkuat perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Selain itu, partai-partai politik yang ada diharapkan dapat memimpin segenap aliran yang ada dalam masyarakat menuju jalan yang teratur.

Berdirinya partai-partai politik selanjutnya diikuti dengan perubahan sistem pemerintahan yang semula presidensial menjadi sistem parlementer. Sistem parlementer yang berlaku mengharuskan kabinet bertanggung jawab kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang selama Perang Kemerdekaan berfungsi

---

<sup>3</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 203.

sebagai dewan perwakilan rakyat.<sup>4</sup> Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, akhirnya pada 14 November 1945 kabinet presidensial dibawah pimpinan presiden Soekarno digantikan oleh kabinet ministerial di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir, yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabinet Sjahrir I.

Umur Kabinet Sjahrir I tidak bertahan lama, pada pertengahan Februari 1946 Kabinet Sjahrir I banyak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, terutama dari pihak oposisi. Persatuan Pejuang (PP) yang dibentuk oleh Tan Malaka pada tanggal 4-5 Januari 1946 di Surakarta menjadi partai oposisi yang terus berusaha menjatuhkan Kabinet Sjahrir I. Kebijakan diplomasi yang dibuat Sjahrir banyak ditentang partai politik dan hanya mendapatkan dukungan dari satu partai politik saja, yaitu dari partai Sosialis. Kebijakan luar negeri Sjahrir yang ingin membina hubungan baik dengan Inggris dan Belanda menjadi faktor penting jatuhnya Kabinet Sjahrir I.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam rapat PPKI dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Anggota KNIP berjumlah 137 orang dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo. Tugas KNIP berdasarkan UUD 1945 adalah membantu presiden menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk. Selanjutnya, berdasarkan Maklumat No. X yang dikeluarkan Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP diberi kekuasaan legislatif serta dapat menentukan garis-garis besar haluan negara sebelum MPR dan DPR terbentuk. Selain itu, tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP dengan ketuanya Sutan Sjahrir, lihat *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>5</sup> Rushdy Hoesein, *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 62.

Puncaknya pada tanggal 28 Februari 1946 diadakan sidang pleno KNIP Republik Indonesia di kota Solo.<sup>6</sup> Sidang tersebut dipimpin oleh Mr. Assaat dan dihadiri oleh 218 orang, yaitu 203 anggota KNIP (dari 294 anggota) serta 15 orang wakil Komite Nasional Daerah. Dalam persidangan Persatuan Perjuangan sangat gencar melakukan kritik terhadap pemerintah. Mereka mengkritik kebijakan Sjahrir yang tidak mencerminkan partai politik yang ada, sehingga dalam sidang terjadi pertentangan antara Kabinet Sjahrir I dan Persatuan Perjuangan yang menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen (KNIP) kepada kabinet Sjahrir. Akhirnya Kabinet Sjahrir I dinyatakan dimisioner pada tanggal 28 Februari 1946.

Pada awalnya ketika kabinet mengalami krisis, Presiden Soekarno telah menyerahkan pembentukan kabinet baru kepada Persatuan Perjuangan.<sup>7</sup> Namun, Persatuan Perjuangan yang disertai tugas tersebut baru mau membentuk kabinet jika program Persatuan Perjuangan dapat diterima semua oleh presiden. Program Persatuan Perjuangan yang berjumlah tujuh pasal belum dapat diterima oleh presiden, sehingga Presiden Soekarno menyerahkan kembali pembentukan kabinet baru kepada Sutan Sjahrir. Dalam pembentukan kabinet yang baru tersebut Presiden Soekarno memerintahkan Sjahrir untuk membentuk Kabinet Persatuan, yaitu kabinet dari semua partai rakyat (*coalitie cabinet*).

---

<sup>6</sup> Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 36.

<sup>7</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 29.

Sidang kedua KNIP selanjutnya dilaksanakan kembali pada tanggal 1 Maret 1946, dalam sidang tersebut diadakan pemungutan suara untuk menentukan politik luar negeri Indonesia. Pemungutan suara tersebut menghasilkan 140 suara setuju, 67 suara tidak setuju, dan 18 suara *blanco*, jadi pada umumnya sidang tersebut mendukung kebijakan pemerintah.<sup>8</sup> Pada tanggal 2 Maret 1946 Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan bahwa Sjahrir terpilih kembali menjadi formatir kabinet. Sehingga dalam sidang pleno hari ketiga KNIP pada tanggal 3 Maret 1946 memutuskan, bahwa Presiden Soekarno meminta kepada Sjahrir untuk membentuk kabinet baru dengan ketentuan bahwa kabinet baru harus bersifat koalisi kabinet berdasarkan program pemerintah yang lima pasal.<sup>9</sup> Sebagai seorang formatir kabinet, Sjahrir memiliki peluang untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi dalam penyusunan kabinet yang baru tersebut Sjahrir lebih bertindak hati-hati dengan mengikutsertakan partai-partai lainnya, seperti PSI (Partai Sosialis Indonesia), PSII, Masyumi, Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), Parkindo, dan Badan Kongres Pemuda.

Kabinet Sjahrir II dilantik pada 12 Maret 1946.<sup>10</sup> Dimasukkannya beberapa tokoh baru dalam Kabinet Sjahrir II tidak banyak berpengaruh, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya menteri yang mengundurkan diri atau bahkan tidak bersedia menjadi menteri. Beberapa menteri yang menolak jabatan dalam kabinet adalah Samadikun yang diangkat sebagai Menteri Muda dalam

---

<sup>8</sup> Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 38.

<sup>9</sup> P.N.H. Simanjuntak, *loc.cit.*,

<sup>10</sup> Susunan Kabinet Sjahrir II dapat dilihat dalam lampiran 7, hlm. 215.



Negeri, Sjamsu Harya Udaja yang diangkat menjadi Menteri Muda Perdagangan dan Perindustrian, Moh. Sjafei sebagai Menteri Pengajaran. Sedangkan menteri yang berhenti dari jabatannya adalah Suwadi Menteri Kehakiman dan Rasad Menteri Pertanian dan Perindustrian.

Kabinet Sjahrir II memiliki program kerja yang terdiri atas lima program pokok dasar, yaitu:<sup>11</sup>

1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia Merdeka 100%
2. Mempersiapkan rakyat negara di segala lapangan politik, ketentraman, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia
3. Menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis
4. Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian
5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya hingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam UUD pasal 33.

Kelima program pokok dasar program Kabinet Sjahrir II pada dasarnya adalah hasil dari pemikiran Soekarno-Hatta, sehingga kelima program pokok dasar Kabinet Sjahrir II diberi nama “lima pokok dari Soekarno”.

Sebagai seorang Perdana Menteri, Sjahrir banyak melakukan perubahan besar dalam kabinetnya yang kedua. Selain mengangkat beberapa menteri muda dan mengikutsertakan beberapa partai-partai politik, Sjahrir juga memasukan satu nama perempuan dalam kabinetnya. Untuk pertama kalinya dalam Kabinet Republik Indonesia ditunjuk seorang perempuan untuk duduk dalam kabinet, yaitu Ny. Maria Ullfah Santoso sebagai Menteri Sosial.<sup>12</sup> Pengangkatan tersebut

---

<sup>11</sup> *Kedaulatan Rakyat*, Rabu 6 Maret 1946.

<sup>12</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 30.

mendapatkan sambutan baik dari beberapa organisasi perempuan Indonesia, salah satunya dari Badan Kongres Wanita Indonesia yang langsung mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta.<sup>13</sup>

Maria Ullfah diangkat menjadi Menteri Sosial pada usia 35 tahun.<sup>14</sup> Sebelum menjabat sebagai Menteri Sosial, pada awalnya Maria Ullfah ditawarkan oleh Sjahrir untuk menjadi Menteri tanpa Porto Folio (menteri non-departemen). “Tadinya saya ditawarkan menjadi Menteri tanpa Porto Folio karena Sjahrir ingin memperlihatkan bahwa Republik Indonesia bukan boneka atau buatan Jepang, karena di Jepang pada waktu itu wanita tidak sama kedudukannya dengan pria”, tulis Maria Ullfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*. Sjahrir sengaja memilih Maria Ullfah karena ia sudah memahami bagaimana sifat Maria Ullfah.

Pada saat perjalanan pulang dari Solo menuju Jakarta, Sjahrir membahas pencalonan Maria Ullfah dengan koleganya dari Partai Sosialis yaitu Sudarpo Sastrosatomo, tetapi dalam buku *Perjuangan Revolusi* percakapan dilakukan dengan Soebadio Sastrosatomo.<sup>15</sup> Keduanya membicarakan tentang kemungkinan

---

<sup>13</sup> Sejak tanggal 4 Januari 1946 ibu kota negara Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta terpaksa pindah ke Yogyakarta akibat keadaan ibu kota yang sudah tidak kondusif. Terjadinya beberapa peristiwa kerusuhan yang disebabkan oleh pasukan KNIL membuat keadaan ibu kota menjadi tidak aman lagi. Selain Presiden dan Wakil Presiden yang pindah ke Yogyakarta terdapat beberapa kementerian yang pindah ke Yogyakarta, sedangkan Sjahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri tetap tinggal di Jakarta, lihat Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 200-203; lihat Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 187.

<sup>14</sup> Bonnie Triyana, dkk, “Menteri Sosial Banyak Urusan”, *Historia*, Nomor 1, 2012, hlm. 63.

<sup>15</sup> Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 237.

mengikutsertakan seorang perempuan dalam kabinet yang akan dibentuk Sjahrir. Sjahrir selanjutnya mengundang Maria Ulfah untuk bergabung dalam diskusi tersebut. Waktu Sjahrir menyatakan niatnya untuk mengangkat Maria Ulfah menjadi Menteri Sosial, Maria Ulfah sedikit heran dan bertanya kepada Sjahrir mengapa ia dipilih. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Sjahrir, bahwa Maria Ulfah sebagai Menteri Sosial harus menjalankan tugas khusus yang diterima Sjahrir dari sekutu, yaitu mengeluarkan tahanan wanita dan anak-anak dari kamp-kamp Jepang.<sup>16</sup> Menurut Sjahrir jabatan Menteri Sosial sangat tepat jika diberikan kepada perempuan, karena tugas tersebut berkaitan erat dengan sekutu. Pihak sekutu sangat menghormati kedudukan seorang perempuan (*lady first*), jadi ketika tugas tersebut dilakukan Maria Ulfah maka pihak Republik Indonesia dapat melakukan pembicaraan dengan tentara sekutu.

Mendengar tawaran dari Sjahrir Maria Ulfah merasa ragu dan belum siap untuk menjadi menteri. Keraguan Maria Ulfah tersebut dilatar belakangi oleh rasa kurang percaya dirinya yang belum terlalu berpengalaman dalam bidang tersebut, Maria Ulfah merasa masih ada tokoh perempuan lain yang lebih berpengalaman yaitu S.K Trimurty. Sjahrir yang melihat kecemasan Maria Ulfah berkata, “Kau kira tak dapat menjalankan pekerjaan itu, kita semua belum pernah menjadi Menteri dan saya tahu kau orang yang cukup berani”.<sup>17</sup> Maria Ulfah akhirnya menerima jabatan Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II dan mulai bekerja

---

<sup>16</sup> Maria Ulfah Subadio, “Bung Sjahrir”, *Mengenang Sjahrir*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1980), hlm. 94.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

ketika Kabinet Sjahrir II resmi dilantik. Sjahrir memilih sosok Maria Ulfah yang bukan berasal dari partai politik, melainkan tokoh perempuan yang dikenal sebagai pejuang kemajuan golongan perempuan. “Saya tidak mewakili GWS, melainkan saya semata-mata orang Perwari”, kata Maria Ulfah saat diwawancarai Mansur Amin dari Majalah *Tempo*.<sup>18</sup> GWS atau Gerakan Wanita Sosialis merupakan organisasi perempuan dari PSI. Pada saat diangkat menjadi Menteri Sosial Maria Ulfah belum bergabung ke PSI, ia masih aktif di organisasi-organisasi perempuan seperti Perwari dan Kowani (Kongres Wanita Indonesia).

Sebagai seorang Perdana Menteri Sjahrir mempunyai alasan mengapa posisi Menteri Sosial harus dijabat oleh seorang perempuan yang tidak lain adalah Maria Ulfah. Subadio Sastrosatomo dalam bukunya *Perjuangan Revolusi* menyebutkan beberapa alasan mengapa Sjahrir memilih Maria Ulfah.<sup>19</sup> Pertama karena Maria Ulfah merupakan wakil kaum perempuan di pemerintahan. Kaum perempuan Indonesia berperan dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga dengan menempatkan wakilnya dalam pemerintahan adalah hal yang layak dilakukan. Kedua, Sjahrir ingin membuktikan kepada dunia bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak semata-mata perjuangan untuk menuju kemerdekaan, tetapi juga perjuangan untuk kemanusiaan. Sebagai seorang Menteri Sosial Maria Ulfah diberi tugas utama yaitu untuk mengurus wanita dan anak-anak Belanda yang oleh Jepang ditawan dalam kamp-kamp di daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Apabila Palang Merah Internasional

---

<sup>18</sup> Mansur Amin, “Wanita itu Orang Banten”, *Tempo*, 26 Februari 1977.

<sup>19</sup> Soebadio Sastrosatomo, *loc.cit.*,

ingin memberi bantuan kepada para wanita dan anak-anak yang hidup dalam kamp tawanan, bantuan tersebut dapat disalurkan melalui Menteri Sosial. Ketiga, dengan menjadikan Maria Ullfah sebagai Menteri Sosial berarti Sjahrir dapat berhubungan langsung dengan Panglima sekutu (Inggris) dan Kementerian Sosial menjadi memiliki tanggung jawab atas pemulangan para tawanan. Dengan adanya Kementerian Sosial yang bertanggung jawab atas pemulangan para tawanan, berarti Sjahrir telah mencegah sekutu mempergunakan Pemerintah Hindia Belanda atau Palang Merah Hindia Belanda untuk mengurus wanita dan anak-anak Belanda dalam kamp-kamp tawanan Jepang.

Salah satu tugas sekutu (Inggris) di Indonesia adalah mengurus para tawanan wanita dan anak-anak Belanda APWI (*Allied Prisoners of War and Internees*) yang ditawan di kamp-kamp Jepang. Sekutu dalam menjalankan tugasnya tersebut banyak mendapatkan perlawanan dari tentara Republik Indonesia, khususnya di daerah-daerah kekuasaan Republik Indonesia. Perlawanan dari tentara Republik Indonesia tersebut memaksa sekutu untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Republik Indonesia. Permasalahan tawanan wanita dan anak-anak tersebut merupakan masalah *urgent* dalam kaitannya dengan kedaulatan negara Republik Indonesia.<sup>20</sup> Hal tersebut dikarenakan dengan menyerahkan permasalahan tawanan wanita dan anak-anak Belanda kepada pihak Republik Indonesia, maka secara tidak langsung sekutu (Inggris) mulai mempercayai eksistensi Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> M. Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946 Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 120.

Kementerian Sosial adalah sebuah kementerian yang mempunyai tugas khusus mengurus masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup> Sejak Proklamasi, pemerintah Indonesia telah mendirikan Kementerian Sosial dengan Menteri Sosial pertamanya adalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang dilantik pada 2 September 1945. Kementerian sosial dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia guna memperbaiki keadaan sosial bangsa pasca penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Berdasarkan UUD 1945 (sebelum diamandemen) tugas dan kewajiban Kementerian Sosial adalah untuk menjalankan beberapa pasal dalam UUD 1945 yaitu:<sup>22</sup>

1. Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 33
  - a. Ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
  - b. Ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai rakyat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.
  - c. Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
3. Pasal 34 “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas maka dapat dikatakan segala hal yang berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat menjadi tanggung jawab dari Kementerian Sosial. Keadaan sosial masyarakat pasca penjajahan menjadi hal yang sangat

---

<sup>21</sup> Azmi, *Inventaris Arsip Kementerian Sosial dan Kementerian Perburuhan dan Sosial (1946-1950)*. (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1986), hlm. i.

<sup>22</sup> ANRI, *Kementerian Perburuhan dan Sosial 1946-1950 No. 1, Berkas Mengenai Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial 20 Januari 1946- 2 Oktober 1947*.

*urgent* dan harus segera diperbaiki oleh pemerintah, maka dengan dibentuknya Kementerian Sosial diharapkan harkat dan martabat bangsa dapat terangkat dan lebih baik.

Kantor Kementerian Sosial pada awalnya terletak di Jakarta, tetapi dengan berpindahnya ibukota negara Republik Indonesia maka pada tanggal 10 Januari 1946 Kantor Kementerian Sosial dipindahkan ke Yogyakarta. Pada saat Maria Ullfah menjabat sebagai Menteri Sosial, kantor Kementerian Sosial berada di Jalan Code nomor 2 Yogyakarta. Kementerian Sosial mempunyai lapangan pekerjaan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Menyelenggarakan politik sosial
2. Menyelenggarakan undang-undang dan peraturan sosial
3. Memajukan dan membimbing perasaan kesosialan dalam masyarakat dan lain-lain yang bersifat sosial, seperti usaha kesosialan dan penyuluhan tentang kesosialan.
4. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapangan kesosialan
5. Turut serta dalam menyelenggarakan “ketentraman masyarakat”
6. Perbaikan masyarakat (Fakir miskin, pemberantasan buta huruf, pengadaan undian, bantuan dan sokongan terhadap pengungsi dan korban perang).
7. Menerima orang-orang dari luar negeri

Pekerjaan-pekerjaan tersebut baru dilaksanakan ketika operasi pemulangan tawanan telah selesai dilakukan oleh Maria Ullfah.

Jabatan Maria Ullfah sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II adalah menggantikan Dr. Soedarsono yang pada masa Kabinet Sjahrir II diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dengan tugas khusus mengurus pengiriman

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. i-ii.

bantuan beras ke India yang sedang dilanda kelaparan.<sup>24</sup> Maria Ullfah memiliki tugas utama untuk melaksanakan proyek repatriasi tawanan perang Jepang yang masih tinggal di daerah Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut Maria Ullfah tidak sendiri, ia dibantu oleh PMI (Palang Merah Indonesia) dan beberapa mahasiswa pejuang. “Syukurlah pekerjaan yang mulia itu dapat dijalankan dengan baik berkat bantuan tentara kita (POPDA) yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa kita di bawah pimpinan Jenderal Soedibyo”, tulis Maria Ullfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*. POPDA atau Panitia Oeroesan Pemulangan Djepang merupakan tentara Republik Indonesia yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia.

Pelaksanaan proyek pemulangan wanita dan anak-anak Belanda tawanan perang Jepang dimulai sejak 9 Januari 1946, tetapi atas perjanjian antara sekutu dan pemerintah Republik Indonesia, proyek tersebut resmi dimulai pada 29 April 1946 dan berakhir 30 Mei 1947.<sup>25</sup> Sejak dimulainya proyek tersebut kondisi kamp-kamp tawanan sangat kurang memadai yang membuat kondisi kesehatan para tawanan menjadi buruk. Terlebih sejak tahun 1945 yaitu saat pendudukan Jepang berakhir diperkirakan terdapat tiga belas ribu orang interniran Eropa yang tewas.<sup>26</sup> Maria Ullfah yang bertugas mengurus pemulangan tawanan perang Jepang tersebut harus dapat memastikan keadaan tawanan tetap dalam keadaan

---

<sup>24</sup> Gadis Rasid, *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1982), hlm. 80.

<sup>25</sup> Rushdy Hoesein, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>26</sup> Bonnie Triyana, *dkk, op.cit.*, hlm. 64-65.



baik. Sehingga Maria Ulfah banyak melakukan perjalanan keliling daerah untuk mengunjungi kamp-kamp interniran.

Kedatangan Maria Ulfah ke kamp-kamp interniran tersebut, banyak menarik perhatian para tawanan perempuan. Para tawanan tersebut heran, mereka tidak menyangka bahwa yang bertanggung jawab atas pemulangan mereka adalah seorang perempuan. Kunjungan Maria Ulfah tersebut banyak dimanfaatkan para tawanan untuk meminta pemerah bibir (*lipstick*) dan bedak. “Waktu itu ada yang minta bedak, *lipstick* dan lain-lain sama saya”, kenang Maria Ulfah dalam wawancaranya dengan Dewi Fortuna Anwar.<sup>27</sup> Maria Ulfah menyadari hal tersebut dan merasa maklum, karena sudah lima tahun lamanya mereka tidak menggunakannya. Selain itu, para tawanan tersebut tidak berani meminta bedak dan *lipstick* kepada petugas laki-laki yang berjaga.

Proyek repatriasi tawanan perang Jepang yang dilakukan oleh Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial banyak mendapatkan dukungan dari tentara Inggris. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan penyediaan pesawat terbang, obat-obatan, pakaian, bahan makanan, dan bahkan susu untuk anak-anak tawanan perang. Selanjutnya para interniran yang berasal dari berbagai kamp-kamp tawanan perang Jepang dikumpulkan di kota-kota besar yang memiliki Bandar udara atau stasiun kereta api. Pada umumnya para tawanan tersebut akan diberangkatkan dengan pesawat terbang dari lapangan terbang Panasan dekat kota Solo atau dengan menggunakan kereta api dari Yogyakarta.

---

<sup>27</sup> ANRI, Sejarah Lisan Tahun 1973-1994 No. 154, *Maria Ulfah- Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*, 1983, kaset 3.

Pemulangan para interniran tersebut banyak mendapat gangguan dari tentara Belanda, sebelum memasuki Jakarta biasanya di daerah Kranji dan Bekasi para tentara Belanda sering menghambat perjalanan para tawanan. Belanda yang ingin kembali menguasai negara Republik Indonesia banyak melakukan usaha untuk menggagalkan misi penyelamatan tawanan tersebut, salah satunya adalah peristiwa 9 Juni 1946.<sup>28</sup> Di mana kapal perang *Evertsen* milik Belanda mencegat dua kapal pengangkut interniran yang sedang berlayar dari Madura ke Tegal. Kejadian tersebut jelas membuat pemerintah Republik kecewa dan melayangkan protes kepada sekutu.

Proyek pemulangan wanita dan anak-anak Belanda tawanan perang Jepang merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi Republik Indonesia. Proyek tersebut menjadi salah satu strategi diplomasi pemerintah Republik Indonesia yang baru akan genap satu tahun merdeka. Keberhasilan pemerintah Republik Indonesia dalam menangani proyek tersebut dapat dilihat dari jumlah tawanan wanita dan anak-anak Eropa yang dievakuasi dari kamp-kamp Jepang yaitu diperkirakan mencapai 36.000 orang, sedangkan tentara Jepang yang berhasil diangkut mencapai 35.545 orang.<sup>29</sup> Keberhasilan pemerintah dalam mengurus proyek tersebut semakin membuat dunia internasional mengakui keberadaan negara Republik Indonesia yang selalu dianggap Belanda sebagai “pemerintah semu”.

---

<sup>28</sup> Bonnie Triyana, dkk, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>29</sup> Rushdy Hoesein, *loc.cit.*,

Suatu peristiwa penting terjadi pada bulan Juni 1946, peristiwa tersebut sangat berpengaruh terhadap jatuhnya Kabinet Sjahrir II. Pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Sjahrir bersama Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo dan Maria Ullfah Menteri Sosial diculik gerombolan yang tidak bertanggung jawab, gerombolan tersebut berasal dari Persatuan Perjuangan yang tidak sepaham dengan Sjahrir.<sup>30</sup> Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia membuat Persatuan Perjuangan kecewa, karena dari awal Persatuan Perjuangan telah menjadi kelompok oposisi. Pidato Wakil Presiden Moh. Hatta tentang permintaan pemerintah kepada Belanda agar mengakui Republik secara *de facto* atas Jawa dan Sumantera dinilai sangat merugikan Republik Indonesia. Kejadian tersebut ditambah dengan penangkapan Tan Malaka dan beberapa tokoh Persatuan Perjuangan pada 18 Maret 1946. Kekecewaan atas dua kejadian di atas menjadi latar belakang penculikan Sjahrir dan rombongan di Surakarta.

Peristiwa penculikan Sjahrir dan rombongannya bermula pada tanggal 25 Juni 1946 ketika Sjahrir dan rombongannya berada di Surakarta.<sup>31</sup> Rencananya dari Surakarta rombongan akan menuju Yogyakarta untuk menghadiri sidang kabinet yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta. Sebelum ke Yogyakarta Sjahrir dan rombongan terlebih dahulu menginap di Surakarta, yaitu di bekas rumah kepala *Javaasche Bank*, Gladag. Pada malam harinya Sjahrir dan rombongan ditangkap dan dibawa ke tempat peristirahatan Kasunanan di Paras,

---

<sup>30</sup> Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 44.

<sup>31</sup> A.H. Nasution dalam M. Yuanda Zara, *op.cit.*, hlm. 171.

Boyolali. Dalam penculikan tersebut sebenarnya Maria Ullfah dan Darmawan Mangunkusumo tidak masuk dalam daftar penangkapan, tetapi Abdul Kadir Yusuf dan pasukannya tidak mau mengambil resiko sehingga ikut menangkap keduanya.

Pemerintah pusat yang berkedudukan di Yogyakarta segera mengetahui peristiwa penculikan Sjahrir dan robongannya di Surakarta. Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut Presiden Soekarno mengadakan rapat kabinet lengkap sesuai rencana awal, yaitu pada tanggal 28 Juni 1946. Di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin peserta rapat mengusulkan agar selama keadaan gawat tersebut, semua kekuasaan dipindahkan kepada Presiden Soekarno dengan kabinet bertanggung jawab kepadanya.<sup>32</sup> Dengan kata lain sistem pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Presidensil. BP KNIP yang turut hadir dalam rapat tersebut menyetujui usul tersebut dengan syarat agar tanggung jawab para menteri kepada Presiden dan KNIP akan dikembalikan seperti semula ketika keadaan normal kembali.

Lebih lanjut pemerintah melakukan tindakan dengan mengumumkan bahwa seluruh Indonesia dalam keadaan bahaya. Presiden Soekarno melalui Menteri Pertahanan Amir Syariuddin atas nama Dewan Menteri pada jam 1 malam tertanggal 29 Juni 1946 mengumumkan keadaan bahaya untuk seluruh wilayah Indonesia dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden 1946 No. 1 yang menyatakan:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

“berhubung dengan kejadian-kejadian dalam negeri yang membahayakan keselamatan Negara dan perjuangan kemerdekaan kita, maka kami Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan kabinet dalam sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946 mengambil kekuasaan Pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu, sampai kembalinya keadaan biasa, yang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya”.<sup>33</sup>

Keluarnya Maklumat Presiden tersebut diikuti pidato Presiden Soekarno pada 30 Juni 1946 melalui radio. Dalam pidato tersebut Presiden menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar ikut berusaha mengembalikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Sosial Maria Ulfah, serta rombongan lainnya yang ikut diculik. Menurut Presiden Soekarno, dalam berpolitik boleh terjadi perbedaan pendapat atau kritikan, tetapi tindakan penculikan merupakan suatu hal yang salah karena akan menurunkan dan merusak derajat bangsa di mata dunia.

Mendengar seruan Presiden Soekarno, maka pada tanggal 1 Juli 1946 pukul 04.00 WIB, Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Sosial Maria Ulfah, serta rombongan lainnya dibebaskan oleh satuan Tentara Republik Indonesia.<sup>34</sup> Meskipun Sjahrir telah bebas dan dapat kembali ke Jakarta, tetapi tangkup kekuasaan tetap dipegang Presiden Soekarno, sedangkan Sjahrir hanya duduk menjadi Menteri Luar Negeri. Dengan kata lain Kabinet Sjahrir II secara yuridis telah berakhir. Kabinet Sjahrir II hanya berusia 3 bulan 16 hari, dan kabinet tersebut jatuh bukan karena adanya

---

<sup>33</sup> Usaman Rabili dalam P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 36-37; “Kekoeasaan Pemerintah Sepenoeh-Penoehnja Kembali Ketangan Presiden”, *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 29 Juni 1946.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

mosi tidak percaya melainkan karena peristiwa penculikan Perdana Menteri Sjahrir serta dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden nomor 1 tahun 1946.

Sebagai upaya untuk memulai perundingan dengan Belanda, maka negara Republik Indonesia perlu membentuk kabinet yang baru. Pada tanggal 13 Agustus 1946 KNIP mengadakan rapat di Purworejo dan menghasilkan keputusan untuk mendesak presiden agar segera membentuk kabinet yang baru sebagai upaya menyelamatkan negara. Sjahrir terpilih kembali untuk menjadi formatir kabinet, karena Sjahrir dinilai sebagai orang yang mutlak diperlukan untuk menjalin hubungan yang berhasil dengan pihak Belanda dan Inggris. Kabinet Sjahrir III merupakan rangkaian Kabinet Republik Indonesia keempat yang terbentuk. Kabinet Sjahrir III disahkan dengan dikeluarkan Maklumat Presiden 1946 No. 3 tertanggal 2 Oktober 1946.<sup>35</sup> Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, maka dapat dikatakan Sjahrir terpilih kembali menjadi Perdana Menteri ketiga kalinya secara berturut-turut.

Sebelum Kabinet Sjahrir III terbentuk, negara Republik Indonesia mengalami sebuah peristiwa besar yang disebut Peristiwa 3 Juli 1946.<sup>36</sup> Peristiwa

---

<sup>35</sup> Koesnodiprodjo dalam P.N.H. Simanjuntak, *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>36</sup> Peristiwa 3 Juli 1946 adalah sebuah usaha kudeta terhadap pemerintah yang dilakukan oleh tokoh oposisi sebagai upaya balasan kepada pemerintah karena peristiwa penangkapan beberapa tokoh oposisi seperti Chaerul Saleh, Pandu Kartawiguna, Adam Malik, Ibnu Parna, Surip Suprasito, dan Joyopranoto pada tanggal 2 Juli 1946. Usaha kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Sudarsono dan Mayor Abdul Kadir Yusuf. Dalam usaha kudeta tersebut Jenderal Sudarsono mengajukan tiga naskah lanjutan dari Maklumat Presiden tahun 1946 No. 1. Ketiga naskah tersebut disusun oleh Muh. Yamin dan diberi nama naskah nomor 2, 3, dan 4. Kudeta berakhir pada hari itu juga dengan ditangkapnya Jenderal Sudarsono dan para tokoh oposisi lainnya, lihat M. Yuanda Zara, *op.cit.* hlm. 193-200.

tersebut merupakan wujud usaha kudeta yang dilakukan bangsa sendiri kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelah keadaan aman maka dibentuklah kabinet yang baru yaitu Kabinet Sjahrir III dan secara otomatis Presiden Soekarno mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada Perdana Menteri Sjahrir. Pengembalian kekuasaan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden nomor 2 Tahun 1946.

Kabinet Sjahrir III dilantik pada tanggal 5 Oktober 1946.<sup>37</sup> Komposisi kabinet Sjarir yang baru masih menggunakan kabinet koalisi longgar yang terdiri atas beberapa partai. Sedangkan untuk program kerja dari Kabinet Sjahrir III masih melanjutkan program kerja dari Kabinet Sjahrir II. Maria Ullfah dalam Kabinet Sjahrir III masih menjabat sebagai Menteri Sosial dengan tugas yang sama, tetapi Maria Ullfah juga menangani persoalan buruh. Sebagai upaya untuk menangani persoalan buruh Maria Ullfah mengangkat seorang pejabat untuk duduk sebagai Kepala Bagian Perburuhan di Kementerian Sosial.<sup>38</sup> Maria Ullfah mengangkat Wilopo sebagai Kepala Bagian Perburuhan yang selanjutnya diubah menjadi Kepala Jawatan Perburuhan. Masalah perburuhan kelak melalui Penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 akan diserahkan kepada Kementerian Perburuhan dengan S.K. Trimurty sebagai menteri Perburuhan yang pertama.

Menangani masalah perburuhan merupakan cita-cita Maria Ullfah sejak kuliah di Leiden, Belanda. Maria Ullfah yang menjabat Menteri Sosial dalam

---

<sup>37</sup> Susunan Anggota Kabinet Sjahrir III dapat dilihat di lampiran 7, hlm. 216.

<sup>38</sup> Bonnie Triyana, dkk, *op.cit.*, hlm. 66.

Kabinet Sjahrir III, memberikan tugas kepada Wilopo selaku Kepala Jawatan Perburuhan untuk menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Perburuhan. “Segala peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan saya yang bikin. Yu Tri Cuma tinggal neken saja”, kata Wilopo dalam wawancaranya dengan Majalah *Tempo*.<sup>39</sup> Rancangan Undang-Undang Perburuhan telah dimulai ketika Maria Ullfah menjabat sebagai Menteri Sosial, sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menjamin dan memberikan kekuatan hukum terhadap posisi buruh di Indonesia.

Selain Undang-Undang Perburuhan pada masa Maria Ullfah menjabat sebagai Menteri Sosial, untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyokong bahkan menganjurkan kaum buruh untuk memperingati hari buruh sedunia 1 Mei (*May Day*). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Maklumat Kementerian Sosial yang diterbitkan kepada seluruh kantor agar tetap membayar upah buruhnya yang mengikuti perayaan hari buruh sedunia. Maklumat tersebut berbunyi:

“Mengingat akan arti hari 1 Mei untuk kaum buruh maka diumumkan, kepada semua kantor Jawatan Pemerintah, Kepala Daerah, serta pimpinan perusahaan untuk menghargai hari tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pegawai dan buruh untuk merayakannya. Kepada buruh harian yang ikut merayakan hari 1 Mei diberi gaji terus untuk hari itu. Kepada kantor-kantor, jawatan-jawatan, dan perusahaan-perusahaan tersebut di atas diperkenankan mengibarkan bendera Merah disamping Sang Merah Putih”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Anonim, “Wilopo dan Pohon Ditengah Kekacauan”, *Tempo*, No. 6, 1977, hlm. 29.

<sup>40</sup> “Maklumat Kementerian Sosial”, *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 27 April 1946.



Maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tersebut merupakan jawaban pemerintah atas tuntutan gerakan buruh yang ingin ikut memperingati hari buruh. Sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap gerakan buruh tersebut mengundang simpati dari gerakan buruh Australia yang tergabung dalam “*Mackay Trade and Labour Council*”. Maria Ulfah selaku Menteri Sosial menerima sebuah lambang persahabatan dari kaum buruh Australia pada bulan November 1946. Hal tersebut merupakan wujud penghargaan gerakan buruh Australia atas usaha Maria Ulfah dalam memperjuangkan nasib buruh di Republik Indonesia.

Setelah tugas utama Maria Ulfah untuk mengembalikan para tawanan perang Jepang selesai, maka Maria Ulfah kembali menjalani pekerjaan rutin Menteri Sosial, yaitu membimbing kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat, mengusahakan perbekalan untuk lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Umur Kabinet Sjahrir III tidak bertahan lama, memasuki bulan Juni 1947 kondisi politik Indonesia kembali memanas. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidak sesuaian pendapat antara partai-partai politik dalam menghadapi konsensi Sjahrir dalam perundingan dengan Belanda.<sup>41</sup> Terjadinya perpecahan di dalam tubuh Partai Sosialis yang menjadi pendukung utama Kabinet Sjahrir III menjadi salah satu faktor utama jatuhnya Kabinet Sjahrir III.

Partai Sosialis selanjutnya pecah menjadi dua, yaitu Partai Sosialis Indonesia di bawah pimpinan Sjahrir dan Partai Sosialis atau yang lebih dikenal dengan nama Sayap Kiri di bawah pimpinan Amir Syarifuddin. Munculnya resolusi-resolusi dari berbagai partai politik ketika sidang Kabinet pada tanggal 26

---

<sup>41</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 45.

Juni 1947 mengakibatkan Kabinet menyerahkan *portefeuille* kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 1947 pukul 03.15 WIB Presiden Soekarno menerima portepel Sjahrir tersebut. Dengan diterimanya portepel Sjahrir maka berakhirilah masa kerja Kabinet Sjahrir yang ketiga, dengan masa kerja selama delapan bulan dua puluh lima hari.<sup>42</sup> Berakhirnya masa kerja Kabinet Sjahrir III, maka berakhir pula tugas Maria Ullfah sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir III. Selama dua periode Kabinet Sjahrir, Maria Ullfah adalah perempuan pertama yang menduduki jabatan menteri dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Selama Maria Ullfah menjabat sebagai Menteri Sosial, ia mengisahkan empat peristiwa yang mengesankan dalam hidupnya. Peristiwa pertama adalah perayaan satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1946 di Pegangsaan Timur.<sup>43</sup> Maria Ullfah yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial meminta izin kepada Presiden Soekarno untuk tidak mengikuti upacara perayaan satu tahun berdirinya Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada hari peringatan satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Maria Ullfah sudah berjanji kepada kaum ibu di Jakarta untuk ikut serta dalam Pawai Wanita yang akan menuju ke Pegangsaan Timur. Pawai tersebut diprakarsai oleh Setiati dari Barisan Buruh Wanita.

Kaum ibu-ibu yang berpakaian merah-putih telah siap memulai pawai, mereka berangkat dari kantor WANI (Wanita Negara Indonesia). Rencananya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 81.

rombongan pawai akan menuju ke Pegangsaan Timur, tetapi rombongan tidak dapat masuk ke jalan Pegangsaan Timur karena dihadang oleh tentara Gurkha. Akhirnya rombongan memutuskan untuk mencari jalan lain, yaitu jalan menuju halaman belakang Pegangsaan Timur. Ternyata di halaman belakang Pegangsaan Timur juga dijaga tentara Gurkha. Rombongan ibu-ibu Jakarta pada akhirnya tidak diizinkan masuk, padahal di Pegangsaan Timur tengah berlangsung upacara penyerahan “Tugu Proklamasi”, yaitu sebuah tugu yang dipersembahkan oleh kaum ibu-ibu Jakarta kepada pemerintah Republik Indonesia. Seorang wartawan berita Inggris Reuter melihat Maria Ulfah berada di tengah-tengah kaum ibu yang berdemo karena tidak boleh masuk mengikuti upacara penyerahan. Wartawan tersebut melaporkan bahwa diantara kaum perempuan yang dihalangi masuk Pegangsaan Timur untuk menghadiri upacara penyerahan terdapat Menteri Sosial Republik Indonesia.

Peristiwa kedua adalah ketika Maria Ulfah bertemu dengan Lord Louis Mountbatten, *Commander In Chief* (CIC) tentara sekutu yang berkedudukan di Singapura. Lord Louis Mountbatten datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Perdana Menteri RI dan Menteri Wanita Republik Indonesia.<sup>44</sup> Sebelum datang ke Jakarta pada tanggal 25 April 1946, terlebih dahulu markas komando sekutu di Singapura mengirimkan kawat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kawat pertama mengatakan Lord Louis Mountbatten ingin bertemu dengan Sjahrir, selanjutnya kawat kedua menyatakan bahwa ia ingin bertemu dengan menteri wanita RI. *”I wanna see that lady minister”*, kenang Maria Ulfah. Pada saat Lord

---

<sup>44</sup> Maria Ulfah Subadio, *op.cit.*, hlm. 95.

Louis Mountbatten datang ke Jakarta, Maria Ullfah sedang mengadakan kunjungan kerja ke Solo. Seorang petugas memberitahu Maria Ullfah untuk segera pergi ke Jakarta, karena ia sedang dicari Perdana Menteri Sjahrir. Mendengar berita tersebut, Maria Ullfah langsung berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Setibanya di Jakarta, Maria Ullfah langsung menuju ke Pegangsaan Timur 56 dimana Sjahrir tinggal. Bersama dengan Sjahrir dan Ir. Surachman Menteri Keuangan RI, Maria Ullfah pergi ke rumah Letnan Kolonel Van der Post yang menjadi penghubung tentara sekutu di jalan Imam Bonjol No. 2 Jakarta. Perjalanan dari Pegangsaan Timur menuju jalan Imam Bonjol harus dilakukan dengan hati-hati, karena hampir seluruh wilayah Jakarta telah dikuasai tentara Belanda. Akhirnya rombongan Maria Ullfah dapat tiba dengan selamat dan bisa bertemu dengan Lord Louis Mountbatten, Jenderal Mansergh, dan Letnan Kolonel Van der Post.

Peristiwa ketiga adalah perjalanan Maria Ullfah ke Sumatera pada tahun 1947. Perjalanan tersebut merupakan kunjungan resmi pertama Pemerintah RI ke pulau Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, Menteri Dalam Negeri.<sup>45</sup> Selain itu, ikut pula Ir. Putuhena Menteri Pekerjaan Umum, Mr. Syafruddin Prawiranegara Menteri Keuangan, Mr. Soemarman Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri. Selain berkunjung, rombongan Maria Ullfah akan menghadiri sidang Komite Nasional di Bukit Tinggi. Rakyat Sumatera menyambut kedatangan rombongan Maria Ullfah dengan gembira, hal ini karena untuk pertama kalinya rakyat Sumatera melihat secara langsung para pemimpin

---

<sup>45</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 83.

dari negara mereka yang telah merdeka. Terlebih dengan hadirnya Maria Ulfah, sosok perempuan pertama yang duduk dalam pemerintahan.

Sambutan atas kedatangan Maria Ulfah pun datang dari ibu-ibu yang menjadi janda karena suami mereka menjadi korban saat revolusi sosial yang melanda Sumatera Timur. Di antara janda-janda tersebut terdapat janda Amir Hamzah, pujangga terkenal yang pernah menjadi guru bahasa Indonesia Maria Ulfah. Amir Hamzah yang harus meninggalkan studinya karena memenuhi kewajibannya sebagai calon Sultan Langkat, turut menjadi korban revolusi sosial yang digerakkan oleh kaum kiri yang menentang feodalisme. Akibat dari revolusi sosial tersebut hampir seluruh keluarga kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara menjadi korban. Dalam kunjungan tersebut Maria Ulfah juga melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Sosial, yaitu membantu para korban revolusi yang masih selamat. Para korban selamat disekap di kamp-kamp tawanan yang terletak di pegunungan dengan cuaca yang sangat dingin. Para korban selamat tersebut meminta bantuan Maria Ulfah, untuk menyediakan selimut dan pakaian tebal bagi mereka. Sebagai Menteri Sosial Maria Ulfah mengabulkan permintaan tersebut dan langsung memberikan bantuan berupa selimut dan pakaian tebal.

Tindakan Maria Ulfah tersebut langsung mendapatkan kritikan dari golongan kiri yang disampaikan oleh Abdul Karim. Mendapat kritikan perihal tindakannya tersebut, Maria Ulfah langsung marah dan menyampaikan kemarahannya melalui pidato di depan Masyarakat Sumatera Utara.

“Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, di mana keadilan merupakan salah satu silanya. Masyarakat wajib berlaku adil terhadap mereka. Tawanan ini ditempatkan di sana bukan atas

kemauan mereka sendiri. Maka karena itu orang harus berlaku adil pada mereka”, kata Maria Ullfah.<sup>46</sup>

Sikap berani Maria Ullfah tersebut mendapat pujian dari Mohammad Roem yang disampaikannya dalam karangannya di harian Kompas tanggal 18 Agustus 1981. Menurut Mohammad Roem sikap Maria Ullfah tersebut merupakan salah satu bukti sifat pemberani Maria Ullfah yang telah berkali-kali ditunjukkan dalam jalan hidupnya. Maria Ullfah merupakan sosok perempuan yang berani dan tegas dalam menjalani setiap tugas dan pekerjaannya. Akhirnya kunjungan rombongan pemerintah Republik Indonesia harus dihentikan, sehingga rencana perjalanan ke Aceh harus dibatalkan. Rombongan harus segera kembali ke Jakarta mengingat situasi politik yang tengah terjadi.

Peristiwa keempat atau peristiwa terakhir yang membuat Maria Ullfah terkesan adalah ketika ia melakukan perjalanan ke luar negeri. Bersama Perdana Menteri Sjahrir dan rombongan besar lainnya, Maria Ullfah diundang dalam acara *Inter Asian Relations Conference* yang diselenggarakan di New Delhi. Dalam acara tersebut Maria Ullfah bertemu dengan Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, dan Sarojini Naidu ketua dari *Inter Asian Relations Conference*. Sekembalinya dari New Delhi rombongan Maria Ullfah terlebih dahulu singgah ke Rangoon, Burma. Di Burma rombongan tidak dapat bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus pejuang kemerdekaan Burma Jenderal Aung Sang karena sedang menjalankan tugas di Upper, Burma. Meskipun tidak dapat bertemu dengan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

Jenderal Aung Sang, Maria Ulfah tetap berkesempatan untuk bertemu dengan istrinya yang kemudian menjadi sahabat Maria Ulfah.

### **B. Maria Ulfah dalam Kabinet Parlementer**

Sejak Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno tanggal 27 Juni 1947, maka secara resmi Kabinet Sjahrir III dinyatakan demisioner.<sup>47</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kabinet yang dipimpin oleh Sjahrir telah jatuh sebanyak tiga kali. Kabinet Sjahrir III jatuh bukan karena adanya partai oposisi seperti pada tahun sebelumnya atau terjadi perubahan sistem pemerintah, tetapi dikarenakan adanya keretakan di dalam tubuh kabinet itu sendiri, terutama keretakan dalam Partai Sosialis yang menjadi pendukung utama Kabinet Sjahrir III. Partai-partai yang pada mulanya mendukung Sjahrir berbalik arah menjadi menentang konsensi Sjahrir dalam perundingan dengan Belanda. Penjelasan Sjahrir mengenai keadaan politik Republik Indonesia dan masalah perundingan mengenai nota penegasan dari Belanda menimbulkan perdebatan di antara peserta sidang yang akhirnya memunculkan resolusi-resolusi dari berbagai partai.

Umumnya resolusi dari partai-partai peserta sidang menyatakan tidak setuju dengan kompromi yang terkandung di dalam surat menyurat antara delegasi Republik Indonesia dengan Komisi Jenderal, karena dinilai tidak menjamin adanya persatuan antara pemerintah dan rakyat. Atas penyerahan kembali portepel kabinet, maka presiden mengambil alih semua kekuasaan pemerintah untuk sementara waktu hingga terbentuk kabinet baru. Sebagai upaya untuk membentuk kabinet baru, Presiden Soekarno menunjuk empat orang formatir kabinet pada

---

<sup>47</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 50.

tanggal 30 Juni 1947. Keempat orang formatir kabinet tersebut adalah Mr. Amir Syarifuddin (Partai Sosialis), Dr. A.K. Gani (Partai Nasionalis Indonesia), Dr. Sukiman Wiryoanjoyo (Masyumi), dan Drs. Setiyajid (Partai Buruh Indonesia).<sup>48</sup> Keempat orang tersebut bertugas untuk menyusun kabinet koalisi berdasarkan nasional. Hingga batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 1 Juli 1947, keempat formatir tersebut tidak dapat menyusun kabinet baru dan menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.

Kegagalan keempat formatir kabinet tersebut disebabkan oleh sikap partai Masyumi yang menuntut kursi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri.<sup>49</sup> Akibatnya dalam penyusunan kabinet baru partai Masyumi tidak diikutkan kembali untuk menjadi formatir kabinet. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1947 kabinet baru yang bercorak nasional telah terbentuk dengan Mr. Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menternya. Amir Syarifudin merupakan satu tokoh yang sangat diuntungkan dengan jatuhnya Sjahrir, ia adalah kawan Sjahrir di Partai Sosialis. Perbedaan pendapat diantara keduanya mengakibatkan Partai Sosialis pecah menjadi dua, yaitu satu Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sjahrir dan yang satu lagi Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifudin.

Kabinet Amir Syarifuddin yang terbentuk tidak mengikutsertakan partai Masyumi dalam keanggotaan kabinetnya. Sejak awal berdirinya Kabinet Amir Syarifuddin, Partai Masyumi telah mengeluarkan maklumat untuk menjelaskan

---

<sup>48</sup> Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>49</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 51.



pendirian partainya yang tidak ikut serta dalam kabinet. Maklumat tersebut berbunyi, “lebih baik mengundurkan diri, dari pada turut campur dengan tidak pernah menjamin bisa bekerja kolektif, dan seterusnya”.<sup>50</sup> Banyak kalangan yang menyambut baik keputusan tersebut, karena dengan tidak ikutnya Partai Masyumi dalam kabinet maka fanatisme yang terjadi di kampung-kampung akan berkurang dan persatuan dikalangan kepartaian tidak akan terganggu dengan propaganda-propaganda Partai Masyumi.

Corak Kabinet Amir Syarifuddin masih sama dengan Kabinet Sjahrir, yaitu diplomasi. Kalangan Masyumi yang tidak ikut duduk dalam kabinet menilai bentuk kabinet Amir Syarifuddin adalah kabinet tergopoh-gopoh yang tidak mungkin berdiri lama serta tidak akan memberi politik yang tegas.<sup>51</sup> Bagi Masyumi, corak kabinet yang masih meneruskan politik Sjahrir tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan tidak dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Sejak jatuhnya Kabinet Sjahrir, Partai Masyumi merupakan salah satu partai yang sangat senang dengan peristiwa tersebut. Partai Masyumi yang tidak menyetujui politik Sjahrir menyambut gembira penyerahan kekuasaan Kabinet Sjahrir III kepada presiden dan berharap bahwa Partai Masyumi dapat berkuasa, meskipun pada akhirnya Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifuddin yang menjadi penguasa baru.

---

<sup>50</sup> ANRI, Kementerian Penerangan No. 239, *Berkas Mengenai Jatuhnya Kabinet Sjahrir*.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

Sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin diminta presiden untuk segera menyusun anggota kabinet yang baru. Pada saat akan menyusun anggota kabinetnya yang baru, Amir Syarifuddin menemui Maria Ulfah dan memintanya untuk duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin. “Saya ditawari lagi untuk menjadi menteri oleh Amir Syarifuddin yang menggantikan Sjahrir sebagai Perdana Menteri, tetapi saya tidak menerima tawaran tersebut”, tulis Maria Ulfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*.<sup>52</sup> Maria Ulfah yang lebih bersimpati kepada Sjahrir memilih menolak tawaran tersebut. Penolakan tersebut ia sampaikan secara diplomatis, yaitu dengan alasan bahwa ia sudah capek dan ingin beristirahat dahulu. Amir Syarifudin selanjutnya menempatkan S.K. Trimurty sebagai Menteri Perburuhan dalam kabinet barunya.

Meskipun ditolak oleh Maria Ulfah, Amir Syarifuddin tidak menyerah begitu saja. Sebulan setelah peristiwa penolakan tersebut, Amir Syarifuddin datang kembali kepada Maria Ulfah dan memintanya untuk duduk sebagai Sekretaris Perdana Menteri sekaligus kepala Sekretariat Dewan Menteri.<sup>53</sup> Maria Ulfah tidak dapat menolak tawaran Amir Syarifuddin tersebut, karena bagi Amir Syarifuddin masa istirahat Maria Ulfah telah usai dan menurutnya sudah waktunya bagi Maria Ulfah untuk kembali menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara. Sejak tanggal 19 Agustus 1947 Maria Ulfah resmi sebagai Sekretaris Perdana Menteri sekaligus kepala Sekretariat Dewan Menteri. Jabatan tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi Direktur Kabinet RI.

---

<sup>52</sup> Maria Ulfah Subadio, *loc.cit.*,

<sup>53</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 96.

Meskipun kedudukannya sebagai Sekretaris Perdana Menteri tidak begitu mentereng seperti jabatannya ketika menjadi menteri, tetapi bagi Maria Ullfah jabatannya tersebut dinilai lebih bermanfaat bagi bangsanya. Maria Ullfah menilai pekerjaannya sebagai Sekretaris Kabinet lebih berat dari pada menjadi seorang menteri. ”Pekerjaan sebagai Sekretaris Kabinet sebetulnya jauh lebih berat daripada pekerjaan sebagai menteri”, tulis Gadis Rasid dalam biografi Maria Ullfah.<sup>54</sup> Pekerjaan seorang menteri hanya menghadiri rapat kabinet dan mengambil keputusan, sedangkan pekerjaan seorang kepala Sekretaris Kabinet adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut. Maria Ullfah bertanggung jawab atas pelaksanaan segala keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam rapat kabinet.

Jabatan Maria Ullfah sebagai Direktur Kabinet RI dilakukannya hingga tahun 1962, ia tercatat mengabdikan diri kepada enam perdana menteri, yaitu dari Amir Syarifuddin, Moh. Hatta, Moh. Natsir, Wilopo, Ali Sastroamidjojo hingga Djuanda.<sup>55</sup> Meskipun kabinet selalu berubah, tetapi Maria Ullfah sebagai pejabat administratif dan non-politik tetap memegang kendali administratif tertinggi. Selama lebih dari lima belas tahun Maria Ullfah mengabdikan sebagai Direktur Kabinet RI dan Maria Ullfah mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama dalam rangkaian Sekretaris Negara Republik Indonesia.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>55</sup> Rosihan Anwar, *In Memoriam Mengenang yang Wafat*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 126.

Pasca terjadinya Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 mengakibatkan kondisi keamanan Republik Indonesia menjadi tidak menentu. Sering terjadinya peristiwa tembak-menembak antara tentara Republik Indonesia dengan tentara Belanda mengakibatkan kondisi keamanan negara semakin memburuk, terlebih dengan dikuasainya beberapa daerah di Indonesia oleh tentara Belanda. Kantor-kantor pemerintah yang berada di Jakarta diambil alih oleh pemerintah Belanda. Akibatnya staf kantor Perdana Menteri yang pada masa Sjahrir berada di Jakarta harus dipindahkan ke Yogyakarta. Tindakan Belanda tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai negara di dunia, seperti India dan Australia yang mengajukan permintaan resmi kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) agar masalah Indonesia-Belanda segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan.

Pada Agustus 1947, mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir bersama Menteri Luar Negeri H. Agoes Salim dan beberapa pemimpin lainnya berkesempatan untuk menyampaikan permasalahan Indonesia di dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Sjahrir bersama pimpinan Indonesia lainnya mendapat kesempatan untuk menyampaikan protes kepada Dewan Keamanan PBB atas sikap tentara Belanda yang melakukan aksi militer di Indonesia. Terkait dengan masalah tersebut akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menghentikan pertikaian, gencatan senjata tersebut dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 220.

Selain itu, upaya yang ditempuh PBB untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda adalah dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Pertemuan antara ketiga negara tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk mengadakan kembali sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan antara Indonesia dan Belanda akhirnya menghasilkan suatu persetujuan yang ditandatangani di geladak kapal *Renville* pada tanggal 17 Januari 1948. Karena perundingan dilaksanakan di atas kapal *Renville* maka perjanjian antara Indonesia dan Belanda dinamakan dengan “Perjanjian *Renville*”.

Pasca terjadinya perundingan *Renville*, beberapa partai politik menyatakan menentang hasil perundingan tersebut. Masyumi yang menjadi pendukung utama kabinet, menarik menteri-menterinya yang berada di dalam Kabinet Amir Syarifuddin. Selain Masyumi, PNI pun menolak Persetujuan *Renville* karena persetujuan tersebut tidak menjamin dengan tegas kelanjutan dan kedudukan Republik Indonesia. Kabinet Amir Syarifudin yang hanya mendapat dukungan dari Sayap Kiri akhirnya menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948.<sup>57</sup> Sesudah Kabinet Amir Syarifuddin dinyatakan demisioner, Presiden Soekarno menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru yang terbentuk tidak lagi menggunakan sistem Parlementer, tetapi menggunakan sistem Presidensil dimana kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

Amir Syarifuddin yang tersingkir dari pemerintahan memutuskan untuk menjadi oposisi dari Kabinet Hatta. Ia pun mendirikan Front Demokrasi Rakyat

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

(FDR) yang terdiri atas partai-partai dan organisasi kiri, seperti Partai Sosialis (PS), Partai Komunis Indonesia (PKI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI).<sup>58</sup> FDR menuntut pemerintah agar membubarkan Kabinet Hatta dan menggantinya dengan kabinet parlementer. Selain itu, FDR menuntut pula pembatalan Perjanjian Renville yang *notabene* merupakan produk dari Kabinet Amir Syarifuddin yang juga ketua FDR.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredam pihak oposisi. FDR yang pada awalnya menyetujui program nasional bentukan Panitia Tambunan tetap pada pendiriannya yaitu meminta agar Kabinet Hatta dibubarkan dan diganti dengan kabinet parlementer. Keinginan FDR tersebut ditolak oleh partai-partai lain yang menganggap Kabinet Hatta tidak perlu diganti atau tidak perlu melakukan *reshuffle*. Ditolaknya keinginan FDR oleh partai-partai membuat usaha FDR untuk menjatuhkan Kabinet Hatta menuai kegagalan. FDR yang gagal menjatuhkan Kabinet Hatta, pada bulan Juli 1948 menyusun program sendiri yang disebut “Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru”.<sup>59</sup> Program baru tersebut diharapkan dapat menjatuhkan Kabinet Hatta dari pemerintahan. Tahap pertama

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

<sup>59</sup> “Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru” merupakan program baru FDR sebagai pihak oposisi. Program tersebut dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap parlementer dan non-parlementer. Tahap parlementer merupakan cara FDR untuk mempengaruhi Badan Pekerja KNIP agar mengeluarkan mosi untuk menjadikan program nasional sebagai program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kabinet parlementer, selanjutnya tahap non-parlementer merupakan langkah kedua yang digunakan FDR untuk merebut pemerintahan dengan menggunakan cara kekerasan, lihat *Ibid.*, hlm. 233-234.

dilakukan FDR dengan menggunakan kaum tani dan buruh dibawah organisasi SOBSI agar melakukan pemogokan pada bulan Juni 1948 di Delangu. Masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan perundingan dan pemogokan berakhir pada tanggal 18 Juli 1948.

Sekali lagi usaha FDR untuk menjatuhkan Kabinet Hatta gagal, langkah selanjutnya yang diambil FDR adalah dengan melaksanakan tahap kedua dari program baru yaitu menggunakan cara kekerasan. Puncaknya adalah pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Pada peristiwa tersebut beberapa kantor-kantor pemerintah di wilayah Madiun berhasil dikuasai pasukan bersenjata. Selain itu, banyak terjadi aksi pembunuhan yang dilakukan pihak PKI, tercatat terdapat sebelas orang pejabat dan tujuh tokoh partai di Madiun dibunuh.<sup>60</sup> Di balai Kota Madiun, PKI memproklamkan berdirinya “Sovyet Republik Indonesia”. Reaksi pemerintah Republik Indonesia atas peristiwa tersebut adalah dengan menyatakan tindakan PKI di Madiun merupakan tindakan pengacau negara dan harus segera di berantas, pernyataan tersebut disampaikan Hamengku Buwono IX selaku Menteri Negara. Akhir dari pemberontakan PKI Madiun adalah dengan ditangkapnya Amir Syarifuddin dan beberapa tokoh PKI lainnya di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948.

Pasca pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah Republik Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin berkuasa kembali di Republik Indonesia. Perundingan demi perundingan yang dilakukan setelah *Renville* pada akhirnya menemui kegagalan dan berujung pada ultimatum dari pihak Belanda.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

Ultimatum tersebut dikirim kepada Jusuf Ronodipuro, *liaison officer* delegasi RI di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1948. Isi ultimatum tersebut adalah “Terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak terikat dengan Persetujuan *Renville* dan perjanjian gencatan senjata”.<sup>61</sup> Pihak delegasi RI yang berada di Jakarta tidak dapat mengirimkan kawat ke Yogyakarta karena hubungan telepon dan telegram dengan Yogyakarta sudah diputus oleh pihak Belanda. Akibat kejadian tersebut pemerintah Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta tidak mengetahui perkembangan terakhir yang terjadi.

Pada pagi harinya, yaitu tanggal 19 Desember 1948 pihak Belanda membuktikan ultimatum yang dikirim sehari sebelumnya dengan melakukan Agresi Militer Belanda II. Tentara Belanda mulai bergerak dengan menyerang Lapangan Terbang Maguwo di Yogyakarta. Selain itu, tentara Belanda juga menurunkan pasukan payungnya untuk menduduki pangkalan udara Maguwo. Akibat serangan tersebut akhirnya Yogyakarta berhasil dikuasai oleh pihak Belanda dan dengan segera para pimpinan Republik Indonesia berhasil ditawan, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Sebelum terjadi peristiwa penangkapan tersebut, para pemimpin Republik Indonesia telah membahas situasi politik yang tengah terjadi dan memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera dengan pimpinannya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara.<sup>62</sup> Mandat tersebut sebenarnya tidak pernah sampai ke tangan Mr. Syafruddin Prawiranegara, tetapi atas inisiatif Syafruddin bersama T.M. Hasan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>62</sup> Slamet Muljana, *op.cit.*, hlm. 202.



dan Kolonel Hidayat akhirnya terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 22 Desember 1948 dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI.

Agresi Militer Belanda kedua tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia, terlebih bagi Maria Ullfah. Maria Ullfah yang sejak menjadi Menteri Sosial menetap di Yogyakarta harus tinggal terpisah dari Santoso yang tinggal di Solo karena bekerja pada Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada akhir pecan Santoso bersama dengan Soetoyo, kakak iparnya yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia berangkat ke Yogyakarta bersama dengan dua pegawai perempuan dari Departemen P dan K, Nani Soemadipradja dan Kayatun.<sup>63</sup> Ketika akan kembali ke Solo, Santoso mendapat kabar bahwa Maguwo telah dikuasai Belanda sehingga jalur kereta api Yogyakarta-Solo tidak beroperasi. Santoso yang merasa memiliki kewajiban di Solo memutuskan untuk kembali ke Solo. Bersama dengan kakak ipar dan dua pegawai perempuan dari Departemen P dan K, mereka memutuskan untuk pulang menggunakan mobil Soetoyo.

Di tengah perjalanan yaitu di persimpangan jalan menuju ke lapangan terbang Maguwo, mobil yang ditumpangi Santoso dihentikan oleh seorang koprak Belanda. Rombongan Santoso diminta untuk turun dari mobil dan berdiri dipinggir jalan bersama dengan beberapa petani yang kebetulan melintas. Tidak lama kemudian datang seorang tentara berpangkat sersan mayor yang datang dalam keadaan mabuk dan berteriak kepada Santoso dan rombongannya. "Itulah

---

<sup>63</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 99.

mereka orang Republik kotor persetan”, tulis Gadis Rasid dalam biografi Maria Ullfah.<sup>64</sup> Selanjutnya tentara tersebut mengeluarkan pistol dan langsung menembaki para tawanan, melihat tindakan tersebut kopral yang menghentikan rombongan Santoso berteriak,” Mayor ada wanita”, sehingga aksi penembakan dihentikan. Santoso dan Soetoyo yang tertembak akhirnya meninggal di tempat, sedangkan kedua pegawai perempuan yang ikut dalam rombongan selamat. Mereka ditawan di pos penjagaan tentara Belanda selama satu malam, keesokan harinya kedua pegawai tersebut dipulangkan ke Yogyakarta. Mayat Santoso dan Soetoyo dibiarkan tergeletak ditempat kejadian, atas permintaan keluarga mayat keduanya dievakuasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan dimakamkan di Yogyakarta.

Berita tentang peristiwa penembakan Santoso telah tersiar dikalangan wartawan-wartawan luar negeri. Mereka yang penasaran dengan keadaan di Yogyakarta memutuskan untuk melihat langsung keadaan Yogyakarta. Di antara wartawan tersebut terdapat Goerge Kahin, seorang sarjana Amerika yang sedang melakukan penelitian di Indonesia, ia juga merupakan sahabat lama Maria Ullfah. George Kahin dan rombongan wartawan lainnya datang ke PMI dan mendengar langsung bagaimana peristiwa penembakan tersebut terjadi. Berita penembakan tersebut langsung dikirim ke seluruh dunia dan bukan itu saja, berita tentang kematian Santoso pun digunakan Sjahrir dalam persidangan PBB yang membahas tentang gerakan militer Belanda di Republik Indonesia. Belanda yang selalu mengatakan bahwa aksi militernya di Indonesia merupakan aksi polisionil untuk

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

menertibkan orang-orang Indonesia yang bersenjata hanyalah *isapan jempol* belaka. Menanggapi peristiwa penembakan Santoso, militer Belanda memiliki pendapat tersendiri yaitu melalui siaran resmi militer Belanda yang dimuat dalam Koran *Pelita Rakjat*, 28 Februari 1949:

“Setelah ini mobil tersebut ditembaki, dengan akibat bahwa sopir tersebut kena tembakan. Kemudian mobil berhenti dan penumpang-penumpang keluar, komandan rombongan militer di tempat itu tampil kemuka. Ketika diadakan geledahan pada penumpang laki-laki, salah seorang di antara mereka mencoba menarik pistolnya yang disimpannya pada tali pinggangnya. Komandan militer kemudian menembak ketiga penumpang yang laki-laki dengan akibat terbunuhnya mereka semua”.<sup>65</sup>

Berita tentang peristiwa penembakan Santoso yang tersiar luas membuat Maria Ullfah dipanggil oleh tentara Belanda. Maria Ullfah dibawa ke markas tentara Belanda di Terban Taman untuk dimintai keterangannya terkait berita penembakan Santoso yang tersebar luas. Orang-orang yang melihat Maria Ullfah dibawa tentara Belanda mengira bahwa Maria Ullfah akan ditahan, tetapi setelah dimintai keterangan tentang berita tersebut Maria Ullfah dibebaskan.

Kabar tentang kematian Santoso sangat mengejutkan Raden Mohammad Achmad yang saat itu tinggal di Jalan Guntur 49, Jakarta. Sebulan setelah peristiwa tersebut Raden Mohammad Achmad sakit keras dan mengalami “koma”. Maria Ullfah dan Iwanah yang mendengar kabar bahwa ayah mereka sakit langsung pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat yang dipinjam oleh tentara Belanda. Sehari setelah kedatangan Maria Ullfah dan Iwanah, Raden Mohammad Achmad akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1949.

---

<sup>65</sup> Bonnie Triyana, dkk, “Empat Duka Dalam Semasa”, *op.cit.*, hlm. 48.

Dalam waktu kurang dari dua bulan Maria Ullfah telah kehilangan dua orang yang sangat ia cintai, suami dan ayahnya.

Sebagai upaya untuk menarik simpati dari Maria Ullfah, pemerintah Belanda mengirimkan utusan untuk datang ke rumahnya di Jalan Guntur 49. Utusan tersebut adalah Dr. Louis Graf, seorang Indolog (ahli mengenai Indonesia) lulusan Universitas Lieden, Belanda.<sup>66</sup> Dr. Louis Graf datang kepada Maria Ullfah untuk menyampaikan rasa belasungkawanya atas meninggalnya ayah dan suami Maria Ullfah. Selain itu, Dr. Louis Graf juga menyampaikan pesan dari pemerintah Belanda yang turut berduka cita sekaligus menyesal atas peristiwa di Maguwo yang menewaskan suami Maria Ullfah. Dr. Louis Graf selanjutnya menawarkan santunan berupa uang dari pemerintah Belanda yang kemudian ditolak Maria Ullfah.

Peristiwa tersebut selanjutnya diceritakan kepada ibu Santoso. Mendengar cerita tersebut ibu Santoso marah dan mempertanyakan bagaimana nasib kakak ipar Maria Ullfah yang telah menjanda akibat suaminya yang ikut tewas dalam peristiwa Maguwo. Kakak ipar Maria Ullfah yang seorang janda tanpa bekal pendidikan seperti Maria Ullfah masih harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Hal tersebut yang membuat Maria Ullfah akhirnya meminta bantuan kepada Drs. Boogaardt agar membantu kakak iparnya tersebut.

Berita tentang Agresi Militer Belanda kedua telah diterima oleh Dewan Keamanan PBB yang berada di Paris. Tindakan Belanda tersebut mendapat kecaman dari berbagai negara seperti New Delhi yang diwakili oleh Perdana

---

<sup>66</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 101.

Menteri Nehru pada tanggal 20-23 Januari mengadakan konferensi mengenai sengketa Indonesia dan Belanda.<sup>67</sup> PBB melalui Dewan Keamanan pada tanggal 24 Januari 1949, mengeluarkan resolusi kepada Belanda agar menghentikan Agresi Militer yang tengah terjadi, selain itu PBB meminta agar para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan segera dibebaskan. Atas desakan Dewan Keamanan PBB dan beberapa negara akhirnya pemerintah Belanda mulai membuka kembali perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 13 Februari 1949 secara resmi menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia mau melakukan perundingan dengan pihak Belanda dengan syarat dikembalikannya pemerintahan RI ke Yogyakarta dan ditariknya pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan resolusi PBB.<sup>68</sup> Menanggapi pernyataan Moh. Hatta, pihak Belanda akhirnya mengembalikan para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak Belanda kembali dilaksanakan di Yogyakarta yaitu pada tanggal 19-22 Juli 1949, perundingan tersebut dikenal dengan nama Konferensi Antar-Indonesia. Hasil dari konferensi tersebut adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal dengan nama RIS. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

---

<sup>67</sup> Slamet Muljana, *op.cit.*, hlm. 218.

<sup>68</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 262.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda pada akhirnya berbuah manis, pada tanggal 27 Desember 1949 secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia diseluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda (kecuali Papua). Pengakuan Belanda tersebut secara resmi mengakhiri perang kemerdekaan Indonesia dan merupakan suatu batu loncatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara merdeka dan berdaulat. Pasca penyerahan kedaulatan, Maria Ullfah diminta Moh. Hatta untuk kembali ke Jakarta dan memulai pekerjaannya sebagai Sekretaris Kabinet. Dalam wawancaranya dengan Dewi Fortuna Anwar, Maria Ullfah mengisahkan tentang kantor barunya di Kebon Sirih yang kurang layak digunakan sebagai kantor. Maria Ullfah meminta kepada Moh. Hatta agar kantor Sekretaris Kabinet dibuat lebih baik, menurut Maria Ullfah seharusnya kantor Sekretaris Kabinet dibuat lebih representatif dari pada kantor Uni-Belanda-Indonesia. Ucapan Maria Ullfah terbukti dengan adanya berbagai pemberontakan di dalam negeri, akhirnya pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk awal yaitu negara kesatuan.

Berakhirnya RIS menandai kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia, dan hal tersebut menandai kembalinya Moh. Hatta kepada posisi awal yaitu sebagai Wakil Presiden. Posisi Perdana Menteri selanjutnya di pegang oleh Mohammad Natsir, yang menjabat Perdana Menteri mulai September 1950 hingga Maret 1951. Pada masa Kabinet Natsir, Maria Ullfah diusulkan oleh Mohammad Natsir selaku Perdana Menteri untuk menjadi wakil diplomatik Indonesia di negeri Belanda. Jabatan tersebut sama tingkatannya dengan *ambassador* Indonesia

di Belanda. Tawaran tersebut ditolak Maria Ullfah, karena bagi Maria Ullfah tenaga dan pikirannya masih diperlukan di dalam negeri. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Maria Ullfah bersama dengan Mr. Moh. Yamin menyambut Dr. Helen Keller seorang duta besar untuk Indonesia.<sup>69</sup> Pemerintah Indonesia mengundang Dr. Helen Keller ke Indonesia untuk memberikan inspirasi kepada orang-orang Indonesia yang memiliki kekurangan, dalam hal ini cacat fisik untuk tetap bersemangat menjalani hidup. Kedatangan Dr. Helen Keller ke Indonesia merupakan wujud diplomasi pemerintah Indonesia dengan dunia Internasional.

Pada masa Kabinet Djuanda yaitu tahun 1957, Maria Ullfah yang masih menjabat sebagai Direktur Kabinet RI mendapat tugas dari Perdana Menteri Djuanda untuk melakukan perjalanan “*studytour*” ke Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina.<sup>70</sup> Perjalanan tersebut bertujuan untuk mempelajari sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara tersebut. Selain itu, Maria Ullfah juga berkunjung ke *Institute of Public Administration*. Selanjutnya ketika sampai di Amerika Serikat dua pejabat pemerintah RI bergabung dengan Maria Ullfah, yaitu Soemarmo S.H. dari Departemen Dalam Negeri dan Ratmoko S.H. Hasil dari perjalanan tersebut adalah didirikannya suatu Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1958 dan diresmikan oleh Perdana Menteri Djuanda.

---

<sup>69</sup> Anonim, “Tamun Asing di Indonesia”, *Majalah Merdeka*, No. VIII, 1955, hlm. 7.

<sup>70</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 106.

Lebih dari lima belas tahun Maria Ullfah menjabat sebagai Direktur Kabinet RI, mengabdikan kepada enam perdana menteri dari Amir Syarifuddin hingga Djuanda. Meskipun kabinet mengalami peristiwa jatuh bangun, tetapi kedudukan Maria Ullfah sebagai Direktur Kabinet RI tidak tergantikan. Maria Ullfah tetap pada kedudukannya sebagai pejabat administratif yang memegang kendali administrasi tertinggi dalam kabinet. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 merupakan titik awal dari tersingkirnya Maria Ullfah dari pemerintahan. Sejak tahun 1962 kantor Kabinet Perdana Menteri digabungkan dengan kantor Sekretariat Negara. Penggabungan tersebut memiliki arti tersendiri bagi Maria Ullfah, karena dengan digabungkannya kedua kantor tersebut maka kedudukan Maria Ullfah tergeser. Bersama dengan Maria Ullfah ikut pula disingkirkan pejabat-pejabat tinggi lainnya, seperti Saubari S.H, Imam Soedjahri S.H, dan Ali Budiardjo S.H.

Tersingkirnya Maria Ullfah dan beberapa pejabat tinggi lainnya dari Kabinet Perdana Menteri disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik yang tengah terjadi. Sejak tahun 1957 arah pemerintahan Republik Indonesia lebih condong ke kiri. Partai politik yang dianggap berbahaya bagi Partai Komunis Indonesia, seperti Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia disingkirkan. Presiden Soekarno yang mulai condong ke arah kiri, pada bulan Agustus 1960 melarang keberadaan Partai Masyumi dan PSI.<sup>71</sup> Maria Ullfah dan beberapa pejabat tinggi tersebut merupakan orang yang dekat dengan PSI. Meskipun Maria Ullfah dan

---

<sup>71</sup> Rosihan Anwar, *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 179.



beberapa pejabat tinggi tersebut telah dibebaskan dari keanggotaan PSI, tetapi kedekatannya dengan Sjahrir dan beberapa tokoh PSI serta arah pemikiran yang searah dengan Sjahrir membuatnya dianggap sebagai “orang sosialis”. Posisinya sebagai Direktur Kabinet RI membuatnya dianggap sebagai tokoh yang berbahaya bagi keberlangsungan politik orang komunis, karena melalui Kabinet Perdana Menteri segala keputusan-keputusan penting dikelola. Akhirnya selama lebih dari lima belas tahun Maria Ulfah mengabdikan kepada negara Republik Indonesia pada tahun 1962 ia harus melepaskan jabatannya sebagai Direktur Kabinet RI. Maria Ulfah selanjutnya diangkat sebagai pegawai tinggi diperbantukan pada Sekretaris Negara.

### **C. Maria Ulfah dalam Kongres Wanita Indonesia**

Jatuhnya bom atom di dua kota besar Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima memaksa pihak Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada 14 Agustus 1945 di Potsdam. Penyerahan Jepang kepada sekutu tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan pemerintahan yang langsung dimanfaatkan oleh pihak Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara *de facto* sebenarnya pemerintah Jepang masih berkuasa di Indonesia, tetapi untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah Jepang tidak memiliki kewenangan lagi.<sup>72</sup> Pemerintah Jepang yang masih ada di Indonesia hanya bertugas untuk menjaga keamanan daerah Indonesia hingga pemerintah sekutu datang ke Indonesia. Dengan kata lain meskipun Indonesia

---

<sup>72</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 67.

telah memproklamkan kemerdekaan, status Indonesia masih dianggap sebagai daerah jajahan.

Selama masa pendudukan Jepang berbagai organisasi masa maupun organisasi politik dibekukan. Hanya organisasi bentukan Jepang yang dapat berdiri dan melakukan aktivitasnya. Salah satu organisasi yang dibekukan pemerintah Jepang tersebut adalah organisasi perempuan, dan sebagai gantinya didirikan *Fujinkai*. Organisasi tersebut merupakan organisasi perempuan yang dipimpin oleh istri-istri kepala daerah. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, organisasi *Fujinkai* dibubarkan oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito selaku ketua. Selanjutnya dibentuk organisasi perempuan baru yang diberi nama Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI), sedangkan di Jakarta didirikan organisasi Wanita Negara Indonesia (WANI).

Organisasi-organisasi perempuan mengadakan kongres pertamanya di Klaten pada tanggal 15-17 Desember 1945.<sup>73</sup> Kongres tersebut merupakan kongres pertama yang dilaksanakan organisasi-organisasi perempuan pasca kemerdekaan Indonesia. Kongres menghasilkan keputusan untuk menggabungkan PERWANI dan WANI menjadi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Sayangnya dalam kongres tersebut tidak berhasil membentuk suatu wadah pemersatu, Perwari yang awal pembentukannya diharapkan menjadi satu-satunya fusi dari organisasi perempuan hanya menjadi salah satu dari organisasi perempuan yang ada di Indonesia. Selain itu, munculnya organisasi perempuan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

lama maupun baru mengakibatkan tidak adanya pemersatu dari organisasi-organisasi perempuan yang ada.

Pasca pendudukan Jepang Maria Ullfah bersama dengan beberapa tokoh perempuan Indonesia, seperti Ibu S. Kartowijono dan Sri Mangoensarkoro berinisiatif untuk menyatukan kembali organisasi pergerakan perempuan nasional yang sempat terhenti pada masa pendudukan Jepang.<sup>74</sup> Maria Ullfah yang saat itu menjabat sebagai *liaison officer* turut aktif kembali dalam organisasi pergerakan perempuan. Sebagai seorang *liaison officer* yang sering berhubungan dengan tentara Inggris, Maria Ullfah ditugasi oleh Menteri Penerangan untuk menghadiri kongres yang diadakan Pemuda Puteri Indonesia (PPI) yang akan membentuk PPI Pusat. Setelah menyelesaikan tugasnya di Solo, selanjutnya Maria Ullfah pergi ke Klaten untuk mengikuti kongres yang diadakan oleh organisasi-organisasi perempuan.

Setibanya di Klaten, Maria Ullfah yang akan menghadiri kongres mendapatkan pemeriksaan yang sangat ketat. Kondisi keamanan wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi yang tidak kondusif, mengakibatkan munculnya kecurigaan bagi orang-orang yang datang dari Jakarta. Orang-orang tersebut dicurigai sebagai mata-mata Belanda, karena pada saat itu terdengar berita tentang kedatangan mata-mata Belanda yang menggunakan tanda merah-biru-putih di badannya. Maria Ullfah yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan karena harus diperiksa badannya marah. “Saya diutus oleh

---

<sup>74</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, “Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)”, dalam *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu setelah Kartini 1904-1984*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), hlm. 275.

pemerintah kita, masih dicurigai? Awas kalau saya sampai ditelanjangi, saya akan balik langsung ke Jakarta”, kata Maria Ullfah kepada petugas.<sup>75</sup> Mendengar ancaman tersebut, akhirnya Maria Ullfah hanya diperiksa kondanya. Selain Maria Ullfah, seorang utusan dari Yogyakarta juga diperiksa. Utusan tersebut adalah Ny. Aisyah Hilal, anak dari K.H. Achmad Dahlan pendiri dari Muhammadiyah. Ny. Aisyah Hilal pun memprotes tindakan tersebut karena dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meskipun Maria Ullfah dan Ny. Aisyah Hilal tidak jadi diperiksa, pada saat kongres keduanya selalu dikatakan sebagai “mata-mata yang tidak diperiksa”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan persatuan organisasi-organisasi perempuan yang ada, maka pada tanggal 24-26 Februari 1946 diadakan kembali konferensi organisasi-organisasi perempuan Indonesia di Solo. Konferensi tersebut berhasil mendirikan badan gabungan yang diberi nama Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang diketuai oleh Ny. Supardjo dan berkedudukan di Solo. Kowani didirikan sebagai suatu badan gabungan yang berintegrasi pada perjuangan kemerdekaan. Sehingga segala upaya mengenai masalah kedudukan perempuan dalam hukum keluarga dan perkawinan yang dijadikan pokok utama perjuangan pergerakan perempuan sebelum masa pendudukan Jepang untuk sementara dikesampingkan terlebih dahulu. Seluruh organisasi politik maupun non-politik, mengesampingkan cita-cita pribadi organisasinya demi mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>75</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 112.

Kongres kedua Kowani selanjutnya dilaksanakan di Madiun, pada tanggal 14-16 Juni 1946. Kongres tersebut memutuskan bahwa Kowani di bawah pimpinan Ny. Kartowijono akan membantu tentara republik dengan segala cara untuk melawan Belanda. Pasca kongres tersebut, organisasi perempuan yang tergabung dalam Kowani mengirimkan delegasi ke *All Asean Woman Conference*. Delegasi yang dikirim dalam acara tersebut adalah Maria Ullfah yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II, Ny. Yetti Noor, dan Ny. S. Suryohadi. Kongres ketiga Kowani dilaksanakan di Magelang pada tanggal 14-16 Juli 1947. Kongres tersebut diketuai oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito dengan Wakil Ketuannya adalah Maria Ullfah. Pasca kongres tersebut pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militernya di Indonesia. Kejadian tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I atau Clash I. Aksi militer Belanda yang dilancarkan di Indonesia mendapat tanggapan dari Gerakan Perempuan Belanda, yang selanjutnya ditanggapi kembali oleh Kowani dengan mengirimkan resolusi kepada *De Nederlandsche Vrouwenbeweging*.

Kongres keempat Kowani diadakan di Solo pada tanggal 26-28 Agustus 1948. Kongres tersebut diketuai oleh Ny. Pujobuntoro dan sebagai Wakil Ketuannya adalah Maria Ullfah. Tujuan diadakannya kongres adalah untuk meninjau gerak dan usaha Kowani dalam mengatasi perpecahan yang timbul sebagai akibat dari naskah Renville yang terasa pengaruhnya pada Kowani karena Kowani mempunyai anggota dari berbagai aliran.<sup>76</sup> Terjadinya perselisihan pendapat antara perkumpulan-perkumpulan perempuan yang disebabkan

---

<sup>76</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 94.

perbedaan paham politik mengakibatkan organisasi perempuan Islam keluar dari kongres. Adanya perbedaan pandangan antara organisasi perempuan yang berdasarkan agama Islam dan gerakan perempuan yang dekat dengan ideologi komunis tidak memungkinkan adanya kerjasama diantara kedua organisasi tersebut. Kongres keempat Kowani tersebut memutuskan untuk melakukan aksi keluar yaitu memelihara hubungan dengan luar negeri. Selain itu, kongres juga memutuskan untuk membentuk sebuah badan untuk memeriksa penggantian undang-undang dan undang-undang perkawinan di bawah pimpinan Maria Ulfah.<sup>77</sup> Badan lain yang dibentuk adalah badan urusan perburuhan, badan urusan *hygiene* sosial, dan badan urusan pemberantasan buta huruf.

Pasca Kongres keempat Kowani, terjadi pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Memburuknya kondisi keamanan di Indonesia pasca terjadinya pemberontakan PKI di Madiun diperparah dengan terjadinya Agresi Militer Belanda kedua di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948. Kedua peristiwa tersebut mengakibatkan keamanan di wilayah Indonesia semakin memburuk. Sebagai upaya untuk mempersatukan kembali gerakan perempuan dalam kancah perjuangan nasional, para pemimpin Kowani merasa perlu mengadakan pertemuan antara gerakan perempuan.

Pertemuan tersebut akhirnya diadakan di Yogyakarta tanggal 26 Agustus-2 September 1949, dengan dihadiri 82 perkumpulan perempuan dari Jawa dan luar

---

<sup>77</sup> Stuers, Cora Vreede-de, *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 178.

Jawa yang dipimpin oleh Maria Ullfah.<sup>78</sup> Dalam buku *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian* dikatakan bahwa pimpinan pertempuran tersebut adalah Ny. Soepeni. Perbedaan diantara kedua buku tersebut dikarenakan pada saat pertemuan berlangsung, permusyawaratan memutuskan untuk membentuk suatu Badan Kontak bernama “Permusyawaratan Wanita Indonesia”. Badan Kontak tersebut di Ketuai oleh Maria Ullfah, sedangkan Kowani yang merupakan badan tetap penghubung organisasi-organisasi perempuan, keberadaannya masih tetap ada dan diketuai oleh Ny. Soepeni. Kedua organisasi tersebut berdiri berdampingan, karena badan kontak yang baru merupakan Sekretariat yang masih bersifat administratif dan merupakan biro informasi, sedangkan Kowani merupakan Badan Federasi yang bersifat legislatif dan eksekutif. Badan Kontak tersebut berfungsi sebagai Sekretaris yang bertugas mengadakan hubungan dengan organisasi perempuan di daerah pendudukan Belanda.

Memasuki akhir tahun 1949, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa tersebut membuat ketegangan yang terjadi diantara kedua negara berakhir. Setelah perang kemerdekaan berakhir, pada tanggal 17 Agustus 1945 terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>79</sup> Pasca penyerahan kedaulatan bangsa Indonesia memasuki masa pembangunan yang

---

<sup>78</sup> Sujatin Kartowijono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia Ceramah tanggal 27 Maret 1975 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta*. (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), hlm. 14.

<sup>79</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 278.

meliputi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial ekonomi pasca perang kemerdekaan pada umumnya memburuk, ditambah dengan adanya gangguan-gangguan di beberapa daerah. Organisasi perempuan yang pada masa perang kemerdekaan memusatkan perhatian dan tenaganya pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menganggap perlu mengadakan konsolidasi agar dapat dengan baik menghadapi tugas dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Sebagai upaya untuk mempersatukan organisasi-organisasi perempuan agar dapat saling bekerjasama dalam membangun bangsa dengan saling menghargai ideologi masing-masing, maka perlu diadakan kembali kongres. Diharapkan dengan diadakannya kongres dapat tercapai persatuan dan kesatuan untuk membangun kembali negara Republik Indonesia pasca perang kemerdekaan. Sebagai upaya mempersatukan organisasi perempuan maka pada tanggal 24-28 November 1950 Badan Kontak yang berkedudukan di Jakarta bersama-sama dengan pengurus Kowani mengadakan kongres kelima di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari enam puluh tiga organisasi perempuan.

Kejadian penting yang terjadi dalam kongres adalah fusi antara dua badan federatif, yang di dalamnya terhimpun gerakan perempuan yang semasa revolusi kemerdekaan mengalami perpecahan.<sup>80</sup> Kongres tahun 1950 adalah kongres yang sangat penting bagi persatuan dan kesatuan organisasi perempuan, karena dalam kongres tersebut diputuskan untuk menggabungkan Badan Kontak dan Kowani

---

<sup>80</sup> Wieringa, Saskia Eleonora, *op.cit.*, hlm. 228.



dalam satu wadah yaitu Kongres Wanita Indonesia. Kongres Wanita Indonesia yang baru terbentuk berbeda dengan Kowani yang dibentuk pada masa perang kemerdekaan sehingga penulisan nama tidak boleh disingkat dan harus menggunakan nama “Kongres Wanita Indonesia”. Sejarawan Saskia Eleonora Wiering dalam bukunya yang berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* lebih memilih menggunakan nama KWI, federasi, atau Kongres Wanita agar lebih jelas dan singkat.<sup>81</sup> Selain itu, penggunaan istilah “Kowani” secara resmi kembali digunakan pada tahun 1964.

Kongres Wanita Indonesia tidak memiliki Dewan pimpinan seperti Kowani terdahulu, tetapi sebuah Sekretariat yang menampung segala masalah-masalah.<sup>82</sup> Setiap empat bulan diadakan pertemuan musyawarah di mana dibahas berbagai masalah yang ada. Keputusan mengenai dasar dan tujuan kongres hanya dapat dilakukan dengan menggunakan suara bulat, sedangkan keputusan-keputusan lainnya diambil dengan menggunakan suara terbanyak. Struktur organisasi semacam ini dianggap sangat lamban karena sulit sekali untuk mencapai suara bulat, tetapi dalam menyelesaikan masalah organisasi yang menggunakan struktur organisasi yang demikian yang dianggap dapat menampung berbagai masalah. Pada kongres tahun 1950, Maria Ullfah dipilih sebagai ketua sekretariat Kongres Wanita Indonesia.

Pada masa perjuangan ikatan yang kuat antara organisasi mutlak dibutuhkan untuk membantu perjuangan melawan Belanda, sedangkan pasca

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 114.

pengakuan kedaulatan ikatan yang semacam itu dirasa sudah tidak diperlukan lagi. Berbagai ideologi yang dibawa oleh setiap organisasi perempuan dizaman perang kemerdekaan harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan bersama untuk merdeka seutuhnya. Sehingga saat-saat seperti ini dirasa sudah waktunya bagi masing-masing organisasi untuk mengkonsolidasikan dirinya untuk mengadakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan latar belakang ideologinya masing-masing. Setiap organisasi perempuan kembali dapat memperjuangkan ideologi dan pemikiran organisasi masing-masing tanpa harus menahan diri untuk kepentingan bersama.

Pada kongres tahun 1950 tersebut Kowani sebagai badan tetap pemersatu organisasi-organisasi perempuan akhirnya dibubarkan. Pasca kongres tahun 1950 semua cabang Kowani ikut dihapuskan, selanjutnya Kongres Wanita Indonesia sebagai organisasi baru menganjurkan kepada organisasi lokal agar di tiap daerah dibentuk badan kerja sama organisasi perempuan yang merupakan gabungan organisasi lokal. Mengenai nama organisasi di setiap daerah diserahkan kepada masing-masing daerah dan tidak perlu diseragamkan dengan pusat. Sebagai organisasi baru, garis besar kebijakan Kongres Wanita Indonesia mengikuti prinsip dasar Pancasila.

Tujuan Kongres Wanita Indonesia adalah mencapai kemerdekaan yang absolut, realisasi dari hak-hak perempuan sebagai manusia dan sebagai warga negara, dan keamanan internasional dan perdamaian dunia.<sup>83</sup> Melihat dari tujuan Kongres Wanita Indonesia dapat kita katakan bahwa tujuan kongres tidak lagi

---

<sup>83</sup> Stuers, Cora Vreede-de, *op.cit.*, hlm. 181.

untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang dimaksudkan adalah mempertahankan kemerdekaan. Tujuan kongres telah kembali kepada tujuan awal organisasi perempuan, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan. Realisasi dari tujuan tersebut ditunjukkan dalam tuntutan kongres kepada pemerintah, agar diadakan Undang-Undang Perkawinan yang melindungi kaum perempuan, dalam Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan dari Kementerian Agama agar diadakan keseimbangan antara anggota laki-laki dan perempuan dari segala bidang/ agama, dan kepada organisasi-organisasi perempuan dianjurkan untuk mempelajari kedudukan perempuan dalam perkawinan, baik menurut hukum adat maupun hukum agama.

Masalah mengenai Undang-Undang Perkawinan yang menjadi tujuan utama perjuangan organisasi perempuan, dalam tahun-tahun selanjutnya masih tetap menjadi tujuan pokok perjuangan organisasi perempuan. Kongres Wanita Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 22-25 Desember 1952 menghasilkan beberapa resolusi dan selanjutnya dikirim kepada pemerintah. Resolusi-resolusi tersebut adalah:<sup>84</sup>

1. Mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Perkawinan.
2. Kaum perempuan diberi tempat pada pengadilan agama (terutama yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan perceraian).
3. Pejabat urusan perkawinan, talak, rujuk diberi pendidikan khusus.
4. Pembentukan sebuah panitia yang bertugas merencanakan sistem pendidikan bagi kaum perempuan.
5. Jumlah anggota perempuan dalam Dewan Penasehat Biro Tenaga Kerja Kementerian Perburuhan ditambah.
6. Dilakukannya pengawasan terhadap majalah, poster, iklan, serta lainnya yang bertentangan dengan kesusilaan ditindak lebih keras.

---

<sup>84</sup> Wieringa, Saskia Eleonora, *op.cit.*, hlm. 230-231.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan, maka dalam kongres tersebut Yayasan Seri Derma yang didirikan tahun 1928 dihidupkan kembali. Diharapkan dengan kembalinya Yayasan Seri Derma dapat membantu para pelajar perempuan untuk menuntut ilmu, di mana yayasan akan memberikan beasiswa dan membuka asrama-asrama bagi pelajar perempuan.

Pasca kongres tahun 1952, sebagai upaya membangkitkan semangat kaum perempuan Indonesia maka diselenggarakan Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Acara tersebut dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 22 Desember 1953. Dalam acara tersebut diresmikan pula berdirinya Bank Koperasi Wanita, yaitu suatu koperasi Simpan Pinjam yang diperuntukkan bagi kaum perempuan Jakarta. Berdirinya Bank Koperasi Wanita tersebut diprakarsai oleh Maria Ullfah selaku ketua Kongres Wanita Indonesia, Ny. Said Suryodinoto, Ny. S. Herman, dan Ny. Titi Memet Tanumidjaja.

Kongres Wanita Indonesia yang ke-X selanjutnya diselenggarakan di Palembang pada tanggal 2-5 Maret 1955.<sup>85</sup> Dalam kongres tersebut masalah mengenai Undang-Undang Perkawinan kembali dibahas. Kongres menuntut kepada pemerintah agar segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang pokok dan khusus, agar masalah perkawinan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dan kaum perempuan tidak menjadi korban dalam masalah tersebut. Kongres juga menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dalam kongres

---

<sup>85</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 121.

tersebut Maria Ullfah kembali terpilih menjadi ketua Sekretariat untuk masa jabatan tahun 1955 hingga tahun 1957. Pasca kongres tersebut pada Agustus 1957, kongres mengirimkan tiga wakilnya dalam acara Seminar Wanita Asia di Bangkok, Thailand. Seminar tersebut membahas tentang *Increased Participation of Asian Women in Publik Life*. Kongres tersebut merupakan kongres yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maria Ullfah bersama dengan Ny. Mr. Nani Soewondo dan drg. Ny Yetty Rizali Noor terpilih menjadi wakil Indonesia untuk menghadiri acara tersebut.

Kongres Wanita Indonesia selanjutnya diselenggarakan pada tanggal 28-30 November 1957 di Surabaya. Masalah mengenai Undang-Undang Perkawinan masih tetap dibahas dalam kongres tersebut. Kongres terus mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pernikahan yang terjadi di Indonesia. Pasca kongres tersebut pada pertengahan tahun 1958 Sekretariat Kongres Wanita Indonesia mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Perdana Menteri untuk membicarakan rancangan Undang-Undang Perkawinan yang telah disampaikan. Diusulkan dua buah kompromi dari beberapa organisasi perempuan, yaitu Rancangan UUP yang bersifat peraturan umum dan rancangan UUP umat Islam.<sup>86</sup> Pengiriman surat tersebut diharapkan pemerintah segera merancang Undang-Undang Perkawinan yang merupakan pokok perjuangan kaum perempuan. Selain membahas tentang Undang-Undang Perkawinan, kongres

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

tahun 1957 kembali memilih Maria Ullfah sebagai ketua Sekretariat kongres untuk masa jabatan tahun 1957-1961.

Sebagai upaya menjalin kerjasama dengan organisasi internasional, pada tanggal 3 Februari 1958 Kongres Wanita Indonesia mengirim delegasi ke Konferensi Wanita Asia Afrika yang diadakan di Srilangka, Colombo. Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 15-24 Februari 1958 dengan dihadiri wakil-wakil dari PBB. Delegasi Indonesia terdiri atas Ny. Mr. Maria Ullfah Santoso (ketua), Ny. dr. H. Subandrio, Ny. Mr. Nani Suwondo, Ny. Kartini K. Radjasa, Nn. Soehartini, Ny. K.A. Soejono Prawirabisma, Ny. S.K. Trimurty, Ny. Elias St. Pangeran (Badan Usaha).<sup>87</sup> Sebelum para delegasi berangkat ke Colombo, terlebih dahulu pada delegasi dibekali pesan dari rakyat Indonesia agar memperjuangkan masalah Irian Barat dalam konferensi tersebut.

Setibanya di Colombo, para delegasi mendapatkan kabar bahwa *Steering Committee* telah memutuskan agar masalah politik tidak dibahas dalam konferensi tersebut. Maria Ullfah yang mendengar kabar tersebut langsung bertemu dengan *steering committee* dan meyakinkan mereka agar para pemimpin delegasi diperkenankan mengucapkan apa saja dalam pidato pembukanya, tetapi untuk masalah politik tidak akan dibahas dalam konferensi. “Mereka semua sudah mempersiapkan pidato pembukanya. Apakah semua 40 pidato pembuka mau kita sensor lebih dahulu? Tak ada waktu bukan? Biarlah mereka bicara sepuas-puasnya, tetapi soal-soal politik yang mereka kemukakan tidak akan kita

---

<sup>87</sup> Nani Soewondo, *op.cit.*, hlm. 222.

masuk dalam agenda,” kata Maria Ulfah kepada *steering committee*.<sup>88</sup> Akhirnya saran Maria Ulfah dapat diterima dan perwakilan negara yang akan menyampaikan permasalahannya dapat berbicara di depan konferensi, meskipun masalah tersebut tidak akan dibahas dalam acara konferensi.

Pada keesokan harinya dalam sidang yang dipimpin oleh Maria Ulfah, seorang wakil dari Turki datang dan marah-marah di konferensi. Perwakilan Turki tersebut menanyakan kepada panitia tentang pidato pembuka yang membahas masalah politik dari masing-masing negara. Maria Ulfah yang saat itu menjadi pimpinan konferensi menjelaskan bahwa pidato pembuka dari keempat puluh negara tidak akan dibahas dalam konferensi dan hal tersebut hanya disampaikan dalam pidato pembuka. Penjelasan yang disampaikan oleh Maria Ulfah berhasil mencairkan suasana yang mulai memanas. Melihat kejadian tersebut seorang perwakilan dari PBB yang bernama Adisheshah memberi selamat kepada Maria Ulfah dan berkata “Kalau bukan karena diplomasi Maria Ulfah, maka mungkin sekali konferensi ini sudah menjadi kacau”.

Keahlian Maria Ulfah dalam hal diplomasi tersebut mendapatkan respon yang baik dari PBB. Sekembalinya ke Indonesia, Maria Ulfah dihubungi oleh kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia yang bernama Rosenberg. Rosenberg menyampaikan tawaran kepada Maria Ulfah untuk bekerja sebagai pejabat tinggi dalam sekretariat PBB di New York. Mendengar tawaran tersebut Maria Ulfah merasa senang, tetapi ia menolak tawaran tersebut

---

<sup>88</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 118.

dengan halus. Bagi Maria Ulfah pekerjaannya di Indonesia masih terlalu banyak dan penting, serta sulit untuk ditinggalkan.

Kongres Wanita Indonesia adalah suatu badan gabungan dari berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Berbagai aliran dan ideologi organisasi diperjuangkan dalam kongres. Salah satu aliran yang ingin berkuasa di dalam kongres adalah golongan kiri yaitu golongan yang dekat dengan kaum komunis. Maria Ulfah yang menjadi ketua Sekretariat kongres berusaha agar kongres tidak dijadikan alat bagi kaum komunis untuk meraih kepentingan golongannya. Maria Ulfah berusaha menjaga keseimbangan di dalam tubuh kongres karena di dalam kongres terdapat berbagai macam organisasi perempuan dari segala aliran yang memperjuangkan kepentingan organisasinya masing-masing. Sebagai seorang ketua Sekretariat Maria Ulfah harus selalu bersifat netral. Secara pragmatis Maria Ulfah pandai mengemukakan sesuatu penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang setuju maupun yang tidak.<sup>89</sup> Penyelesaian yang ditawarkan oleh Maria Ulfah selalu mengarah kepada pendirian yang ia perjuangkan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan organisasi perempuan.

Pada tahun 1958 kongres mengadakan rapat untuk membahas masalah “Gerakan Massa” yang anggotanya terdiri dari perorangan dan organisasi perempuan.<sup>90</sup> Gerakan Massa tersebut dipelopori oleh Gerwani yang berafiliasi dengan PKI. Gerakan Massa dianggap berbahaya oleh kongres karena dapat menimbulkan perpecahan diantara organisasi perempuan, bahkan gerakan massa

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>90</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *loc.cit.*,



tersebut dapat membubarkan Kongres Wanita Indonesia. Gerwani dan Perwamu (Persatuan Wanita Murba) serta beberapa perorang masuk ke dalam Gerakan Massa, tetapi mereka tetap ikut di dalam Kongres Wanita Indonesia. Hal tersebut dianggap sebagai usaha untuk merongrong kongres dari dalam.

Kongres yang mengetahui keikutsertaan Gerwani, Perwamu, dan beberapa orang tidak terima dengan sikap mereka. Sebagai seorang ketua Sekretariat kongres Maria Ullfah dengan tegas mengatakan kepada organisasi perempuan yang masuk ke dalam Gerakan Massa untuk memilih Kongres Wanita Indonesia atau Gerakan Massa. Maria Ullfah menyatakan kepada peserta rapat jika tidak puas dengan kerja kongres maka bicarakan di dalam Kongres Wanita Indonesia dan jika perlu maka ubah Anggaran Dasar Kongres Wanita Indonesia, tetapi jangan pernah mendirikan badan gabungan di luar Kongres Wanita Indonesia. Ketegasan Maria Ullfah tersebut berbuah hasil, yaitu tidak ada organisasi yang keluar dari Kongres Wanita Indonesia dan setelah itu Gerakan Massa tidak terdengar lagi.

Maria Ullfah yang sejak kongres tahun 1950 terpilih menjadi ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia memiliki peranan penting dalam mempersatukan organisasi perempuan di Indonesia. Maria Ullfah merupakan ketua Sekretariat Kongres Wanita pada dasawarsa pertama sesudah Proklamasi yang dengan kecakapan diplomasinya menjadi salah seorang arsitek persatuan kaum perempuan.<sup>91</sup> Kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan, yaitu sebagai Direktur Kabinet Perdana Menteri sangat membantu perjuangannya dalam

---

<sup>91</sup> Wieringa, Saskia Eleonora, *op.cit.*, hlm. 229.

Kongres Wanita Indonesia. Maria Ullfah dapat dengan mudah melakukan komunikasi secara informal mengenai masalah-masalah kaum perempuan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan.

Selama retan waktu dari tahun 1950 hingga tahun 1961 Maria Ullfah menjabat sebagai ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang dilahirkan pada masa kepemimpinannya. Kebijakan yang pertama adalah tentang hari Ibu yang disederajatkan dengan hari Kebangkitan Nasional.<sup>92</sup> Maria Ullfah yang menjabat sebagai direktur kabinet Perdana Menteri mengetahui bahwa terdapat usul dari Dewan Menteri untuk menetapkan hari-hari nasional bersejarah. Maria Ullfah mengusulkan kepada Dewan Menteri agar hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember disederajatkan dengan hari Sumpah Pemuda. Akhirnya usul tersebut disetujui oleh pemerintah dengan surat keputusan Presiden No. 316 tahun 1959.<sup>93</sup>

Kebijakan kedua yang dicapai Maria Ullfah pada saat menjabat sebagai Sekretaris Kongres Wanita Indonesia adalah gagasan untuk memberi kesempatan kepada kaum perempuan masuk dalam angkatan bersenjata, khususnya

---

<sup>92</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 116.

<sup>93</sup> Hari ibu pertama kali dicetuskan oleh Ibu Soetinah Soeparta dari Isteri Indonesia. Gagasan tersebut diusulkan pada saat Kongres Perempuan Indonesia III tahun 1938 oleh ibu Soenarjo Mangoenpoespita. Kongres selanjutnya sepakat bahwa hari Ibu diperingati pada tanggal 22 Desember yaitu hari yang bertepatan dengan Kongres Perempuan Indonesia I. Atas usul Kowani dibawah pimpinan Mr. Maria Ullfah, maka dengan Kepres No. 316 tahun 1959 pemerintah telah mengesahkan hari Ibu sebagai Hari Besar Nasional, bukan hari libur dan sama nilainya dengan hari Sumpah Pemuda, lihat S. Iman Soedijat, "Relevansi Semangat Hari Ibu dengan Gerakan Perempuan di Indonesia", dalam Fauzie Ridjal, dkk (edt.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 116-117.

pembentukan Kowad (Korp Wanita Angkatan Darat).<sup>94</sup> Pada saat Maria Ullfah masih menjabat sebagai Sekretariat Kongres Wanita Indonesia, ia menghadap Jenderal Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum Maria Ullfah bertemu Jenderal Nasution, masalah tentang Kowad telah dibahas dalam Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia tanggal 20 September 1959. Setelah mendengar ceramah dari dr. Soemarno mengenai Kowad, selanjutnya dibentuk Panitia Kowad yang terdiri dari delapan organisasi. Selanjutnya pendapat tersebut mendapat perhatian dari Pimpinan Angkatan Darat, yaitu Jenderal Nasution dan pada tanggal 22 Desember 1961 lahir Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Gagasan mengenai keikutsertaan perempuan dalam angkatan bersenjata sebenarnya telah dibahas pada masa revolusi fisik. R. Said Soekanto seorang Kepala Kepolisian Negara pertama di Indonesia mengusulkan kepada Kowani agar perempuan dapat diterima dalam kepolisian. Gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa bidang kepolisian yang lebih baik ditangani kaum perempuan, seperti masalah kriminalitas di kalangan anak-anak dan kaum perempuan. Gagasan tersebut pertamakali dilaksanakan di Bukittinggi karena saat itu ibu kota negara sedang diserbu tentara Belanda. Kesuksesan perempuan dalam kepolisian menjadi latarbelakang Kongres Wanita untuk memperjuangkan agar dalam angkatan-angkatan bersenjata lainnya peran perempuan diikutsertakan. Perjuangan Kongres Wanita Indonesia agar perempuan dapat ikut serta dalam angkatan bersenjata akhirnya berhasil, seluruh angkatan bersenjata baik itu

---

<sup>94</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 114.

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah memiliki anggota dari kaum perempuan.

Kowad (Korp Wanita Angkatan Darat) pada awal pembentukannya pernah menimbulkan salah tafsir bagi sebageian orang, khususnya bagi isteri-isteri perwira tinggi. Mencontoh pada kebiasaan Angkatan Bersenjata, dimana seorang perwira tinggi selalu didampingi oleh seorang perwira muda sebagai ajudan maka hal tersebut pun diterapkan kepada isteri dari perwira tinggi. Setiap isteri dari perwira tinggi disediakan ajudan, yaitu seorang anggota Angkatan Bersenjata Kowad. Tugas sebagai ajudan tersebut disalah artikan oleh para isteri perwira tinggi, para Kowad yang menjadi ajudan harus ikut berbelanja, menjemput anak-anak dari sekolah, dan melakukan tugas pengasuh lainnya. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Maria Ullfah selaku ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia. Maria Ullfah yang mendapat laporan tersebut langsung memberi arahan kepada pimpinan Angkatan Bersenjata bahwa Kowad mendapat pendidikan dan pelatihan kemiliteran bukan untuk menjalankan tugas sebagai pengasuh anak dan pendamping ibu perwira tinggi berbelanja tetapi untuk mengamankan para ibu-ibu perwira tinggi.

Sebagai seorang ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia merangkap sebagai Direktur Kabinet RI satu hal yang disesalkan Maria Ullfah adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian kesempatan kepada isteri kedua dan seterusnya untuk ikut mendapatkan pensiun janda, bila suaminya seorang pegawai negeri sudah meninggal.<sup>95</sup> Pegawai negeri

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

dapat menunjuk seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak mendapatkan pensiunan. Jika terdapat lebih dari satu isteri, maka pensiun janda adalah sebesar *dua kali pokok pensiun* yang dibagikan rata antara isteri-isteri tersebut. Jadi apabila terdapat empat orang isteri, maka masing-masing mendapatkan setengah dari pokok pensiun seorang janda. Penyesalan yang dirasakan Maria Ullfah, ia sampaikan dalam biografinya yang ditulis oleh Gadis Rasid. Berikut adalah kata penyesalan Maria Ullfah yang disampaikan dalam biografinya:

“Sampai sekarang yang tidak mengerti mengapa soal ini lolos dari perhatian saya, ketika saya bertugas sebagai Direktur Kabinet dan Abdul Wahab S.H. sebagai Sekretaris Dewan Menteri. Mungkin pada waktu itu saya sedang sibuk dengan soal-soal lain sehingga tidak sempat membaca usul-usul yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet yang dipersiapkan oleh Abdul Wahab S.H. sebagai sekretaris Dewan Menteri”.<sup>96</sup>

Dikeluarkannya peraturan tersebut berarti pemerintah tidak hanya *mengakui* bahwa seorang pegawai diperbolehkan mengambil isteri kedua, tetapi seorang pegawai negeri disarankan untuk mengambil lebih dari seorang isteri. Padahal dalam Angkatan Bersenjata, organisasi gerakan perempuan telah berhasil memperjuangkan hak seorang isteri. Seorang anggota Angkatan Bersenjata tidak diperbolehkan mengambil isteri kedua tanpa izin Komandannya dan dalam prakteknya izin tersebut sangat sulit didapatkan.

Peraturan Pemerintah tersebut mendapat kecaman keras dari salah satu organisasi perempuan anggota Kongres Wanita Indonesia, yaitu Perwari. Perwari adalah salah satu organisasi perempuan di Indonesia yang sangat menentang poligami. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap Perwari ketika Presiden Soekarno

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

mengambil isteri kedua yaitu Ny. Hartini Soewondo dari Salatiga. Perwari yang memprotes pernikahan kedua Presiden Soekarno melakukan aksi demonstrasi yang mengakibatkan ibu Fatmawati keluar dari istana negara. Akibat kejadian tersebut Presiden Soekarno mulai membenci gerakan perempuan. Ibu Fatmawati yang bertemu dengan beberapa pemimpin organisasi perempuan menyampaikan keluhannya, “Sampai dimana perjuangan kalian? Mana hasilnya? Mengapa pergerakan wanita tidak lebih giat memperjuangkan nasib kaumnya?”.<sup>97</sup> Sikap Ibu Fatmawati tersebut sangat berbeda dengan sikapnya sebelum Presiden Soekarno menikah kembali. Pada awalnya Fatmawati menentang usaha organisasi perempuan yang menuntut agar pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perkawinan, tetapi ketika poligami telah dialaminya maka ia berbalik mendukung perjuangan kaum perempuan.

Sikap Kongres Wanita Indonesia terhadap Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 dan masalah Hartini sangat berlainan dengan Perwari. Kongres tidak banyak meributkan permasalahan tersebut, hal ini karena sikap kongres yang lebih menjaga persatuan kongres yang terdiri atas berbagai macam aliran. Masalah poligami tidak akan pernah mencapai suara bulat karena kongres merupakan gabungan dari berbagai organisasi perempuan yang memiliki pendirian yang berbeda-beda pula. Maria Ulfah yang masih menjabat sebagai ketua Sekretariat kongres oleh segolongan organisasi dianggap telah luntur dalam perjuangannya untuk memperoleh kedudukan yang lebih kuat bagi kaum perempuan dalam hal

---

<sup>97</sup> Nani Suwondo, “Wanita dan Masalah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu setelah Katini 1904-1984*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), hlm. 113.

hukum keluarga. Sikap Maria Ullfah yang cenderung tidak radikal membuatnya dianggap tidak konsisten. Sikap Maria Ullfah tersebut bukan karena ia tidak lagi memperjuangkan cita-citanya dulu, tetapi dalam kedudukannya sebagai ketua Sekretariat kongres, Maria Ullfah harus bersikap netral demi menjaga kekompakan antara semua golongan perempuan Indonesia.

Selain aktif dalam pemerintahan dan organisasi perempuan, Maria Ullfah aktif pula dalam dunia perfilman. Sejak tahun 1950 hingga tahun 1961 Maria Ullfah tercatat sebagai Ketua Panitia Sensor Film Indonesia.<sup>98</sup> Jabatan tersebut sebenarnya hanya tiga tahun, tetapi berkali-kali Maria Ullfah diangkat kembali yaitu pada tahun 1953 dan tahun 1956. Seharusnya masa jabatan Maria Ullfah berakhir pada tahun 1959, tetapi karena Ny. Utami Suryadarma yang oleh orang-orang komunis dicalonkan sebagai ketua menolak tawaran tersebut. Akhirnya jabatan ketua tetap dijabat Maria Ullfah hingga tahun 1961.

Sejak Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda karena masalah Irian Barat, banyak masyarakat khususnya kaum muda yang melakukan aksi menentang imperialisme Amerika Serikat, termasuk film-film Amerika. Sejak tahun 1950-an film-film *Hollywood* lebih banyak diminati oleh masyarakat dunia. Golongan kiri yang sangat anti terhadap Barat mencela film-film Amerika yang membawa dampak buruk bagi masyarakat dan dapat merusak moral. Sebuah film Amerika yang berjudul *Rock Around the Clock* pada tahun 1957 diloloskan oleh Panitia sensor. Film tersebut mengisahkan tentang dansa *rock* yang mulai menjadi

---

<sup>98</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 130.

mode saat itu. Golongan kiri yang kecewa dengan sikap panitia sensor mengkritik hal tersebut.

Kaum ibu-ibu yang tergabung dalam Kongres menyatakan keinginannya untuk melihat film tersebut, karena ingin mengetahui apakah benar film tersebut dapat merusak moral bangsa. Maria Ullfah yang masih menjabat sebagai ketua Sekretariat kongres mengabdikan keinginan ibu-ibu kongres dan mengadakan pemutaran film tersebut di ruangan “pre-view” dari gabungan perusahaan film Amerika. Pada saat acara akan dimulai, Maria Ullfah diberitahu oleh seorang pegawai perusahaan Colombia bahwa di luar ada dua orang pemuda yang ingin bertemu dengan Maria Ullfah. Maria Ullfah langsung keluar ruangan dan bertemu dengan dua orang pemuda tersebut. Maria Ullfah yang keluar ruangan langsung dipegang lengannya dan dipaksa ikut kedua pemuda tersebut dengan menggunakan oplet yang telah menunggu di pinggir jalan. Ny. Gadis Susilo yang mengetahui kejadian tersebut ikut masuk ke dalam oplet. Ini merupakan kali kedua Maria Ullfah mengalami tindak penculikan, setelah sebelumnya pada masa Kabinet Sjahrir II Maria Ullfah ikut diculik bersama Sjahrir di Solo.

Maria Ullfah dan Ny. Gadis Susilo dibawa ke sebuah rumah di daerah Menteng, di jalan Waringin Pojok jalan Tanjung.<sup>99</sup> Oplet yang membawa Maria Ullfah berhenti di sebuah pavilyun rumah yang bernama “Markas Besar Pemuda Pembela Konsepsi Bung Karno”. Maria Ullfah sadar bahwa ia sekarang berada di tempat berkumpulnya Pemuda Rakyat (organisasi pemuda komunis) dan pemuda Marhaenis (organisasi pemuda PNI). Seorang pemuda telah menunggu Maria

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 131.



Ullfah di dalam rumah dan ketika Maria Ullfah masuk ia langsung berbicara serta meminta pertanggung jawabannya yang meloloskan film *Rock Around the Clock*. Maria Ullfah dengan tenang menjelaskan bahwa film tersebut telah dinilai oleh suatu panitia kecil yang dipimpin oleh Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat. Maria Ullfah kemudia menjelaskan tata kerja Panitia Sensor Film, di mana setiap film akan diperiksa oleh sebuah panitia kecil yang dipimpin oleh seseorang yang ahli dibidang yang berhubungan dengan isi film tersebut. Menurut Maria Ullfah film *Rock Around the Clock* adalah film remaja, maka pimpinan panitia sensor dipilih adalah dari Kepala Pendidikan Masyarakat.

Maria Ullfah tetap pada pendiriannya bahwa film tersebut layak untuk ditayangkan, jika menyangkut masalah pornografi maka Maria Ullfah balik bertanya kepada pemuda tersebut tentang acara sirkus dari Rusia yang diadakan di Istana presiden. Maria Ullfah menjelaskan bahwa pakain yang digunakan oleh pemain akrobat perempuan sangat minim, “seperti cawat saja” kata Maria Ullfah menegaskan. Pemuda rakyat tersebut masih tetap dengan pendiriannya dan mengatakan kepada Maria Ullfah bahwa Panitia Sensor harus memperhatikan suara pemuda. Perdebatan diantara keduanya berakhir ketika ada telepon untuk pemuda tersebut. Terpon tersebut berasal dari Sudiro, seorang tokoh PNI yang pernah menjabat sebagai walikota Jakarta. “Ya pak, mereka sudah datang,” kata pemuda rakyat menjawab telfon tersebut. Setelah percakapan telepon berakhir Maria Ullfah langsung diperbolehkan pulang.

Begitu Maria Ullfah dan Ny. Gadis Susilo keluar rumah, mereka melihat kendaraan jeep dari kepolisian yang datang dan berjaga-jaga di dekat rumah

tersebut. “Ibu baik-baik saja? Mari saya antarkan pulang,” kata perwira polisi Sempu Mulyono kepada Maria Ullfah. sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pemuda rakyat, maka Maria Ullfah mengajukan gugatan atas peristiwa penculikannya. Selain itu, peristiwa penculikan Maria Ullfah yang terjadi pada tanggal 26 Februari 1957 tersebut menimbulkan reaksi dari Gerakan Wanita Sosialis (GWS) yang mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno.<sup>100</sup> Ny. S.W. Sjahrir yang menjadi ketua GWS mengirimkan surat tersebut pada tanggal 8 Maret 1957, dalam surat tersebut GWS menuntut kepada pihak yang berwajib untuk mengusut kasus penculikan yang dialami Maria Ullfah. Bagi GWS peristiwa tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin main hakim sendiri. Selain itu, menurut GWS penculikan Maria Ullfah merupakan wujud penghinaan bagi kaum ibu pada umumnya dan terhadap seorang pemimpin perempuan serta tokoh nasional yang selama umurnya berjuang demi bangsa.

Beberapa bulan kemudian masalah penculikan Maria Ullfah di hadapkan ke pengadilan dan pemuda rakyat yang menjadi pelaku penculikan hanya mendapatkan hukuman ringan. Maria Ullfah memahami hal tersebut dan tahu bahwa Ny. C. Suparni Mulyono S.H yang menjadi hakim dapat menerima pembelaan pemuda rakyat yang ingin menyelamatkan masyarakat. Perbuatan Pemuda Pembela Konsepsi Bung Karno yang menentang masuknya film-film Amerika sangat berlainan dengan Presiden Soekarno yang sangat senang dengan

---

<sup>100</sup> ANRI, Kabinet Presiden RI, No. 2044, *Surat Pernyataan Gerakan Wanita Sosialis*.

film-film Barat, bahkan setiap satu minggu sekali Maria Ulfah diminta untuk mengusahakan satu film Amerika yang belum disensor untuk diputar dalam Istana Presiden Soekarno dan tamu-tamunya.

Perkembangan Kongres Wanita Indonesia dari tahun 1960-1965 sangat dipengaruhi oleh situasi politik negara.<sup>101</sup> Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah mengubah arah pemerintahan Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan atas negara. PKI sebagai salah satu partai politik yang ingin memperkuat kedudukan politiknya di Indonesia mulai mendekati Presiden Soekarno. PKI berusaha meyakinkan Presiden Soekarno tentang kedudukan presiden yang lemah tanpa adanya dukungan dari PKI. PKI yang berhasil meyakinkan Presiden Soekarno mulai mendapatkan kedudukan dalam pemerintah, sehingga PKI bersama ormas-ormasnya dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror kepada lawan politiknya.

Pengaruh PKI tidak hanya berhenti pada dunia politik, PKI yang berafiliasi dengan Gerwani mulai menciptakan ketegangan di dalam kongres. Sejak Gerwani berhasil duduk dalam pimpinan Kongres Wanita Indonesia tahun 1957 suasana “ketegangan” dalam gerakan perempuan mulai terjadi.<sup>102</sup> Melalui Gerwani PKI mulai merorong Kongres Wanita Indonesia dari dalam. Pengaruh Gerwani menjadi sangat kuat sejak struktur Pimpinan Kongres Wanita Indonesia diubah dalam kongres tahun 1961. Kongres tersebut diselenggarakan di Jakarta pada

---

<sup>101</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 284.

<sup>102</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 140.

tanggal 6-9 Februari 1961. Kongres tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk mengubah struktur pimpinan kongres dari Sekretariat sebagai Badan Pelaksana Putusan Kongres dan Majelis Permusyawaratan, menjadi Dewan Pimpinan Kongres yang mempunyai kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>103</sup> Dewan Pimpinan kongres terdiri dari Sembilan orang yang dipilih oleh Kongres sekaligus. Selanjutnya dari Sembilan orang Dewan Pimpinan akan diangkat satu orang untuk menjadi Ketua Koordinator. Kongres memutuskan untuk memilih dr. Ny. Hurustianti Soebandrio sebagai Ketua Koordinator Dewan Kongres. Ny. Hurustianti Soebandrio adalah isteri dari menteri luar negeri, ia mewakili organisasi Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI). Selain itu, terpilih pula Ny. Moedigdo seorang wakil dari Gerwani, ia adalah mertua dari D.N. Aidit yang seorang tokoh dalam PKI.

Perubahan struktur pimpinan kongres dilatarbelakangi oleh pidato pembukaan Kongres yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Pada pidato pembukaan Kongres Wanita Indonesia tahun 1961, Presiden Soekarno menyebut Kongres Wanita Indonesia sebagai *Ladies Movement* yaitu gerakan perempuan yang lamban.<sup>104</sup> Sebagai seorang ketua Kongres Maria Ullfah menjelaskan kepada Presiden Soekarno bahwa bentuk organisasi Kongres Wanita Indonesia telah diputuskan oleh seluruh anggota kongres pada tahun 1950 di Jakarta tepatnya setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Keputusan tersebut dikarenakan organisasi-organisasi perempuan yang ada ingin mengkonsolidasikan

---

<sup>103</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *loc.cit.*,

<sup>104</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 121.

organisasinya masing-masing. Sejak peristiwa tersebut hubungan Maria Ullfah dengan Presiden Soekarno menjadi sedikit merenggang. Meskipun Maria Ullfah masih ikut dalam Dewan Pimpinan, tetapi secara struktural kekuasaan kongres mulai beralih kepada Gerwani.

Kedudukan PKI dalam pemerintahan semakin lama semakin kuat, bahkan dua partai yang paling keras menentang pengaruh komunis dapat disingkirkan oleh PKI dengan mudah. Sejak bulan Agustus 1960 Masyumi dan PSI dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Organisasi Muslimat yang merupakan bagian dari Masyumi dengan sendirinya dikeluarkan dalam kongres. Meskipun organisasi Muslimat berubah nama menjadi Wanita Islam yang berdiri sendiri dan tidak lagi terabung dalam Masyumi, tetapi Wanita Islam tetap tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia.

Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1964 kembali menyelenggarakan kongres yang berlangsung di Jakarta tanggal 24-28 Juli 1964. Kongres dibuka dengan pidato dari Presiden Soekarno dan selanjutnya pidato tersebut digunakan sebagai pokok program perjuangan Kongres Wanita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno memberi peringatan kepada kaum perempuan dengan kata-kata, "Hati-hati terhadap partai terlarang. Mereka gremet-gremet mau mencoba masuk kembali". Peserta kongres memahami bahwa orang yang dimaksud dalam pidato tersebut adalah Maria Ullfah, ia merupakan satu-satunya peserta kongres yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Maria Ullfah yang memahami maksud pidato presiden meminta kepada Sekretaris pribadi presiden yang bernama Muallif Nasution untuk bertemu

presiden secara informal. Dalam pertemuan tersebut Maria Ulfah meminta penjelasan presiden mengenai pidato tersebut. Menurut Presiden Soekarno pidatonya tersebut bersifat umum dan tidak ada hubungannya dengan Maria Ulfah. Maria Ulfah yang tidak menerima pernyataan Presiden Soekarno tetap tinggal dan terus meminta penjelasan presiden. Meskipun tidak mau mengakui kesalahannya secara terbuka, tetapi presiden menyadari apa yang dimaksud oleh Maria Ulfah. Hal tersebut terbukti dengan ucapan Dr. Roeslan Abdulgani dalam siaran Radio Republik Indonesia beberapa hari kemudian yang mengulas tentang perjuangan dan peranan Maria Ulfah demi bangsa Indonesia.

Sejak tahun 1964 Maria Ulfah tidak lagi ikut dalam Pimpinan Dewan Kongres Wanita Indonesia. Kedudukannya sebagai salah satu pemimpin perempuan mulai tergeser seiring dengan berkembangnya komunis. Maria Ulfah yang dianggap sebagai bagian dari orang sosialis disingirkan dari kedudukannya sebagai salah satu anggota Pimpinan Dewan. Sejak Maria Ulfah tidak menjabat sebagai Pimpinan Dewan arah kongres mulai berubah, cita-cita pokok organisasi perempuan yang pada awalnya untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan menjadi kabur. Kongres yang sejak awal berusaha memperjuangkan masalah Undang-Undang Perkawinan, sejak tahun 1964 tidak lagi membahas masalah tersebut. Perkembangan kongres selanjutnya lebih mengikuti arah pandang Presiden Soekarno yang cenderung ke kiri.

#### **D. Maria Ulfah dalam Dewan Pertimbangan Agung dan Kegiatan Sosial**

Arah politik Indonesia pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mulai mengarah ke arah kiri atau komunis. Hubungan baik antara Indonesia dengan Amerika

Serikat yang sempat terjalin pasca kasus Irian Barat, menjadi memburuk seiring dengan adanya konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Blok Barat, dimana Amerika Serikat adalah bagian dari negara Blok Barat (Inggris, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura).<sup>105</sup> Konfrontasi tersebut berakibat pada munculnya demonstrasi anti imperialisme dan neo-kolonialisme yang mewarnai ibukota. Munculnya demonstrasi berdampak pada banyaknya orang Inggris dan Amerika Serikat yang keluar dari Jakarta, bahkan banyak dari lembaga-lembaga milik Amerika Serikat yang ditutup.

Konfrontasi terhadap Malaysia mengakibatkan negara mengalami defisit.<sup>106</sup> Kondisi tersebut diperparah dengan adanya proyek-proyek mandataris atau yang dikenal dengan proyek mercusuar, seperti *Games of the New Emerging Forces (Ganefo)* dan *Conference of the New Emerging Forces (Conefo)*. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan proyek pembangunan gedung-gedung megah, contohnya Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Hotel Samedera Beach, Hotel Ambarukmo (Yogyakarta), Hotel Bali Beach (Denpasar), Masjid Istiqlal, Tugu Monas dan lain-lainnya. Proyek-proyek tersebut merupakan pembuktian Presiden Soekarno kepada dunia Internasional bahwa sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia mampu tampil di dunia internasional melalui karya-karya arsitektur yang dalam pengerjaannya tidak mudah.

---

<sup>105</sup> Nina H. Lubis, *G30S Sebelum dan Sesudah*. (Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat), 2012, hlm. 8.

<sup>106</sup> *Ibid.*,

Proyek pembangunan yang digalakkan oleh Presiden Soekarno memaksa pemerintah untuk mengeluarkan uang yang sangat besar untuk kepentingan pembangunan. Pengeluaran negara yang setiap tahunnya semakin meningkat mengakibatkan terjadinya peningkatan inflasi sebesar 650%. Selain itu, inflasi yang terjadi juga berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Tercatat harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan paling tinggi pada tahun 1965, yaitu sebesar 200% hingga 300% dari harga tahun 1964.<sup>107</sup> Keadaan tersebut juga disebabkan oleh lemahnya nilai ekspor dan terjadinya pembatasan impor karena negara mengalami kekurangan devisa.

Disisi lain PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dalam Pemilihan Umum tahun 1955 mengalami kenaikan suara<sup>108</sup>, mulai meningkatkan peranannya dalam pemerintahan. PKI mulai menyusupkan anggotanya dalam beberapa organisasi, seperti organisasi perempuan. Puncak kekuasaan PKI adalah ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965, yang selanjutnya dikenal dengan nama G30S (Gerakan 30 September) atau Gestapu. Peristiwa tersebut merupakan sebuah usaha kudeta yang dilakukan oleh pasukan Gerakan 30 September, tetapi dalam perkembangannya masyarakat percaya bahwa dalang dari peristiwa tersebut adalah PKI.

---

<sup>107</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 432.

<sup>108</sup> PKI berhasil masuk kedalam empat besar pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. PKI menempati urutan keempat setelah Partai Nahdatul Ulama (NU) dengan perolehan suara sebesar 6.955.141 suara atau 16,4%, lihat Nina H. Lubis, *op.cit.*, hlm. 41.



Menanggapi peristiwa tersebut pemerintah langsung melancarkan operasi penumpasan G30S pada tanggal 1 Oktober 1965. Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto yang telah mengetahui peristiwa tersebut atas persetujuan perwira tinggi yang ada di Kostrad mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Pangkostrad Mayjen Soeharto yang bergerak cepat dalam hari itu juga berhasil menguasai Jakarta tanpa jatuh korban. PKI dan ormas-ormasnya selanjutnya dinyatakan sebagai partai terlarang dan orang-orang yang beraitan dengan PKI ditumpas oleh pemerintah. Baik keluarga atau keturunan dari PKI dalam masa Orde Baru keberadaannya dikucilkan dan dilarang masuk dalam pemerintahan. Hingga saat ini peristiwa G30S adalah suatu peristiwa yang misterius, karena dalang yang sebenarnya dalam peristiwa tersebut belum jelas adanya.

Nama Soeharto menjadi naik karena berhasil menumpas pemberontakan PKI, terlebih dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Supersemar. Soeharto dengan menggunakan Supersemar selanjutnya berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Pidato pertanggung jawaban Presiden Soekarno (Nawaksara) dalam rapat MPRS tahun 1966 akhirnya ditolak dan bulan Maret 1967 Presiden Soekarno dicabut kekuasaannya sebagai presiden. Soeharto diangkat menjadi Presiden Indonesia ke II pada bulan Maret 1968.<sup>109</sup> Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto kembali membuka Indonesia bagi negara-negara dunia Barat.

---

<sup>109</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 195.

Orde Baru juga merupakan suatu masa yang baru bagi kehidupan rumah tangga Maria Ullfah. Soebadio Sastrosatomo yang telah resmi menjadi suami Maria Ullfah sejak 10 Januari 1964, akhirnya dibebaskan sebagai tahanan politik Soekarno pada tanggal 5 Mei 1966.<sup>110</sup> Keduanya menetap di rumah Maria Ullfah, yaitu di Jalan Guntur nomor 49 Jakarta Selatan. Dari pernikahannya yang pertama dan kedua Maria Ullfah tidak memiliki anak, ia hanya memiliki satu orang anak angkat yang bernama Darmawan Wiroreno.

*Friedrich Ebert Stiftung* sebuah yayasan dari Jerman Barat yang bekerja untuk meningkatkan taraf hidup kaum buruh mulai mendekati Maria Ullfah dan Soebadio Sastrosatomo. Keduanya dimintai pertimbangan dan nasehat tentang bagaimana cara memperluas kegiatannya di Indonesia. Atas nasehat Maria Ullfah dan Soebadio, akhirnya yayasan *Friedrich Ebert Stiftung* dapat memperluas kegiatannya di Indonesia dan mendirikan sebuah yayasan Tenaga Kerja Indonesia di jalan Gatot Subroto. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Maria Ullfah dan Soebadio Sastrosatomo ikut dalam meletakkan dasar untuk mendirikan sebuah yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya, Maria Ullfah diangkat sebagai salah satu anggota Pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 1968. Maria Ullfah dan Soebadio yang dianggap sebagai orang sosialis oleh *Friedrich Ebert Stiftung* diundang ke Jerman Barat. Keduanya diundang secara pribadi oleh yayasan *Friedrich Ebert Stiftung* dan Partai Sosialis Jerman.

Maria Ullfah dalam bulan Februari 1968 diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Maria Ullfah merupakan perempuan pertama yang

---

<sup>110</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 142.

menjadi anggota DPA.<sup>111</sup> Jabatan tersebut merupakan jabatannya yang terakhir dalam ikatan pemerintah setelah Maria Ullfah dengan resmi dipensiunkan pada tahun 1967. Jabatan Maria Ullfah sebagai anggota DPA dijabatnya hingga tahun 1973. DPA merupakan lembaga negara yang bertugas memberi nasehat kepada eksekutif, dalam hal ini adalah presiden. Sebagai anggota DPA Maria Ullfah diundang oleh Pemerintah Australia untuk mengadakan kunjungan ke Australia pada tahun 1972. Sekembalinya dari Australia, Maria Ullfah singgah di Singapura dan berkunjung ke Markas Besar PAP (*People's Action Party*). Di Singapura Maria Ullfah meninjau berbagai kegiatan-kegiatan dari partai tersebut.

Antara tahun 1973 dan 1974 merupakan tahun yang bersejarah bagi Maria Ullfah. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama H. Mukti Ali dan Menteri Kehakiman Oemar Seno Adjie menyampaikan jawaban atas pandangan umum para anggota DPR mengenai RUU tentang perkawinan pada tanggal 27 September 1973 di Gedung DPR, Jakarta.<sup>112</sup> Pada saat Menteri Agama H. Mukti Ali memberikan penjelasan pemerintah atas RUU tentang perkawinan, tiba-tiba terdengar teriakan dari pemuda-pemudi golongan Islam yang menyatakan ketidaksetujuan mengenai RUU tersebut. Penyerbuan tersebut berakibat pada penundaan pembacaan jawaban atas pandangan umum para anggota DPR mengenai RUU tentang perkawinan. Selanjutnya DPR secara intern mengadakan rapat gabungan Komisi III dan IX DPR pada tanggal 6 Desember 1973. Setelah

---

<sup>111</sup> *Ibid.*,

<sup>112</sup> Maria Ullfah Subadio, *Ibid.*, hlm. 19.

melakukan peninjauan ulang dan beberapa perubahan, maka pada tanggal 22 Desember 1973 DPR mengesahkan RUU tentang perkawinan tepat pada Hari Ibu.

RUU tentang perkawinan selanjutnya diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>113</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut belum berlaku secara efektif dan baru mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 setelah keluarnya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975. Akhirnya apa yang diperjuangkan dan dicita-citakan Maria Ullfah sejak kembali ke tanah air pada tahun 1933 telah tercapai. Sebuah Undang-Undang Perkawinan yang dapat menjamin hak-hak perempuan dalam pernikahan telah terbentuk. Dalam pencapaian tersebut Maria Ullfah dengan rendah hati menyatakan bahwa ia tidak terlalu banyak berperan dalam tercapainya Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974. Meskipun demikian dalam hal ini kita patut mengapresiasi peran Maria Ullfah sebagai peletak dasar penanaman kesadaran dikalangan kaum perempuan tentang pentingnya Undang-Undang Perkawinan. Maria Ullfah telah berhasil membuka mata masyarakat terhadap banyaknya ketidak-adilan yang terdapat pada pelaksanaan kaidah-kaidah agama yang sering disalah tafsirkan.

Orde Baru sebagai suatu zaman baru yang dapat memulihkan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama pada kenyataannya membawa dampak yang kurang baik bagi rakyat Indonesia. Dibukanya Indonesia bagi investor asing membawa dampak buruk bagi kelangsungan perekonomian rakyat. Kasus korupsi dan salah urus kebijakan yang menguntungkan investor asing merupakan ciri khas

---

<sup>113</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 168.

pemerintahan Orde Baru. Kebijakan Soeharto tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa. Puncaknya adalah peristiwa Malari 1974, dimana para mahasiswa dan kaum intelektual lainnya dengan *santer* mengecam peranan dominan Jepang dalam perdagangan ekspor dan impor di Indonesia.<sup>114</sup> Ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mengunjungi Jakarta pada bulan Januari 1974 para mahasiswa mengadakan demonstrasi anti Jepang. Demonstrasi berjalan dengan ricuh dan berakibat pada pembakaran Pasar Senen. Akibat demonstrasi tersebut banyak dari pemimpin-pemimpin mahasiswa dan tokoh politik ditangkap, termasuk Soebadio Sastrosatomo.

Soebadio Sastrosatomo dicurigai melakukan aksi penghasutan kepada para mahasiswa agar melakukan aksi demonstrasi. Atas tuduhan tersebut akhirnya Soebadio Sastrosatomo ditahan oleh pemerintah dan untuk kedua kalinya ia menjadi tahanan. Soebadio ditahan selama lebih dari dua tahun, atau tepatnya selama delapan ratus delapan hari. Sama halnya dengan penahanan Soebadio pada era Soekarno, ia akhirnya dibebaskan tanpa melewati jalur persidangan dan artinya selama menjalani masa tahanan ia tidak pernah mendapatkan hukuman resmi.

Maria Ullfah dan Soebadio mendapatkan undangan dari Pemerintahan Belanda untuk menghandiri upacara pembukaan *Staten Generaal* pada bulan September 1976. Upacara tersebut dibuka dengan *troonrede* atau pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Ratu Juliana. Selain menghadiri upacara tersebut selama di Belanda Maria Ullfah diberi kesempatan untuk mempelajari

---

<sup>114</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 198.

berbagai kegiatan perempuan di negeri Belanda, seperti *Nederlandse Vrouwenraad*, *Emancipatie Commissie*, dan lembaga Ombud. Maria Ullfah juga berkesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Kementerian CRM (*Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk*) Dr. Hendriks. Pertemuan tersebut menjadi jalan bagi organisasi perempuan Indonesia di dunia internasional, karena setelah pertemuan tersebut setiap tahun pemerintah Belanda selalu mengundang berbagai organisasi perempuan untuk berkunjung ke Belanda.

Pada tahun 1978, Maria Ullfah mendapatkan undangan dari sahabatnya yang bernama Dr. Firnberg untuk menghadiri seminar yang diadakan di Linz (dekat Wina). Seminar tersebut membahas tentang sejarah pergerakan perempuan di Eropa sampai dengan Perang Dunia II dan sebagai pembicaranya adalah Dr. Hertha Firnberg, seorang menteri perempuan Austria. Maria Ullfah dan Soebadio Sastrosatomo selanjutnya pergi menunaikan ibadah haji pada tahun 1979. Setahun setelah melaksanakan ibadah haji Maria Ullfah dan Soebadio melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanannya kali ini hanya bersifat pribadi dan sebagai hiburan. Maria Ullfah dan Soebadio melakukan perjalanan ke Tokyo, Jepang untuk menemui Soejatmoko, mantan Duta Besar RI di Amerika Serikat dan baru diangkat menjadi Rektor United Nations University. Selain untuk menemui kawan lamanya, Maria Ullfah juga pergi ke Kyoto untuk bertemu dengan Prof. Kenji Tsuchiya seorang ahli tentang Indonesia pada Universitas Kyoto. Sekembalinya dari Jepang, Maria Ullfah singgah di Taipeh dan Hongkong dan diminta untuk memberikan ceramah tentang Undang-Undang Perkawinan.

Memasuki masa senja, Maria Ullfah tetap aktif melakukan berbagai kegiatan dalam masyarakat. Maria Ullfah tercatat masih aktif menjadi anggota pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam yayasan tersebut Maria Ullfah mengkhhususkan diri menangani masalah yang menyangkut kedudukan dan hak-hak tenaga kerja wanita. Selain itu, Maria Ullfah juga aktif dalam bidang perkoperasian. Tercatat sejak tahun 1977, Maria Ullfah menjadi Ketua III dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang tugas khususnya adalah dibidang perundang-undangan, mempelajari dan mencari peraturan dan perundangan yang mendiskriminasikan koperasi atau menghambat perkembangan koperasi. Selama Maria Ullfah aktif dalam perkoperasian, usaha koperasi dikalangan perempuan mendapatkan perhatian yang khusus. Hal tersebut ditujukan agar kaum perempuan aktif dalam mengembangkan kemandirian diri dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Masalah sosial pun tidak luput dari perhatian Maria Ullfah, ia aktif dalam bidang sosial dengan menjadi Ketua Yayasan Rukun Isteri. Yayasan tersebut fokus dalam mengurus panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Putera Setia di Gang Sentiong, Jakarta.

Memasuki tahun 1981 Maria Ullfah genap berusia tujuh puluh tahun, sebuah usia yang tidak muda lagi. Atas inisiatif beberapa organisasi masyarakat hari ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 18 Agustus diperingati dengan suatu pertemuan di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Perayaan ulang tahun ke tujuh puluh Maria Ullfah berlangsung dengan sederhana tetapi tetap meriah. Selain keluarga dekat dan sahabat Maria Ullfah, hadir pula perwakilan dari beberapa organisasi yang pernah diikuti oleh Maria Ullfah, seperti perwakilan

Kongres Wanita Indonesia, Korps Wanita dari berbagai cabang Angkatan Bersenjata, dan insan perfilman Indonesia. Diusianya yang semakin senja Maria Ullfah merasa bahagia karena bangsanya telah lepas dari penjajahan negara asing. Apa yang Maria Ullfah cita-citakan ketika masih menempuh studi di Belanda hingga ia bekerja sebagai guru sekolah partikelir telah tercapai.

Kesehatan Maria Ullfah mulai menurun ketika memasuki tahun 1988. Sejak tanggal 13 Maret Maria Ullfah dirawat di unit perawatan infeksi di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat). Menurut Soebadio dalam wawancaranya dengan Koran Kompas (Sabtu 16 April 1988), Maria Ullfah dirawat di RSPAD karena menderita sakit bronchitis dan asma serta lambung berdarah.<sup>115</sup> Selama dirawat di ruang ICU RSPAD kondisi kesehatan Maria Ullfah selalu naik-turun. Sebagai seorang suami Soebadio dengan setia mendampingi Maria Ullfah di rumah sakit. Soebadio mengisahkan tentang kemesraan Maria Ullfah ketika dirawat di RSPAD. “Saya ingin tidur dipangkuanmu”, kata Maria Ullfah kepada Soebadio. Menurut Soebadio, istrinya tidak pernah mengungkapkan kemesraan secara verbal, apalagi di rumah sakit. Seorang perawat yang mendengar perkataan Maria Ullfah tersebut berkata, “Bapak dan Ibu pacaran, ya?”. Mendengar celotahan tersebut Maria Ullfah tersenyum bahagia. Hal tersebut merupakan ungkapan sayang yang terakhir Maria Ullfah kepada suaminya.

Maria Ullfah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 15 April 1988. Pukul 02.15 dinihari Maria Ullfah wafat dan meninggalkan Soebadio,

---

<sup>115</sup> Anonim, “Maria Ulfah Soebadio Sudah Tiada”, Kompas, Sabtu, 16 April 1988.



seorang anak angkat (Ir. Darmawan), dan empat cucu.<sup>116</sup> Turut hadir untuk melayat di rumah jalan Guntur 49 adalah Menteri Perekonomian Ekuin Radius Prawiro dan isteri, Menko Kesra Soepardjo Rustam, Mensesneg Moerdiono, Brigjen (Purn.) Alex Kawilarang, mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso dan Letjen (Purn.) Kemal Idris. Jenazah diberangkatkan dari rumah duka jalan Guntur 49 ke Masjid di Taman Sunda Kelapa untuk disembahyangkan pada pukul 11.00 WIB. Selanjutnya jenazah dibawa ke Gedung Kowani (Kongres Wanita Indonesia) di jalan Imam Bonjol untuk disemayamkan sebelum dikebumikan. Jenazah Maria Ullfah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata melalui sebuah upacara kenegaraan yang dipimpin Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Ny. A. Sulasikin Murpratomo. Pelayat yang ikut hadir dalam upacara pemakaman Maria Ullfah di Kalibata adalah Menteri Sosial Haryati Soebadio, Ny. Rahmi Hatta, Mayjen TNI Syaukat (sekretaris militer presiden), beberapa perwira dan Korps wanita AD, AL, AU dan Polwan.<sup>117</sup> Selama tujuh puluh enam tahun berjuang, akhirnya Maria Ullfah harus kalah dengan mautnya.

Seluruh usaha Maria Ullfah selayaknya dikenang dan terus diperjuangkan, karena bagi Maria Ullfah sendiri perjuangan tersebut belum seratus persen tuntas. Bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan harus terus berjuang untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu menjadi isteri, ibu, dan pendidik bagi generasi

---

<sup>116</sup> Mohamad Cholid, dkk, "Maria Ulfah Kekasih Abadi Soebadio", Tempo, 23 April 1988, hlm. 109.

<sup>117</sup> Anonim, *loc.cit.*,

penerus bangsa. Selama berjuang, Maria Ullfah telah membawa dampak positif bagi kedudukan kaum perempuan, yaitu:

1. Tercapainya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menjamin kedudukan kaum perempuan di dalam perkawinan.
2. Adanya pencantuman butir-butir taklik-talak pada buku nikah yang dapat memperkuat kedudukan kaum perempuan dalam suatu pernikahan, karena jika sewaktu-waktu terdapat perlakuan sewenang-wenang dari suami, isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan Agama.
3. Adanya potret suami isteri di dalam buku nikah (bersifat wajib), sehingga buku nikah tidak akan disalah gunakan oleh pihak tertentu.
4. Poligami bukan lagi hal yang mudah dilakukan, seorang suami yang ingin berpoligami harus melalui pengadilan agama dan ditentukan dengan syarat-syarat yang tidak mudah, serta pihak istri berhak menentukan untuk bersedia dimadu atau tidak. Selain itu, pihak suami harus mampu dan adil.
5. Pasal 27 UUD 1945, tentang pencantuman asas kesetaraan warga negara di dalam hukum tanpa pengecualian. Jadi kedudukan kaum perempuan di dalam hukum akan disamakan dengan laki-laki dan tidak lagi dibedakan.
6. Adanya hakim perempuan dalam pengadilan Agama.
7. Adanya partisipasi kaum perempuan dalam bidang militer, yaitu dengan adanya Kowad (Korp Wanita Angkatan Darat).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Maria Ullfah lahir di kota Serang, Banten pada tanggal 18 Agustus 1911. Ia berasal dari keluarga priyayi, di mana ayahnya yang bernama Raden Mohammad Achmad adalah seorang Pamong Praja didikan Belanda. Raden Mohammad Achmad merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan Maria Ullfah, berkat pemikirannya yang progresif Maria Ullfah dapat mengecap pendidikan tinggi. Maria Ullfah mencatatkan namanya sebagai perempuan Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan gelar *Meester in de Rechten* (Mr) dari Universitas Leiden pada tahun 1933.
2. Peranan Maria Ullfah dalam kancah pergerakan nasional dimulai pada tahun 1934, di mana ia menjadi guru di sekolah menengah Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat. Selain itu, Maria Ullfah aktif pula mengadakan kursus pemberantasan buta huruf bagi ibu-ibu di Salemba Tengah dan Paseban. Peranannya dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dimulai ketika Maria Ullfah ikut dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua tahun 1935 di Batavia. Pasca kongres Maria Ullfah dipercaya untuk memimpin sebuah Biro Konsultasi yang bertugas mengurus segala permasalahan dalam perkawinan, khususnya membantu kaum perempuan yang mengalami kesulitan dalam perkawinan. Pada masa pendudukan Jepang Maria Ullfah memilih untuk bekerja di Departemen Kehakiman (*shikooku*). Menjelang proklamasi kemerdekaan tahun 1945,

Maria Ullfah menjadi anggota BPUPKI dan berhasil memasukkan pasal 27 UUD 1945 tentang kesetaraan warga negara di dalam hukum tanpa pengecualian. Pasca Proklamasi kemerdekaan Maria Ullfah ditugaskan Sutan Sjahrir untuk menjadi *liaison officer*, yaitu sebagai penghubung antara pemerintahan Republik dengan pemerintah sekutu.

3. Peranan Maria Ullfah pada masa awal kemerdekaan dimulai ketika ia dipercaya Sutan Sjahrir untuk duduk sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II dan III. Tugas utama Maria Ullfah adalah mengurus para tawanan wanita dan anak-anak Belanda yang ditawan di kamp-kamp Jepang. Selain itu, Maria Ullfah juga mengeluarkan Maklumat Kementerian Sosial tentang hari buruh sedunia. Sejak tanggal 19 Agustus 1947 hingga September 1962 Maria Ullfah menjabat sebagai Sekretaris Perdana Menteri dan Sekretaris Dewan Menteri, selanjutnya jabatan tersebut dirumuskan menjadi Direktur Kabinet RI. Sejak tahun 1950 -1961 Maria Ullfah menjabat sebagai ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia. Jabatan lain diluar pemerintahan yang dijabat lama oleh Maria Ullfah adalah Ketua Panitia Sensor Film (1950-1961).
4. Pasca pensiun sebagai pegawai negeri, Maria Ullfah diangkat menjadi anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada tahun 1968. Meskipun Maria Ullfah telah memasuki usia senja, tetapi ia masih tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti: pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (1968-1973), Ketua III dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), dan Ketua Yayasan Rukun Isteri (1970). Cita-cita Maria Ullfah

dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan akhirnya dapat terwujud ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974. Secara keseluruhan undang-undang tersebut memberi perlindungan kepada kaum perempuan, khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan. Peran Maria Ulfah dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan berakhir ketika ia meninggal dunia pada tanggal 15 April 1988.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

- Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Anonim. (1984). *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu setelah Kartini 1904-1984*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Azmi. (1986). *Inventaris Arsip Kementerian Sosial dan Kementerian Perburuahan dan Sosial (1946-1950)*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi 3. cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhur, I & Danasaputra. (1992). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV ILMU Bandung.
- Driyarkara. (1980). *Driyarkara tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Fauzie Ridjal, dkk. (1993). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Fernando R. Srivanto. (2008). *Das Panzer Strategi dan Taktik Lapis Baja Jerman 1935-1945*. Yogyakarta: Penerbit NARASI.
- Gadis Rasid. (1982). *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Jurusan Pendidikan Sejarah. (2003). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Khoiruddin Nasution. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Inis.
- Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

- Lembaga Soekarno-Hatta. (1986). *Sejarah Lahirnya Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Louis Gottschalk. "Understanding History: a Primer of Historical Method" a.b. Nugroho Notosusanto. (1986). *Mengenal Sejarah*, Jakarta: UI Press.
- Maria Ullfah Subadio. "Bung Sjahrir", dalam Rosihan Anwar. (1980). *Mengenang Sjarir*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. (1981). *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan (suatu pengalaman) Ceramah tanggal 28 Februari 1981 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nani Soewondo. (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. (2011). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nina H. Lubis. (2012). *G 30 S Sebelum dan Sesudah*. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat.
- Poeze, Harry. A. (2008). "In Het Land van de Overheerser I- Indonesiers in Nederland 1600-1950" terj. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600-1950)*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. (1990). "Orang-orang Indonesia di Universitas Leiden", dalam *Makalah-makalah yang Disampaikan dalam Rangka Kunjungan Menteri Agama RI H. Munawir Sjadzali M.A. ke Negeri Belanda*. Jakarta: Inis.
- Riant Nugroho. (2011). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosihan Anwar. (2002). *In Memoriam Mengenang yang Wafat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_. (1995). *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rushdy Hoesein. (2010). *Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Santo Koesoebjono & Solita Koesoebjono-Sarwono. (2008). *Siti Soendari, Adik Bungsu dr. Soetomo*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Sardiman A.M. (2004). *Mengenal Sejarah*. Yogyakarta: Bigraf Publising.

- Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Simanjuntak, P.N.H. (2003). *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.
- Slamet Muljana. (2008). *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid II*. Yogyakarta: LKiS.
- Soebadio Sastrosatomo. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Stuers, Cora Vreede-de. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Suhartono. (2001). *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujanti Kartowijono. (1982). *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia Ceramah tanggal 27 Maret 1975 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Wieringa, Saskia E. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.
- Yuanda Zara, M. (2009). *Peristiwa 3 Juli 1946 Menguk Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **SUMBER ARSIP:**

- ANRI. Kabinet Presiden RI No. 2044. *Surat Pernyataan Gerakan Wanita Sosialis*.
- ANRI. Kementerian Perburuhan dan Sosial 1946-1950 No. 1. *Berkas Mengenai Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial 20 Januari 1946- 2 Oktober 1947*.
- ANRI. Kementerian Penerangan No. 239. *Berkas Mengenai Jatuhnya Kabinet Sjahrir*.
- ANRI. Sejarah Lisan Tahun 1973-1994 No. 154. *Maria Ulfah- Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*. 1983.



**SUMBER SURAT KABAR:**

- Anonim. "Politik Kabinet Baroe". *Kedaulatan Rakyat*. Rabu 6 Maret 1946.
- \_\_\_\_\_ . "Maklumat Kementerian Sosial". *Kedaulatan Rakyat*. Sabtu, 27 April 1946.
- \_\_\_\_\_ . "Maria Ulfah Soebadio Sudah Tiada", *Kompas*, Sabtu, 16 April 1988.
- \_\_\_\_\_ . "Kekoeasaan Pemerintah Sepenoeh-penoehnja Kembali Ketangan Presiden". *Kedaulatan Rakyat*. Sabtu 29 Juni 1946.
- \_\_\_\_\_ . "Kabinet Nasional Lebih Kuat". *Kedaulatan Rakyat*. Rabu 2 Oktober 1946.

**SUMBER MAJALAH:**

- Anonim. (2605). "Anggota-anggota dari Badan untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan". *Indonesia Merdeka*. Nomor 3. hlm. 5.
- \_\_\_\_\_ . (1955). "Tamu Asing di Indonesia". *Majalah Merdeka*. 14 Mei 1955. hlm. 7-8.
- \_\_\_\_\_ . (1977). "Wilopo dan Pohon Ditengah Kekacauan". *Tempo*. Nomor. 6. 9 April 1977. hlm. 26-29.
- Bonnie Triyana, dkk. (2012). "Agar Bahtera Tak Lekas Retak". *Historia*. Nomor 1. hlm. 56-59.
- \_\_\_\_\_ . (2012). "Anak Kos Witte Singel 25". *Historia*. Nomor. 1. hlm. 29-31.
- \_\_\_\_\_ . (2012). "Dalam Jangkauan Radal Bung Kecil". *Historia*. Nomor 1. hlm. 60-62.
- \_\_\_\_\_ . (2012). "Empat Duka dalam Semasa". *Historia*. Nomor 1. hlm. 46-48.
- \_\_\_\_\_ . (2012). "Guru Sejarah Sekolah Merah". *Historia*. Nomor 1. hlm. 32-35.
- \_\_\_\_\_ . (2012). "Luka Bibi di Hati Maria". *Historia*. Nomor 1. hlm. 24-26.
- \_\_\_\_\_ . (2012). "Menteri Sosial Banyak Urusan". *Historia*. Nomor 1. hlm. 63-67.
- \_\_\_\_\_ . (2012). "Panggil Dia Ietje". *Historia*. Nomor 1. hlm. 20-23.
- \_\_\_\_\_ . (2012). "Taklik-Talak Golongan Maria". *Historia*. Nomor 1. hlm. 68-71.
- Mansyur Amin. (1977). "Wanita itu Orang Banten". *Tempo*. 26 Februari 1977.

Maria Ullfah Santoso. (1940). “Kemajuane Wanita Indonesia Bakda Jamane R.A Kartini”. *Penjebar Semangat*. Volume 34. 20 April 1940. hlm. 4.

Mohamad Cholid, dkk. (1988). “Maria Ullfah Kekasih Abadi Soebadio”. *Tempo*. 23 April 1988. Hlm. 109.

#### **SUMBER JOURNAL DAN SKRIPSI:**

Kahin. Geoge McT. (1989). “In Memoriam: Maria Ullfah Soebadio, 1911-1988”. *Indonesia*. Volume 47. hlm. 118-120.

Galuh Ambar Sari. “Gerakan Perempuan Indonesia dalam Konstelasi Politik 1950-an Studi Perwari”. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY. Yogyakarta. 2010.

#### **SUMBER INTERNET:**

Anonim. 2010. “Hussein Djajadiningrat”. Tersedia pada [www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3662/hussein-djajadiningrat](http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3662/hussein-djajadiningrat). diakses pada Jumat, 25 April 2014, pukul 21.19 WIB.

Anonim. 2014. “Fakultas Hukum”. Tersedia pada [www.ui.ac.id/id/academic/page/fh](http://www.ui.ac.id/id/academic/page/fh). diakses pada Senin, 21 April 2014, pukul 19.13WIB.

Anonim. “Sejarah ILO”. Tersedia pada <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>, diakses pada Minggu, 18 Mei 2014, pukul 02.10 WIB.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1****MARIA ULLFAH**

a. Gambar 1: Maria Ullfah pada masa muda



b. Gambar 2: Foto Maria Ullfah pada masa tua

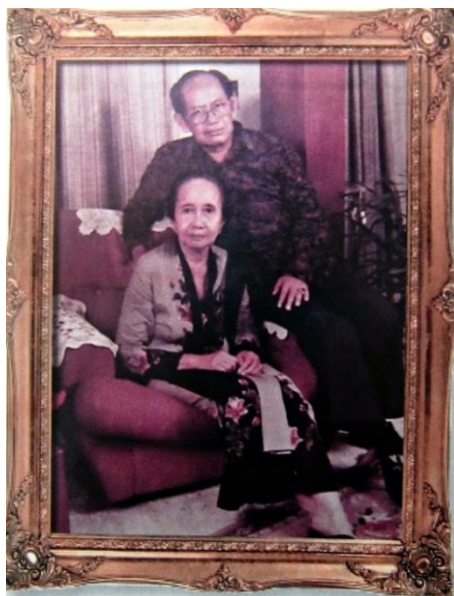
Sumber: Gambar 1 diambil dari *journal* karya George McT. Kahin yang berjudul *in Memoriam: Maria Ullfah Soebadio, 1911-1988*. Gambar 2 merupakan dokumen pribadi penulis, diambil dari Rumah Maria Ullfah Jalan Guntur No. 49, pada tanggal 24 Februari 2014.

## LAMPIRAN 2

## Foto Keluarga Maria Ullfah



- a. Gambar 1: Keluarga Maria Ullfah, dari kiri ke kanan; Iwanah, R.A. Hadidjah Djajadiningrat, R.A.A. Mohammad Achmad, Hatnan, dan Maria Ullfah



- b. Gambar 2: Maria Ullfah dan Soebadio Sastrosatomo (suami ke-2)

Sumber: Gambar 1 diambil dari Buku *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya* karya Gadis Rasid, 1982, Jakarta: Bulan Bintang. Gambar 2 diambil dari *Majalah Historia*, Nomor 1, Tahun 2012.

**LAMPIRAN 3****Foto Rumah Maria Ullfah Jalan Guntur 49 Jakarta**

a. Gambar 1: Rumah Maria Ullfah Nampak dari depan



b. Gambar 2: Rumah Maria Ullfah bagian dalam

Sumber: Gambar 1 dan 2 merupakan Dokumen Pribadi Penulis, diambil dari Rumah Maria Ullfah Jalan Guntur No. 49, pada tanggal 24 Februari 2014.



**LAMPIRAN 4****Maria Ulfah dalam masa pergerakan nasional**

- a. Gambar 1: Foto Maria Ulfah bersama guru dan siswa sekolah menengah Muhammadiyah, Kramat.

Sumber: Gambar 1 diambil dari Buku *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* karya Gadis Rasid, 1982, Jakarta: Bulan Bintang.

## LAMPIRAN 5

## Maria Ullfah dalam Kabinet



a. Gambar 1: Foto Kabinet Sjahrir bersama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta di depan Gedung Negara di Yogyakarta.



b. Gambar 2: Rombongan Kabinet Sjahrir tengah meninjau sebuah pabrik senjata. Di belakang Maria Ullfah adalah dr. Darma Setiawan (Menteri Kesehatan), di depan nampak Sutan Sjahrir (Perdana Menteri) dan Amir Syarifuddin (Menteri Pertahanan).

Sumber: Gambar 1 dan 2 diambil dari Buku *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya* karya Gadis Rasid, 1982, Jakarta: Bulan Bintang.



## LAMPIRAN 6

### Susunan anggota BPUPKI

*Kaico* adalah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, *Fuku Kaico* adalah Itibangase

Yosio dan R.P. Soeroso. *Iin* terdiri atas:

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Abikoesno Tjokrosoejoso          | 33. Mr. R. Samsuedin              |
| 2. Hadji A. Sanoesi                 | 34. Mr. R. Sastromoeljono         |
| 3. K.H. Abdoel Halim                | 35. Mr. R. Singgih                |
| 4. Prof. Dr. R. Asikin              | 36. Ir. Soekarno                  |
| 5. R. Aris                          | 37. R. Soedirman                  |
| 6. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo    | 38. R. Soekardjo Wirjopranoto     |
| 7. B.P.H. Bintoro                   | 39. Dr. Soekiman                  |
| 8. K.H. Dewantara                   | 40. Mr. A. Soebardjo              |
| 9. A.M. Dasaad                      | 41. Prof. Dr. Soepomo             |
| 10. Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat | 42. Ir. R.M.P. Soerachman T.      |
| 11. Drs. Moh. Hatta                 | 43. M. Soetardjo Kartohadikoesomo |
| 12. K. Bagoes H. Hadikoesoemo       | 44. R.M. T.A. Soerjo              |
| 13. Mr. R. Hindromartono            | 45. Mr. Soesanto                  |
| 14. Mr. Muh. Yamin                  | 46. Soewandi                      |
| 15. R.A.A. Soemitro Kolopaking P.   | 47. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat  |
| 16. Dr. R. Koesoemah Atmadja        | 48. K.H.A. Wachid Hasjim          |
| 17. Mr. J. Latuharhary              | 49. K.R.M.T.H. Woerjaningrat      |
| 18. R.M. Margono Djojohadikoesoemo  | 50. Wiranatakoesoema              |
| 19. Mr. A.A. Maramis                | 51. K.R.M.T. Wongsonagoro         |
| 20. K.H. Masjoekoer                 | 52. Mr. Ny. Maria Ullfah Santoso  |
| 21. K.H.M. Mansoer                  | 53. Ny. Soenarjo Mangoenpoespito  |
| 22. Moenandar                       | 54. Oei Tjong Hauw                |
| 23. A.K. Moezakkir                  | 55. Oeij Tiang Tjoei              |
| 24. R. Oto Iskandar Dinata          | 56. Liem Koen Hian                |
| 25. Parada Harahap                  | 57. Tan Eng Hoa                   |
| 26. B.P.H. Poerbojo                 | 58. P.F. Dahler                   |
| 27. R. Abdoelrahim Pratalykrama     | 59. A.R. Baswedan                 |
| 28. R. Rooslan Wongsokoesoemo       | 60. Abdul Kadir                   |
| 29. Prof. Ir. R. Rooseno            |                                   |
| 30. H. Agoes Salim                  |                                   |
| 31. Dr. Samsi                       |                                   |
| 32. Mr. RM. Sartono                 |                                   |

Sumber: Anonim, "Anggota-anggota dari Badan untuk Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan", *Indonesia Merdeka*, No. 3, Tahun 1, 25 Mei 2605, hlm. 5.

**LAMPIRAN 7****Susunan Kabinet Sjahrir II dan III****A. Susunan Kabinet Sjahrir II:**

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Perdana Menteri                     | : Sutan Sjahrir                 |
| 2. Menteri Luar Negeri                 | : Sutan Sjahrir                 |
| 3. Menteri Muda Luar Negeri            | : Haji Agoes Salim              |
| 4. Menteri Dalam Negeri                | : Dr. Soedarsono                |
| 5. Menteri Muda Dalam Negeri           | : Samadikun                     |
| 6. Menteri Pertahanan                  | : Mr. Amir Syarifuddin          |
| 7. Menteri Muda Pertahanan             | : Arudji Kartawinata            |
| 8. Menteri Kehakiman                   | : Mr. Soewandi                  |
| 9. Menteri Muda Kehakiman              | : Mr. Hadi                      |
| 10. Menteri Keuangan                   | : Ir. Soerachman Tjokroadisuryo |
| 11. Menteri Muda Keuangan              | : Mr. Sjafroeddin Prawiranegara |
| 12. Menteri Penerangan                 | : Moh. Natsir                   |
| 13. Menteri Pertanian/ Persediaan      | : Ir. Rasad                     |
| 14. Menteri Muda Pertanian             | : Ir. Saksono                   |
| 15. Menteri Perdagangan/ Perindustrian | : Ir. Darmawan Mangunkusumo     |
| 16. Menteri Perhubungan                | : Ir. Abdoel Karim              |
| 17. Menteri Muda Perhubungan           | : Ir. Juanda                    |
| 18. Menteri Pekerjaan Umum             | : Ir. Putuhena                  |
| 19. Menteri Muda Pekerjaan Umum:       | Ir. Laoh                        |
| 20. Menteri Sosial                     | : Mr. Maria Ullfah Santoso      |
| 21. Menteri Muda Sosial                | : Mr. A. Madjid Djojoadingrat   |
| 22. Menteri Pengajaran                 | : Muhammad Syafe'i              |
| 23. Menteri Muda Pengajaran            | : Dr. T.S.G. Moelia             |
| 24. Menteri Agama                      | : H. Moh. Rasjidi               |
| 25. Menteri Kesehatan                  | : Dr. Darma Setiawan            |
| 26. Menteri Muda Kesehatan             | : Dr. J. Leimena                |
| 27. Menteri Negara                     | : Wikana                        |

Sumber: Surat Kabar Kedaulatan Rakjat 12 Maret 1946.

## B. Susunan Kabinet Sjahrir III

**LEBIH KOEAT !**

*Makloemat Presiden no 2 taioen 1946.*

**O**LEH KARENA KEADAAN DALAM NEGERI TELAH KEMBALI BIASA SEHINGGA KABINET DAN LAIN2 BADAN RESMI DAPAT BEKERDJA SEBAGAIMANA MESTINJA, MAKA DENGAN INI MAKLOEMAT PRESIDEN NO. 1, TAHOEN 1946 KAMI TJABOET KEMBALI

JOGJAKARTA, DJAM 11.00 TG. 2 OKTOBER 1946.  
PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA.  
S O E K A R N O.

*Makloemat Presiden no. 3 taioen 1946*

**K**AMI, PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA, MENGIKAT PERMINTAAN KAMI PADA TG. 14 AGOESTOES JANG TELAH LA-LOE KEPADA P. T. SOETAN SJAHRIK OENTOEK MEMBENTOEK KABINET JANG BERSIFAT BERTANGGOENG DJAWAB SERTA BERSIFAT NASIONAL DENGAN DASAR JANG SELOEASENJA, LE-PAS DARI IKATAN PARTAI, DENGAN INI MENGESAHKAN SOE-SOENAN KABINET JANG TELAH DIADJOEKAN OLEH P. T. SOE-TAN SJAHRIK KEPADA KAMI SBB:

Perdana Menteri	— St. Sjahrir (Partai Sosialis)
Menteri Loear Negeri	— St. Sjahrir
Wakil idem	— H. Agoes Salim
Menteri Dalam Negeri	— Mr. Moh. Roem (Masjoemi)
Wakil idem	— Wijono (Barisan Tani Indonesia)
Menteri Pertahanan ✓	— Mr. Amir Sjarifoeddin (Partai Sosialis).
Wakil idem	— Harsono Tjokroaminoto (Masjoemi)
Menteri Kemakmoeran	— Dr. A. K. Gani
Wakil idem	— Mr. Joesoef Wibisono (Masjoemi).
Menteri Penerangan	— M. Natsir (Masjoemi)
Wakil idem	— A. K. Baswedan
Menteri Pengadjaran	— Mr. Soewandi
Wakil idem	— Ir. Goenarso
Menteri Keorangan	— Mr. Sjafroedin
Wakil idem	— Mr. Loekman Hakim (P.N.I.)
Menteri Sosial	— Mr. Maria Ulfah Santoso (Perwari/P.P.I.)
Wakil idem	— Mr. Abdoelmadjid (Partai Sosialis)
Menteri Agama	— Fatoerrachman (Masjoemi)
Menteri Perhoehoengan	— Ir. Djoenda
Wakil idem	— Setiadjid (P.B.I.)
Menteri Pekerdjaan Oemoem	— Ir. Putuhena
Wakil idem	— Ir. Laoh
Menteri Kesehatan	— Dr. Darmasetiawan
Wakil idem	— Dr. Leimena
Menteri Kehakiman	— Mr. Soesanto (P.N.I.)
Wakil idem	— Mr. Hadi
Menteri Negara:	— Hamengkoe Boewono IX, Dr. Soedarsono (Partai Sosialis), Wikana (Pesindo), Wahid Hasjim (Masjoemi) dan Mr. Tan Poo Goan.

JOGJAKARTA, TG. 3 OKTOBER 1946.  
PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA.  
SOEKARNO.

Gambar 2: Susunan Kabinet Sjahrir III dalam Surat Kabar Kedaulatan Rakjat, 2 Oktober 1946

**LAMPIRAN 8****Maria Ulfah dalam Kongres Wanita**

a. Gambar 1: Foto Maria Ulfah bersama dengan ibu-ibu peserta Kongres Wanita Indonesia ke IX di Bandung tahun 1952.



b. Gambar 2: Foto Maria Ulfah bersama dengan ibu-ibu anggota Kongres Wanita Indonesia.

Sumber: Gambar 1 diambil dari Buku *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* karya Gadis Rasid, 1982, Jakarta: Bulan Bintang. Gambar 2 diambil dari *Majalah Historia* Nomor 1 Tahun 2012.

LAMPIRAN 9

ARSIP

ANRI. Kementerian Penerangan No. 239. Berkas Mengenai Jatuhnya Kabinet Sjahrir.

KEMENTERIAN PENERANGAN  
DINAS PRIANGAN  
GAROET

KEPADA  
Pa. Mosen Lemunan Dist. Garoet  
Piseci Kem. Penerangan  
di DIJOGJAKARTA

No. 112/P.O./1'47.

**SOERAT - PENGANTAR**

Banjaknja	Matjam jang dikirim	Keterangan
1	Laporan disekitar djatoehnja Kabinet Sjahrir. 9.12.47 26.7.47 22.9.47 A II +	Agar soepaja Padoeka Troen mendiedi mak- loem adanja.

Kami kirimkan oentoek diterima/dibagikan/disiarkan/diketahoei/isi dan maksoednja.

Tjikoera] Grt. 627/6/47

ICHTIZAB

GAROET, 22 April 1947  
Kementerian Penerangan  
Dinas Priangan,  
Pemb. M. A. Sjahrir

ARSIP NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA



-Laporan disekitar djabatnja  
MASJUMI

Kabinet Sjahrir.-

Pendahuluan:

Dengan ini kami sampaikan laporan jang berkenaan dengan suara rakjat disekitar djabatnja kabinet Sjahrir dll., jang mana kami gambarkan dalam beberapa bagian jaitu:

1. Suara2 terhadap djabatnja Kabinet Sjahrir;
2. Suara umum terhadap Kabinet Amir;
3. Suara rakjat terhadap tidak duduknja Masjumi dalam Kabinet Amir;
4. Suara2 jang berkenaan soal gendarmerrie.

1. Suara2 terhadap djabatnja Kabinet Sjahrir:

Suara2 ada bermatjam2, selaras dengan tingkat dan golonganja masing2, jaitu:

- a. Golongan pegawai dan intellegensia menjesalkan, dan berpendirian bahwa perubahan Kabinet/tak akan memberikan hasil jang lebih memuaskan;
- b. Sajap Kiri tetap teguh kepertjajaan terhadap Pemerintah, dan beberapa golongan menganggap pengunduran ~~dan~~ Sjahrir suatu tactische zet mengenai siasat;
- c. Rakjat desa tak memikirkan hal ini dan tidak pula mentjoba berebut faham, hanja pendirian telah tertanam dalam isi djiwanda, bahwa dalam segala hal Belanda-lah jang melakukan tipu-daja;
- d. Kalangan Masjumi disana-sini ada jang bergembira, sebab tidak 100% menjetudjuinja politiek Sjahrir, teristimewa mengenai politik naskah dan adanja tudjuan terdjelmanja Pemerintah Darul Ialam. Kalangan ini beranggapan dengan djabatnja Sjahrir, djalan terbuka guna menjusun kabinet baru, dimana diharapkan party-nja jang berkuasa.

2. Suara Umum terhadap Kabinet Amir:

Suara terhadap ini-pun seperti jang telah dikemukakan diatas, adalah bermatjam2, jaitu:

- a. Kalangan jang mengikuti aliran politik serta evoloesi-nja nota Belanda dan contra-proposal dari pihak Republik, mempunyai pendirian, bahwa kuat atau lemahnja Kabinet Amir ini, tergantung dari besar atau ketjilnja tundjangan dari rakjat;
- b. Golongan kiri tetap dengan perhitungan;
- c. Kalangan Masjumi beranggapan bentukan kabinet tergopoh2, tak mungkin berdiri lama; tak mungkin pula memberi politik jang tegas. Meneruskan politik Sjahrir, tak akan memuaskan dan tak bisa membuktikan tjita2 bagian bangsa jang terbebe-  
sa. Djuca berhubung dengan pencharapan party jang kerap kali didengungkan dalam party-propagandanja, bahwa Masjumi



dalam waktu 2 bulan atau paling akhir bulan Puasa akan memegang kekuasaan dalam Pemerintahan, dengan tersusunja Kabinet Amir ini, ~~demikian~~ menimbulkan keketjawaan. .... :lah. Tuduhan2 jang langsung atau tidak dengan halus atau tidak, terhadap melesetnja propaganda Masjumi ~~itu~~ itu; akan meruntjingkan pertentangan party ini dan party lain, jang mana pada saat ini belum nampak dengan djelas;

- d. Segala andjuran2 jang dipoetoeskan bersama, sebagai hasil koordinasi dikalangan pengurus Pusat dari masing2 party, kadang2 ditorpedeer oleh pemimpin ranting Masjumi di Pedesaan, dan mengakibatkan tak bisa dinjatakan dilapisan bawah.

Para rakjat terhadap tidak duduknja Masjumi dlm Kabinet baru:

- a. Ada golongan jang mempunjai pendirian, bahwa tidak masuknja Masjumi dalam Kabinet Amir ini, menguntungkan, karena ber-~~locasannya~~ Masjumi dalam kabinet, akan membesarkan fanatisme dikampung2 jang kadang2 menjinggung perasaan dan mengganggu persatuan dikalangan kepartaian. Adapun ini timbul dari golongan intellegensia dan kaum pegawai. Maka untuk melinjapkan salah paham dan melinjapkan tuduhan2, P.B. Masjumi menjierkan maklumat guna menjelaskan kepada umum pendiriannya, diantaranya "lebih baik mengundurkan diri, dari pada turut tjampur dengan tidak pernah penjjaminan bisa bekerdja correctief, ~~dsb~~".

Para2 jang berkenaan soal Gendarmerrie:

Soal gendarmerrie adalah soal hangat, jang mendjadi pertjakaan sehari2 disegala lapangan. Sege nap golongan dan lapisan tidak menjeturndji, bahkan menentang dengan sungguh2, bila soal gendarmerrie seluruhnja diterima oleh Pemerintah. Diantaranja suara2 jang kami dengar jang dicoetjapkan dengan terus terang dari ~~para~~ rakjat dari pelbagai kalangan, bahwa bila Pemerintah menerima gendarmerrie seluruhnja, berarti lenjapnja loyaliteit seluruh rakjat baik pegawai Negeri ataupun tidak. Dan rakjat akan meneruskan perdjjuangannya zonder Pemerintah.

Garut, 21 - Djuli - 1947.-

a.n. Kementerian Penerangan Dinas ~~Penerangan~~,  
Wakil Pemimpin Umum,



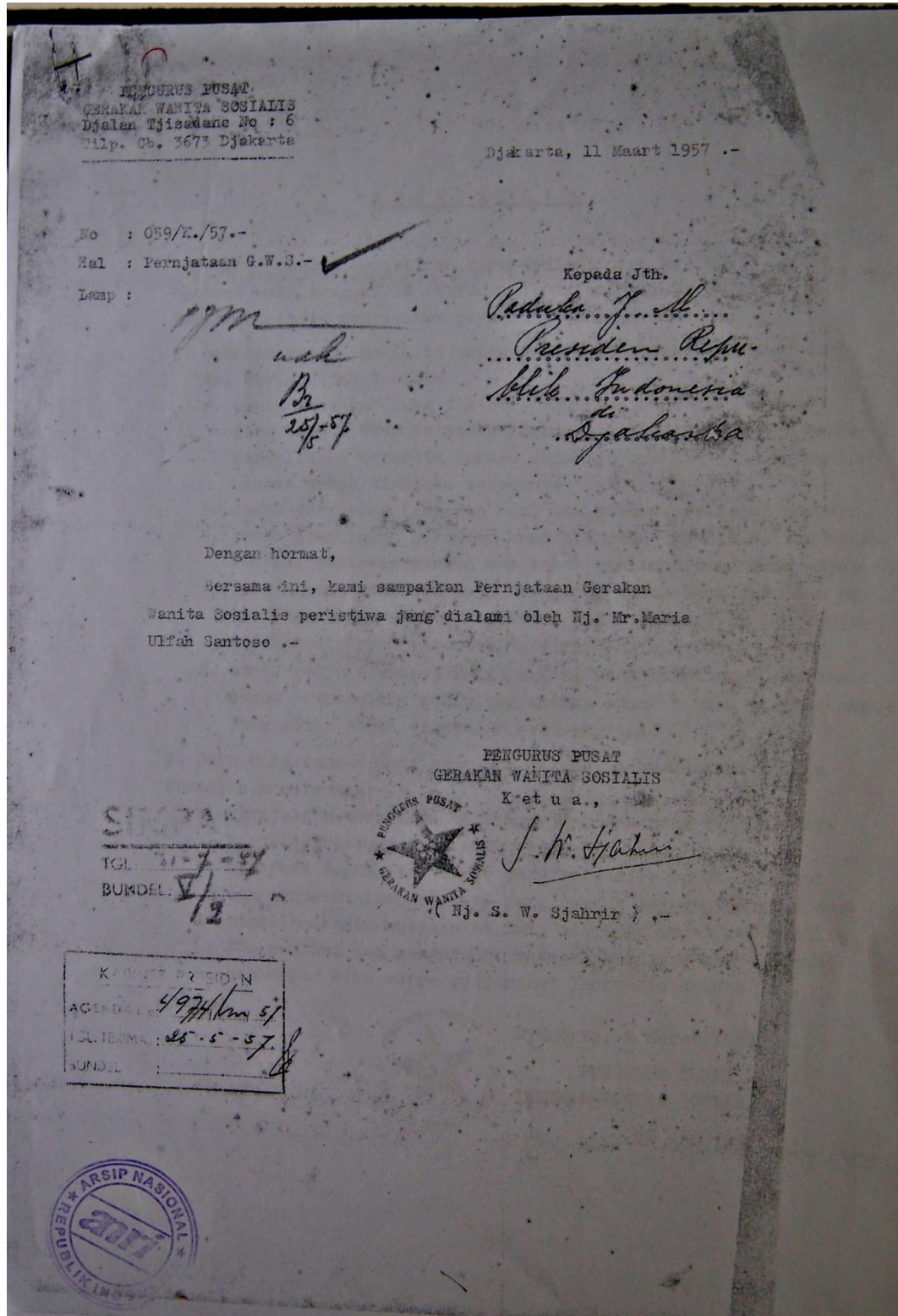
*[Handwritten signature]*  
(P. H. Komar).-

pesan dikirimkan kepada:  
Kementerian Penerangan Djogjakarta.  
Sekretariat jangara di Djogjakarta.  
Kedjajaan di Garoet.





ANRI. Kabinet Presiden RI No. 2044. Surat Pernyataan Gerakan Wanita Sosialis.





PENGURUS PUSAT  
GERAKAN WANITA SOSIALIS  
djl. Tjisadane 6, Djakarta

P E R N J A T A A N .

Berhubung dengan peristiwa yang dialami oleh Mr. Maria Ulfah Santoso pada tanggal 26 Februari 1957, maka Pusat Gerakan Wanita Sosialis menjatakan pendirian sebagai berikut:

1. Gerakan Wanita Sosialis menganggap pentjulikan terhadap diri Mr. Maria Ulfah Santoso
  - a. suatu tindakan yang tak bertanggung-djawab dari orang2 yang dengan sesuatu maksud hendak main hakim sendiri tanpa menjelidiki terlebih dahulu duduknja perkara yang merupakan alasan untuk tindakan tersebut.
  - b. suatu perkosaan terhadap hak2 dan kebebasan2 dasar manusia.
  - c. suatu penghinaan terhadap kaum ibu pada umumnja dan terhadap seorang pemimpin wanita dan tokoh nasional pada khususnja, yang selama umur hidupnja berdjoang untuk kemajuan dan kepentingan kaum wanita Indonesia dengan konsekwen dan dengan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri.
  - d. suatu gejala kemasjarakatan yang mengchawatirkan, karena dapat menimbulkan sentimen2 antara suku2 bangsa dalam suasana yang sudah serba eksplosif sekarang ini.
2. Berhubung dengan hal2 tersebut diatas, maka Gerakan Wanita Sosialis memutuskan:
  - a. mentjela sekeras2nja tindakan yang sewenang-wenang, terburu2 dan diluar kesopanan itu.
  - b. mendesak kepada instansi2 yang berwadjib untuk mengusut dan menjelesaikan perkara yang sangat menggontjangkan berbagai kalangan masjarakat ini, sehingga dapat mendjernihkan suasana dan mengurangi ketegangan2 yang mempengaruhi kehidupan kita warga masjarakat Indonesia dewasa ini.



Djakarta, 8 Maret 1957

PENGURUS PUSAT  
GERAKAN WANITA SOSIALIS.

